



**POSISI TAWAR TIMOR LESTE UNTUK MEMPEROLEH
STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI ASEAN**

***(BARGAINING POSITION OF TIMOR LESTE FOR ACHIEVING
FULL MEMBERSHIP STATUS IN ASEAN)***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

DIAN AYU ROHANI

NIM 100910101001

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2014

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Segala;
2. Ibunda Nur Hidayati dan Ayahanda Tri Haryono tercinta;
3. Adik kandungku tersayang, Wahyu Pandu Jatmiko;
4. Guru-gurukuyang mulia sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi;
5. Seluruh teman, sahabat, dan saudara yang terkasih;
6. Almamater Universitas Jember tercinta.

MOTTO

“Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”
(Terjemahan Surat At-Talaaq ayat 7)^{*)}

”Hardwork beats talent, if talent doesn’t work hard”

(Tim Notke)^{**)}

“I’m enough of an artist to draw freely upon my imagination. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.”

(Albert Einstein)^{***)}

^{*)}Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Syaamil Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.

^{**)}Dr. Piers Steel(*Psychology Today*). 2011. “*Hard work vs Talent: Who Wins?*”.<http://www.psychologytoday.com/blog/the-procrastination-equation/201110/hard-work-beats-talent-only-if-talent-doesn-t-work-hard>, [Diakses pada tanggal 24 September 2012].

^{***)}Donny Dhigantoro. 2007. *5cm*. Jakarta: PT. Grasindo.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Dian Ayu Rohani

NIM : 100910101001

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Posisi Tawar Timor Leste Untuk Memperoleh Status Keanggotaan Penuh Di ASEAN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30April 2014

Dian Ayu Rohani

NIM 100910101001

SKRIPSI

**POSISI TAWAR TIMOR LESTE UNTUK MEMPEROLEH STATUS
KEANGGOTAAN PENUH DI ASEAN**

Oleh

Dian Ayu Rohani

NIM 100910101001

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Bagus Sigit Sunarko, Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Posisi Tawar Timor Leste Untuk Memperoleh Status Keanggotaan Penuh Di ASEAN” telah diuji dan disahkan pada:

hari : Rabu

tanggal: 30 April 2014

waktu : 11.00 WIB

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Supriyadi, M.Si
NIP 195803171985031003

Sekretaris I,

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D
NIP 196802291998031001

Anggota I,

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP 195908311989021001

Sekretaris II,

Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si
NIP 196105151988021001

Anggota II,

Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si
NIP 197212041999031004

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.

NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Posisi Tawar Timor Leste Untuk Memperoleh Status Keanggotaan Penuh Di ASEAN; Dian Ayu Rohani; 100910101001; 2014; 148 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Timor Leste merupakan negara termuda di kawasan Asia Tenggara yang sejak awal berdirinya memprioritaskan politik luar negerinya untuk berintegrasi dengan negara-negara sekawasan yang terhimpun dalam asosiasi negara-negara kawasan Asia Tenggara, yaitu *Association of South East Asian Nations*(ASEAN). Timor Leste mengamati sepak terjang atau eksistensi ASEAN yang terus menunjukkan hubungan kooperatif antaranggota-nya di berbagai bidang baik pada lingkup kawasan regional maupun internasional dengan progres signifikan, solid dan dinamis. Timor Leste sendiri memiliki kebutuhan sebagai negara baru seperti memajukan pembangunan dalam negeri yang masih sarat akan tantangan multiaspek dari dalam maupun luar negeri serta menghadapi berbagai ancaman global. Dengan konsiderasi demikian, Timor Leste memutuskan untuk bergabung menjadi negara anggota ASEAN dan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN yang dimulai sejak tahun 2002 (masa awal Timor Leste resmi menjadi negara berdaulat) yang masih berjalan hingga saat ini.

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode pengumpulan data melalui metode dan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) serta metode analisis data secara deskriptif-kualitatif dan prediktif (berpedoman pada referensi atau data-data faktual dan kredibel). Dengan menggunakan metode penelitian tersebut peneliti meneliti data yang tersaji sehingga mendapatkan jawaban atas posisi tawar Timor Leste untuk memperoleh status

keanggotaan penuh di ASEAN. Timor Leste melakukan upaya diplomasi untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN, yang berorientasi pada diplomasi terbuka, diplomasi ekonomi, dan diplomasi politik. Untuk mengetahui posisi tawar Timor Leste dalam memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN, dapat diteliti dengan berpedoman pada Piagam ASEAN (sebagai aturan dasar dalam institusi ASEAN) yang dikorelasikan dengan segala upaya diplomasi yang dilakukan Timor Leste serta beberapa faktor lain yang korelatif.

Meski belum ada kejelasan perihal penerimaan status keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN, namun Timor Leste memiliki posisi tawar yang tinggi untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN. Sebab Timor Leste cukup mampu berkontribusi dalam pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara serta posisi Timor Leste sendiri di kawasan menjadi pertimbangan penting terhadap stabilitas keamanan kawasan oleh ASEAN (di sini posisi tawar keanggotaan Timor Leste di ASEAN sesuai dan memenuhi aturan Piagam ASEAN Bab I Pasal 1 Ayat 1, 3, dan 8). Kedua, Timor Leste cukup mampu berpartisipasi secara positif dalam kerjasama regional dan cukup berhasil melakukan pembangunan kapasitas (*capacity building*) di kawasan Asia Tenggara (di sini posisi tawar keanggotaan Timor Leste di ASEAN sesuai dan memenuhi aturan Piagam ASEAN Bab I Pasal 1 Ayat 2, 6, dan 11). Ketiga, Timor Leste mampu dan berpartisipasi secara aktif dan positif dalam memelihara Demokrasi dan HAM di kawasan Asia Tenggara (di sini posisi tawar keanggotaan Timor Leste di ASEAN sesuai dan memenuhi aturan Piagam ASEAN Bab I Pasal 1 Ayat 4 dan 7).

PRAKATA

Segala puji syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala berkah dan nikmat-Nya yang begitu melimpah sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul **“Posisi Tawar Timor Leste Untuk Memperoleh Status Keanggotaan Penuh Di ASEAN”** dengan baik.

Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Almamater Universitas Jember (UNEJ), khususnya Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP), Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
2. Drs. Bagus Sigit Sunarko, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang sangat berkontribusi besar membimbing dan mendukung peneliti selama penggarapan skripsi baik secara teknis maupun moril.
3. Drs. Supriyadi, M.Si, Drs. Djoko Susilo, M.Si, dan Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si selaku Dosen Penguji, yang telah menguji skripsi peneliti dengan profesional, kondusif, serta mampu membantu perbaikan skripsi peneliti dengan segala koreksi serta masukan yang membangun.
4. Suyani Indriastuti, S.Sos, M.Si selaku Dosen Wali/Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang selalu memberikan saran, arahan, serta motivasi terkait berbagai permasalahan akademik yang dihadapi peneliti.
5. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional serta seluruh Dosen dari jurusan/program studi dan fakultas lain di UNEJ, yang telah banyak membimbing, membagi, dan mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga

mampumemperkaya khazanah pengetahuan serta mengembangkan kualitas kepribadian peneliti ke arah yang lebih baik.

6. Bapak, Ibu, dan adik kandung tercinta yang senantiasa menyayangi dan mendukung peneliti.
7. Seluruh mahasiswa/i FISIP-UNEJ, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional (HI), khususnya mahasiswa/i HI Angkatan 2010, yang telah menjadi kawan-kawanseperjuangan peneliti selama menuntut ilmu HI di FISIP-UNEJ.
8. UKMF PSM UNEJ, UKM PSM UJ (PSM Pusat), HIMAHI FISIP-UNEJ (Periode Kepengurusan 2011-2012), yang telah menjadi wadah serta media ekspresi dan aktualisasi diri dalam menyalurkan dan mengembangkan hobi serta *multi-skill* peneliti di luar bangku formalitas kuliah.
9. Serta semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu peneliti menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya peneliti berharap semoga karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini mampu bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, April 2014

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	7
1.2.1 Batasan Materi	7
1.2.2 Batasan Waktu	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Landasan Konseptual	9
1.5.1 Piagam ASEAN	9
1.5.2 Diplomasi	13
1.5.2.1 Diplomasi Terbuka	15

1.5.2.2 Diplomasi Ekonomi.....	16
1.5.2.3 Diplomasi Politik.....	17
1.6 Argumen Utama.....	19
1.7 Metode Penelitian	20
1.7.1 Metode Pengumpulan Data	21
1.7.2 Metode Analisis Data	21
1.8 Sistematika Penulisan.....	22
BAB 2. POSISI TIMOR LESTE DALAM DINAMIKA	
PERKEMBANGAN ASEAN.....	24
2.1 Isu Seputar Perluasan ASEAN.....	24
2.2 Keinginan Timor Leste Untuk Menjadi Anggota Penuh	
ASEAN.....	28
2.2.1 Kondisi Domestik Timor Leste.....	29
2.2.1.1 Kondisi Fisik (Geografi Timor Leste).....	29
2.2.1.2 Kondisi Demografi dan Sosial.....	31
2.2.1.3 Politik dan Pemerintahan Nasional.....	33
2.2.1.4 Kondisi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.....	38
2.2.2 Politik Luar Negeri Timor Leste Terhadap ASEAN.....	43
BAB 3. UPAYA DIPLOMASI TIMOR LESTE UNTUK	
MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH	
DI ASEAN.....	50
3.1 Diplomasi Terbuka Timor Leste Untuk	
Memperoleh Status Keanggotaan Penuh Di ASEAN.....	52
3.1.1 <i>ASEAN Ministerial Meeting</i> (AMM) ke-39 dan	
Status <i>Observer</i> bagi Timor Leste (“Gerbang	
Awal” Upaya Diplomasi Timor Leste Di ASEAN).....	57
3.1.2 Keikutsertaan Timor Leste dalam <i>ASEAN Regional</i>	
<i>Forum</i> (ARF).....	59

3.1.3	Aksesi Timor Leste dalam <i>Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia</i> (TAC).....	61
3.1.4	Pembukaan Kedutaan (Perwakilan) Timor Leste Di Negara-Negara Anggota ASEAN Dan Sekretariat ASEAN Di Timor Leste.....	62
3.1.5	Pengajuan Aplikasi Formal Status Keanggotaan Penuh Di ASEAN Oleh Timor Leste.....	64
3.1.6	Hubungan Diplomatik Timor Leste Dengan Negara-Negara Anggota ASEAN.....	66
3.1.6.1	Hubungan Timor Leste-Indonesia.....	66
3.1.6.2	Hubungan Timor Leste-Thailand.....	69
3.1.6.3	Hubungan Timor Leste-Filipina	72
3.1.6.4	Hubungan Timor Leste-Kamboja.....	75
3.1.6.5	Hubungan Timor Leste-Vietnam.....	80
3.1.6.6	Hubungan Timor Leste-Malaysia.....	83
3.1.6.7	Hubungan Timor Leste-Brunei Darussalam.....	85
3.1.6.8	Hubungan Timor Leste-Myanmar.....	86
3.1.6.9	Hubungan Timor Leste-Laos.....	89
3.1.6.10	Hubungan Timor Leste-Singapura.....	90
3.2	Diplomasi Ekonomi Timor Leste Untuk Memperoleh Status Keanggotaan Penuh ASEAN.....	95
BAB 4.	POSISI TAWAR TIMOR LESTE UNTUK MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI ASEAN.....	109
4.1	Peran Penting Timor Leste dalam Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan Asia Tenggara.....	114
4.1.1	Permasalahan Stabilitas Politik dan Keamanan Domestik Timor Leste.....	115

4.1.2. Potensi Ancaman Beberapa Negara (Non-ASEAN) Yang Berafiliasi Dengan Timor Leste.....	120
4.2 Peran Penting Timor Leste dalam Meningkatkan Kerjasama Regional dan Pembangunan Kapasitas (<i>Capacity Building</i>) di Kawasan Asia Tenggara.....	127
4.2.1 Implikasi Pembangunan Kapasitas Timor Leste.....	134
4.3 Peran Penting Timor Leste dalam Memelihara Demokrasi dan HAM Di Kawasan Asia Tenggara.....	139
BAB 5. KESIMPULAN.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....	155
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Rekapitulasi Hubungan Diplomatik Timor Leste Dengan Negara-Negara Anggota ASEAN.....	92
Tabel 3.2Daftar Investasi Luar Negeri di Timor Leste.....	100
Tabel 3.3 Rekapitulasi Upaya Diplomasi Ekonomi Timor Leste Untuk Memperoleh Status Keanggotaan Penuh Di ASEAN.....	107

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 “Peta Timor Leste (<i>East Timor</i>)”.....	29
Gambar 4.1 Grafik Indeks Pembangunan Manusia di Timor Leste 2000-2012.....	136
Gambar4.2 Grafik Partisipasi Perempuan dalam Parlemen Nasional, Asia dan Pasifik, 2012.....	142
Gambar 4.3 Grafik Pangsa Kaum Perempuan dalam Posisi (Jabatan) Menteri Asia dan Pasifik, 2012.....	144

DAFTAR LAMPIRAN

1. Naskah *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN).^{*)}
2. Naskah Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste (*Constitution Of The Democratic Republic Of Timor-Leste*), versi Bahasa Inggris.^{**)}

^{*)}Kemlu RI, *ASEAN-Charter*, <http://kemlu.go.id/Documents/ASEAN-Charter.pdf>. [Diakses pada tanggal 20 November 2013].

^{**)}WIPO (*World Intellectual Property Organization*). 2002. “*Timor-Leste: Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste*”. http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=196269. [Diakses pada tanggal 19 Oktober 2013].

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Momentum jajak pendapat yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan badan *ad hoc* (badan khusus) PBB yakni *United Nations Mission in East Timor* (UNAMET) telah menunjukkan hasil bahwa Timor-Timur (*East Timor*) yang sekian lama berada di bawah integrasi kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai provinsi yang ke 27 akhirnya berhak keluar atau lepas dari wilayah kekuasaan NKRI. Eks-provinsi NKRI tersebut lantas mendirikan negara sendiri dengan nama *Republica Democratica de Timor Leste* (dikenal dengan sebutan negara Timor Leste) yang resmi menyelenggarakan pemerintahannya sejak 20 Mei 2002 paska penyerahan kedaulatan penuh oleh badan *ad hoc* PBB yang menangani pemerintahan transisi Timor Leste tersebut yaitu *UNTAET (United Nation Transition in East Timor)*.¹

Negara yang telah memperoleh pengakuan secara internasional (*de jure*) ini masih berumur satu dekade berdiri sebagai negara bangsa yang relatif baru dan sejak awal memiliki kebutuhan untuk membangun interaksi, kedekatan berikut ikatan seperti hubungan atau kerjasama baik bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain mulai dari negara tetangga sampai dengan negara-negara di seluruh dunia. Interaksi dalam kancah pergaulan internasional tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan nasional Timor Leste seperti memajukan pembangunan dalam negeri yang masih sarat akan tantangan multiaspek dari dalam maupun luar negeri serta menghadapi berbagai ancaman global. Timor Leste berupaya mengamankan negaranya terutama dengan mendahulukan pembangunan hubungan kerjasama

¹Disadur Dari *Paper* Karya Alarico Da Costa Ximenes (Staf Pengajar Jurusan Ilmu Politik , Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Nasional Timor Lorosa'e Seja, Dili, Timor-Leste), *Kepentingan Dan Diplomasi Timor Leste Di ASEAN*, http://www.tlstudies.org/pdfs/tlsa%20conf%202011/chp_54.pdf, 2011. [Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2013].

dengan negara-negara tetangga, yakni dalam satu kawasan regional Asia Tenggara yang telah lama eksis terhimpun dalam organisasi regional bernama *Association of South East Asian Nations* (ASEAN).

Kerjasama antarnegara dalam ASEAN yang semakin solid dan dinamis, serta stabilitas pertumbuhan ekonomi dan perdamaian, baik pada tataran regional ASEAN maupun internasional telah dicermati oleh Timor Leste. Menyadari perkembangan positif ASEAN tersebut, Timor Leste menjadikan ASEAN sebagai masa depan Timor Leste, yaitu bergabungnya Timor Leste menjadi anggota tetap ASEAN (memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN). Ide untuk bergabung dalam ASEAN tersebut juga merupakan kepanjangan gagasan dan keputusan politik dari tokoh-tokoh politik penting di negara tersebut yaitu Xanana Gusmão, Dr. Ramos Horta, dan Dr. Mari Alkatiri.²

Negara yang dulunya merupakan eks-provinsi Indonesia ke-27 ini melakukan pendekatan awal ke ASEAN sejak tahun 2002 untuk beradaptasi, mensinergikan dan berupaya mengintegrasikan negaranya dalam beberapa agenda dan kegiatan ASEAN dengan memperoleh status sebagai pengamat (observer). Inisiatif Timor Leste untuk bergabung dalam ASEAN dan memperoleh status sebagai observer sempat ditentang oleh Myanmar sebagai negara anggota ASEAN karena sikap pemerintah Timor Leste mendukung pejuang pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi. Sementara beberapa negara lain seperti Filipina, Thailand, dan Indonesia bersikap sebaliknya, yakni menyambut dan mendukung sepenuhnya Timor Leste bergabung dalam ASEAN.³ Terlepas dari kontroversi bergabungnya Timor Leste dalam ASEAN, Timor Leste tetap terus berusaha mempersiapkan sumberdaya yang mapan guna mengisi pos-pos yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam organisasi ASEAN.

Proses ini terus bergulir, hingga pada tahun 2005 Timor Leste telah berhasil bergabung dengan *ASEAN Regional Forum* (ARF)⁴ dan pada tahun 2007 Timor Leste

²*Ibid.*, Hasil wawancara Alarico Da Costa Ximenes dengan Mr. Roberto Soares, pada tanggal 10 september 2008.

³*Ibid.*, dalam Baker, M. (2002). *Burma Obstructs East Timor's push for ASEAN membership*. The Age Melbourne.

⁴AFP (Agence France Presse), "East Timor Needs Five Years to Join ASEAN: PM", www.aseansec.org/afp/154.htm, 2006-07-27, accessed on 2008-12-22

menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC)⁵ yang menunjukkan perkembangan signifikan integrasi Timor Leste dalam koridor kerjasama regional ASEAN sekaligus menjadi pijakan hubungan kerjasama bilateral-multilateral Timor Leste dengan negara-negara anggota ASEAN maupun dengan berbagai aktor yang berafiliasi dengan ASEAN. Sejak saat itu, Timor Leste telah memiliki hubungan diplomatik dengan 10 negara ASEAN dan telah membuka kantor perwakilan atau Kedutaan Besar (Kedubes) di Jakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), Manila (Filipina), dan Bangkok (Thailand).

Kedubes Timor Leste di Bangkok merangkap perwakilan resmi Timor Leste untuk menjalin hubungan dengan Kamboja dan Laos, sedangkan Kedubes Timor Leste di Kuala Lumpur merangkap perwakilan resmi Timor Leste untuk menjalin hubungan dengan Myanmar dan Vietnam. Pada perkembangan berikutnya, Timor Leste membuka Sekretariat nasional ASEAN di ibu kota negara Timor Leste yaitu Dili, pada tahun 2009.⁶ Timor Leste semakin intens menghadiri sejumlah pertemuan ASEAN untuk melengkapi kesiapan dan membangun kapasitasnya untuk bergabung menjadi negara anggota resmi ASEAN. Upaya Timor Leste untuk tujuan memasuki keanggotaan penuh ASEAN pada tataran yang lebih serius atau komprehensif yakni ditandai dengan pengajuan aplikasi status keanggotaan penuh secara formal kepada ASEAN pada tanggal 4 Maret 2011.⁷

ASEAN memiliki ketentuan ihwal penerimaan anggota dengan status keanggotaan penuh di ASEAN, yakni berpedoman pada Piagam ASEAN Pasal 6 Ayat 2 Poin (a) dan (b), yang memaparkan ihwal kriteria penerimaan anggota baru ASEAN, sebagai berikut:⁸

⁵*International Herald Tribune-France*, "East Timor Sign Nonaggression Pact With ASEAN", <http://international.nytimes.com/>, 12 Januari 2007. [Diakses pada tanggal 9 Oktober 2013].

⁶Julio Gil da Silva Guterres, B.A., (*Director of Center for Investigative Journalists of Timor Lest- CJITL*), "ASEAN Tanpa Timor Leste = Negara Tanpa KEDAULATAN", <http://thepresidentpostindonesia.com/2012/12/03/asean-tanpa-timor-leste-negara-tanpa-kedaulatan/>, Dec 3, 2012. [Diakses pada tanggal 15 Oktober 2013].

⁷Kate McGeown (*BBC-UK*), "East Timor applies to join Asean", <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12644608>, 4 March 2011. [Diakses pada tanggal 9 Oktober 2013].

⁸Dikutip dari *website* resmi Kemlu RI, *ASEAN-Charter*, <http://kemlu.go.id/Documents/ASEAN-Charter.pdf>. [Diakses pada tanggal 20 November 2013].

**“ARTICLE 6
ADMISSION OF NEW MEMBERS**

.....

2. Admission shall be based on the following criteria:

(a) location in the recognised geographical region of Southeast Asia;

(b) recognition by all ASEAN Member States;.....”

Berdasarkan Piagam ASEAN Pasal 6 di atas bahwa penerimaan anggota baru dalam ASEAN didasarkan pada suatu kriteria, pertama, lokasi negara pelamar keanggotaan ASEAN tersebut harus berada di kawasan Asia Tenggara, kedua, penerimaan anggota baru harus mendapat pengakuan atau persetujuan dari konsensus seluruh negara anggota ASEAN. Paska pengajuan formal Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN, negara-negara anggota ASEAN masih mempelajari dan terus membicarakan permohonan tersebut pada pertemuan-pertemuan antarnegara anggota ASEAN. Perundingan antarnegara anggota ASEAN ini sangat penting kerana penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus di antara negara anggota oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Sampai saat ini permohonan Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN belum memperoleh konsensus dari seluruh negara anggota ASEAN.

Singapura sebagai salah satu negara anggota tertua di ASEAN, berpandangan agar negara-negara anggota ASEAN lainnya tidak terburu-buru menerima keanggotaan Timor Leste secara penuh di ASEAN. Singapura beranggapan bahwa Timor Leste belum siap menyerap tantangan dan kompleksitas di seputar ASEAN, terlebih untuk mengikuti upaya ASEAN dalam program pembentukan *ASEAN Community 2015*. Singapura berkeyakinan bahwa menambah negara miskin dalam keanggotaan ASEAN pada saat ini (menyinggung Timor Leste) justru akan berpotensi memperlambat upaya pencapaian *ASEAN Economic Community 2015*, di mana ASEAN sendiri masih memprioritaskan upaya akselerasi pembangunan ekonomi bagi negara-negara anggota ASEAN yang masih kurang mapan secara ekonomi-sosial di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar.

ASEAN meragukan kelayakan Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN karena dinilai masih belum mampu mengatasi permasalahan ekonomi. Sampai saat ini pemerintah Timor Leste masih mengandalkan bantuan dari negara donor sebagai solusi menopang pembangunan; dominasi pendapatan nasional Timor Leste dari sektor minyak dan gas (migas), sedangkan sumber pendapatan negara lainnya relatif kecil dan tidak mempunyai peran sebagai sumber pembiayaan pembangunan; investasi di Timor-Leste belum menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi rakyat Timor-Leste;⁹ kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang besar, mengingat Timor-Leste masih mengalami banyak kelemahan dalam infrastruktur transportasi.¹⁰

Kedua, permasalahan stabilitas keamanan domestik Timor Leste. Konflik horizontal dan krisis politik antara elit yang berkuasa (Xanana Gusmao, *founding father* Timor Leste) dengan Partai Politik (Parpol) berpengaruh di timor Leste (Fretilin) diikuti perseteruan para pendukung masing-masing yang berujung pada anakisme, terjadi pada tahun 2006. Instabilitas politik dan keamanan domestik ini lanjut menimbulkan instabilitas ekonomi sampai paska krisis.

Timor Leste sejak awal memutuskan bergabung menjadi negara anggota ASEAN sekaligus mengatasi berbagai tantangan dan hambatan misinya untuk bergabung hingga memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN, semuanya dilakukan melalui sarana diplomasi. Strategi diplomasi yang diciptakan Timor Leste yaitu pertama, diplomasi "*halo amigo ba ema hotu no la halo inimigu ba ema ida*" atau dalam bahasa Indonesia artinya "*membuat persahabatan dengan semua orang dan tidak memusuhi siapapun*". Kedua, strategi diplomasi "pragmatis" yang artinya bahwa negara Timor Leste membuka diri kepada semua negara dan tidak memandang pada sejarah masa lalu yang kurang menyenangkan melainkan Timor Leste lebih

⁹Alarico Da Costa Ximenes, *Op.Cit.*, *Direcção Nacional de Estatística dalam Kepentingan Dan Diplomasi Timor Leste Di ASEAN*, hlm. 374.

¹⁰Sonny Harry B. Harmadi (Kepala Lembaga Demografi FEUI), *Timor-Leste menatap masa depan*, http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2012/03/120316_timor_analysis.shtml, 16 Maret 2012 - 23:37 WIB. [Diakses pada tanggal 9 Oktober 2013].

memandang ke depan bagaimana bisa mendapatkan dukungan negara-negara kawasan regional baik di bidang politik keamanan dan ekonomi sebagai jaminan untuk pengembangan pembangunan di Timor Leste.

Pada tataran praktis, salah satu strategi diplomasi Timor Leste tercermin ketika melakukan pendekatan dengan Indonesia untuk meraup dukungan agar Timor Leste diterima menjadi negara anggota ASEAN dengan mengesampingkan dan merekonsiliasi “luka lama” hubungan kedua negara pada masa disintegrasi Timor Leste dari negara Indonesia dan berbagai isu pelanggaran HAM terkait. Hal yang sama juga dilakukan Timor Leste terhadap negara-negara anggota ASEAN lainnya dengan menjalin serta mengkonsolidasi kemitraan hangat dan hubungan kooperatif, melakukan sekian kunjungan diplomatik dan negosiasi kerjasama di segala bidang dalam lingkup regional ASEAN.

Sampai saat ini Timor Leste masih berstatus sebagai observer di ASEAN. Keputusan untuk menetapkan status keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN lebih lanjut masih dikaji oleh ASEAN melalui *ASEAN Coordinating Council (ACC)* dan *ACC Working Group (ACCWG)* yang terus mengkaji dan mengevaluasi kelayakan Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN. Maka, Timor Leste selama lebih dari satu dekade ini masih menunggu konsensus negara-negara anggota ASEAN perihal penerimaan status keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN, sembari Timor Leste terus melakukan segala upaya diplomatisnya untuk meyakinkan tiap negara anggota ASEAN hingga mencapai konsensus untuk menerima Timor Leste menjadi anggota dengan status penuh di ASEAN.

Demikian, setelah mengetahui adanya isu Timor Leste sebagai negara termuda di region Asia Tenggara yang berkeinginan dan berupaya untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN selama lebih dari satu dekade ini, maka peneliti memutuskan untuk mengkaji fenomena tersebut dalam suatu karya ilmiah dengan judul:

“Posisi Tawar Timor Leste Untuk Memperoleh Status Keanggotaan Penuh Di ASEAN”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah, ruang lingkup pembahasan memiliki kedudukan yang penting sebab mengarahkan tulisan karya ilmiah tersebut agar lebih fokus serta analisis berjalan dan berkembang ke arah sasaran penelitian yang tepat dan tidak keluar dari kerangka permasalahan penelitian yang telah ditentukan. Ruang lingkup pembahasan terdiri dari dua batasan yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi berfungsi untuk menunjukkan ruang pembahasan suatu peristiwa atau objek yang dianalisis yang mencakup ruang lingkup wilayah, gejala-gejala yang muncul dari permasalahan serta batas-batas analisis dari suatu karya ilmiah. Dalam penelitian ilmiah ini, batasan materi yang akan digunakan yakni mengidentifikasi, memaparkan, menganalisis dan mengkritisi bagaimana posisi tawar Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu perlu digunakan untuk memfokuskan waktu (masa) dari permasalahan yang diteliti dan dianalisis agar tidak melenceng atau keluar dari batasan materi yang telah ditetapkan. Penulis akan memilih batasan waktu mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013. Tahun 2002 merupakan tahun di mana Timor Leste mulai mendeklarasikan maksud dan tujuannya untuk bergabung dan menjadi negara anggota ASEAN yang masih berjalan hingga tahun 2013.

Meskipun penulis telah menetapkan batasan waktu dari objek penelitian karya ilmiah (skripsi) ini, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis jika menemukan dan mencatatkan beberapa data atau peristiwa faktual pada waktu-waktu tertentu di

luar batasan waktu yang telah ditetapkan guna mendukung argumen dalam pembahasan dan analisis karya ilmiah ini.

1.3 Rumusan Masalah

Suatu karya ilmiah harus mampu memaparkan pokok atau inti permasalahan atau rumusan masalah dari objek penelitian yang dikerjakan dan menjadi hal fundamental bagi penelitian ilmiah itu sendiri, sebagaimana gagasan Suharsimi Arikunto:¹¹

“Agar penelitian dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka penelitian harus merumuskan masalahnya sehingga jelas darimana harus memulai, ke mana harus pergi dan dengan apa.”

Permasalahan dapat dianalogikan sebagai jiwa penelitian yang menuntut jawaban, sehingga permasalahan tersebut perlu dipecahkan, baik mengenai wawasan atau pengertiannya. Cara ini diharapkan akan menemukan suatu jawaban dari permasalahan yang akan dikaji, sehingga tidak semua kajian dapat disebut sebagai masalah.

Dalam karya ilmiah ini, akan dikaji masalah seputar Posisi tawar Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN atau berintegrasi secara penuh sebagai negara anggota resmi (penuh) di ASEAN. Pemerintah Timor Leste menggunakan sarana diplomasi sejak dahulu ketika mulai mengutarakan maksud dan tujuan Timor Leste untuk bekerjasama dan berintegrasi dalam entitas organisasi regional ASEAN. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana posisi tawar Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN ?

¹¹Dikutip Dari Buku Karya Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Bina Aksara, 1989, Jakarta, Hlm. 7.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana posisi tawar Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN.

1.5 Landasan Konseptual

Suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu. Konsep menjadi suatu kata yang melambangkan suatu gagasan. Fungsi konsep antara lain:¹²

1. Membantu kegiatan pemikiran dan komunikasi hasil pemikiran tersebut;
2. Memperkenalkan suatu sudut pandang;
3. Sebagai sarana untuk mengorganisasikan gagasan, persepsi, dan simbol, yaitu dalam bentuk klasifikasi dan generalisasi;
4. Sebagai “batu-bata” bagi bangunan yang disebut eksplanasi dan prediksi.

Dalam karya ilmiah ini, peneliti memilih Piagam ASEAN dan diplomasi sebagai landasan konseptual untuk menganalisis obyek penelitian dalam karya ilmiah ini. Penulis memilih konsep Piagam ASEAN dan diplomasi setelah melakukan pengamatan terhadap gambaran umum obyek penelitian atau kasus dalam penelitian karya ilmiah ini dan setelah melakukan studi pustaka guna mencari landasan konseptual yang paling relevan sebagai “batu-bata” dalam penelitian karya ilmiah ini (fungsi konsep).

1.5.1 Piagam ASEAN (*The ASEAN Charter*)

Piagam ASEAN merupakan suatu norma atau landasan yang memperkuat kerangka institusional dan legal dari eksistensi ASEAN sebagai organisasi internasional berbasis pada komunitas dan masyarakat (*people- and community-based international organization*) khususnya dalam satu kawasan regional Asia Tenggara. Dengan mengadopsi Piagam ASEAN, kesepuluh negara anggota ASEAN

¹²Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3S, Jakarta, 1990. hlm. 110-113.

mengkodifikasi norma-norma ASEAN yang ada dan memelihara identitas historis ASEAN sebagai organisasi antar-pemerintah.¹³ Piagam ASEAN bertujuan untuk mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki dasar hukum yang kuat (*legal personality*), dengan aturan yang jelas, serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien.

Piagam ASEAN ditandatangani pada KTT ke-13 ASEAN pada tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh 10 kepala negara atau pemerintahan negara anggota ASEAN. Piagam ASEAN mulai berlaku efektif atau *enter into force* pada tanggal 15 Desember 2008, 30 hari setelah diratifikasi oleh 10 negara anggota ASEAN. Isi Piagam ASEAN menegaskan kembali prinsip-prinsip yang tertuang dalam seluruh perjanjian, deklarasi dan kesepakatan ASEAN. Struktur Piagam ASEAN terdiri atas Mukadimah, 13 Bab, dan 55 Pasal, sebagai berikut:¹⁴

- Mukadimah
- Bab I - Tujuan dan Prinsip
- Bab II - Status Hukum
- Bab III - Keanggotaan
- Bab IV - Badan
- Bab V - Entitas yang Berhubungan dengan ASEAN
- Bab VI - Kekebalan dan Hak Istimewa
- Bab VII - Pengambilan Keputusan
- Bab VIII - Penyelesaian Sengketa
- Bab IX - Anggaran dan Keuangan
- Bab X - Administrasi dan Prosedur
- Bab XI - Identitas dan Simbol
- Bab XII - Hubungan Eksternal
- Bab XIII - Ketentuan Umum dan Penutup

Sehubungan dengan penelitian dalam karya ilmiah ini yang mengangkat kasus mengenai posisi tawar Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN, konsep Piagam ASEAN menjadi korelatif sebagai *tool of analysis* untuk menganalisis perihal Posisi tawar Timor Leste memperoleh status keanggotaan penuh

¹³Kemlu RI, *Op. Cit.*, "ASEAN-Charter", <http://kemlu.go.id/Documents/ASEAN-Charter.pdf>.

¹⁴*Ibid.*

di ASEAN. Piagam ASEAN sebagaimana yang secara garis besar dijelaskan sebelumnya merupakan basis legal-institusional ASEAN bagi segenap negara anggota ASEAN termasuk bagi negara-negara yang melakukan akses atau berupaya memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN, sebagaimana negara Timor Leste.

Posisi tawar Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN khususnya dapat dianalisis dari Piagam ASEAN Bab I Pasal 1 yang memaparkan tujuan dan prinsip ASEAN terutama pada delapan tujuan dan prinsip utama ASEAN yang termuat dalam delapan ayat pada Piagam ASEAN Bab I Pasal 1. Pemilihan delapan ayat tersebut yang memuat tujuan dan prinsip ASEAN dianggap paling korelatif untuk digunakan sebagai landasan konseptual atau *tool of analysis* dalam menganalisis permasalahan pada karya ilmiah ini. Delapan ayat utama dalam Piagam ASEAN Bab I Pasal 1 yang dimaksud, terlampir sebagai berikut:¹⁵

**CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN
NATIONS**

**CHAPTER I
PURPOSES AND PRINCIPLES**

**ARTICLE 1
PURPOSES**

The Purposes of ASEAN are:

- 1. To maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace-oriented values in the region;*
- 2. To enhance regional resilience by promoting greater political, security, economic and socio-cultural cooperation;*
- 3. To preserve Southeast Asia as a Nuclear Weapon-Free Zone and free of all other weapons of mass destruction;*
- 4. To ensure that the peoples and Member States of ASEAN live in peace with the world at large in a just, democratic and harmonious environment;*

.....

- 6. To alleviate poverty and narrow the development gap within ASEAN through mutual assistance and cooperation;*

¹⁵ Dikutip dari *website* resmi Kemlu RI, *ASEAN-Charter*, <http://kemlu.go.id/Documents/ASEAN-Charter.pdf>. [Diakses pada tanggal 20 November 2013].

7. To strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and to promote and protect human rights and fundamental freedoms, with due regard the rights and responsibilities of the Member States of ASEAN;

8. To respond effectively, in accordance with the principle of comprehensive security, to all forms of threats, transnational crimes and transboundary challenges;

.....

11. To enhance the well-being and livelihood of the peoples of ASEAN by providing them with equitable access to opportunities for human development, social welfare and justice;

.....

Posisi tawar Timor Leste untuk mampu memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN dapat dianalisis dengan berlandaskan pada kedelapan prinsip dan tujuan utama ASEAN pada Piagam ASEAN tersebut yang dipilih secara selektif dan paling korelatif dengan permasalahan pada karya ilmiah ini, di mana prinsip dan tujuan ASEAN dalam Piagam ASEAN secara keseluruhan berjumlah lima belas. Kemudian, dibuat kerangka analisis dalam mengkaji Posisi tawar Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN yang berlandaskan pada kedelapan tujuan dan prinsip utama ASEAN pada Piagam ASEAN tersebut antara lain membahas:

- a. Peran penting Timor Leste dalam pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara (berpedoman pada Piagam ASEAN Bab I Pasal 1 Ayat 1, 3, dan 8). ;
- b. Peran penting Timor Leste dalam meningkatkan kerjasama regional dan pembangunan kapasitas (*Capacity Building*) di kawasan Asia Tenggara (berpedoman pada Piagam ASEAN Bab I Pasal 1 Ayat 2, 6, dan 11);
- c. Peran penting Timor Leste dalam memelihara demokrasi dan HAM di kawasan Asia Tenggara (berpedoman pada Piagam ASEAN Bab I Pasal 1 Ayat 4 dan 7).

1.5.2 Konsep Diplomasi

R.P. Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antarnegara atau hubungan antarnegara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya.¹⁶ Sementara, K.M. Panikkar dalam bukunya yang berjudul *The Principle and Practice of Diplomacy* menyatakan bahwa diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.¹⁷ Berdasarkan pernyataan kedua tokoh tersebut mengenai definisi diplomasi, dapat dielaborasi bahwa diplomasi merupakan manajemen sekaligus seni selama menjalankan hubungan dengan berbagai aktor lintas batas negara sekaligus memprioritaskan pencapaian kepentingan nasional yang sejauh atau sebisa mungkin dilaksanakan dengan sarana damai.

Segala kepentingan suatu negara terhadap entitas negara lain selalu dapat dilakukan dengan cara diplomasi. Dalam diplomasi, suatu negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor hubungan internasional lainnya berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan, dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, dilakukan secara persuasif melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobbying*, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya.¹⁸

Diplomasi berkaitan erat dengan politik luar negeri suatu negara. Politik luar negeri adalah substansi hubungan luar negeri dan kebijakan luar negeri suatu negara, sedangkan diplomasi adalah metode dan proses di mana hubungan dan kebijakan luar negeri itu dilaksanakan.¹⁹ Suatu tindakan diplomasi tidak dapat dilaksanakan tanpa didukung oleh suatu kebijakan luar negeri. Dalam konteks kasus yang akan dibahas pada karya ilmiah ini, ASEAN merupakan bagian dari politik luar negeri yang sangat diperhitungkan oleh negara Timor Leste sebagai kepentingan nasional. Timor Leste

¹⁶R. P. Barston, *Modern Diplomacy*, Longman, N.Y, 1997, hlm. 1 dalam buku karya Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, cetakan pertama, 2008, hlm. 4.

¹⁷Dikutip dari buku karya S.L. Roy (Penerjemah: Herwanto, Mirsawati), "*Diplomasi*", *Rajawali Press*, Jakarta, 1991, hlm. 3.

¹⁸Sukawarsini Djelantik, *Op. Cit.*, *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*, hlm. 4.

¹⁹*Ibid*, disadur dari pendapat J. R. Childs, hlm. 33.

merasa perlu untuk masuk dan bergabung dalam entitas ASEAN hingga mampu berintegrasi menjadi anggota penuh di ASEAN. Kepentingan Timor Leste untuk bergabung dan menjadi anggota penuh ASEAN berkenaan dengan prinsip jalinan kerjasama dan hubungan luar negeri Timor Leste yang dipertegas dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Demokratis Timor Leste (RDTL) Pasal 8, ayat 2 dan 4 yang dengan jelas menyatakan posisi kebijakan luar negeri Timor Leste. Pasal 8 ayat 2, menerangkan:²⁰

“The Democratic Republic of East Timor shall establish relations of friendship and cooperation with all other peoples, aiming at the peaceful settlement of conflicts, the general, simultaneous and controlled disarmament, the establishment of a system of collective security and establishment of a new international economic order capable of ensuring peace and justice in the relations among peoples”.

Berdasarkan isi Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Demokratis Timor Leste (RDTL) Pasal 8 ayat 2, dinyatakan bahwa Republik Demokratis Timor Leste akan membangun hubungan persahabatan dan kerja sama dengan semua bangsa lain, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai, perlucutan senjata yang umum, serentak dan teratur, penciptaan suatu sistem pengamanan bersama serta penciptaan suatu orde ekonomi internasional yang baru, yang mampu menjamin perdamaian dan keadilan dalam hubungan antarbangsa.

Sementara, Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Demokratis Timor Leste (RDTL) Pasal 8, ayat 4 menyatakan posisi kebijakan luar negeri Timor Leste memprioritaskan pada hubungan kooperatif dengan entitas kawasan yang menaungi Timor Leste, yaitu:²¹

“The Democratic Republic of East Timor shall maintain special ties of friendship and co-operation with its neighbouring countries and the countries of the region”.

Maksud dari UUD Republik Demokratis Timor Leste (RDTL) Pasal 8 ayat 4 tersebut bahwa Timor Leste akan menjalin ikatan persahabatan dan kerja sama

²⁰Dikutip dari website WIPO (World Intellectual Property Organization), “Timor-Leste: Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste”, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=196269, 2002. [Diakses pada tanggal 19 Oktober 2013].

²¹*Ibid.*

khusus dengan negara-negara tetangganya dan negara-negara sekawasan. Negara Timor Leste secara geografis telah jelas terletak di kawasan Asia Tenggara, yaitu berada di pinggir selatan dari kepulauan Indonesia dan barat laut Australia.²²

Dalam merealisasikan kepentingan nasional Timor Leste untuk bergabung hingga memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN, Timor Leste melakukan strategi serta segala upaya yang berorientasi pada diplomasi, yang cenderung berbentuk diplomasi terbuka, diplomasi ekonomi, dan diplomasi politik.

1.5.2.1 Diplomasi Terbuka

Diplomasi terbuka, menurut Harold Nicholson dicetuskan oleh Presiden AS Woodrow Wilson, mengandung 3 gagasan, pertama, harus tidak ada perjanjian rahasia; kedua, negosiasi harus dilakukan secara terbuka; ketiga, apabila suatu perjanjian sudah dicapai, tidak boleh ada usaha di belakang layar untuk mengubah ketetapanannya secara rahasia. Diplomasi terbuka digagas oleh kaum liberal yang meyakini bahwa diplomasi yang dilaksanakan secara terbuka akan lebih membantu pemeliharaan perdamaian dan keharmonisan internasional.²³

Dalam konteks diplomasi terbuka, Timor Leste memiliki strategi diplomasi yang disebut dengan diplomasi “*Halo amigo ba ema hotu-hotu no la halo inimigu ba ema ida*” artinya bersahabat dengan semua orang dan tidak memusuhi siapapun. Timor Leste bebas bekerjasama dengan negara mana saja sesuai kepentingan nasional. Timor-Leste melakukan negosiasi tanpa henti dengan negara anggota ASEAN yang pada masa lalu mempunyai sejarah kurang menyenangkan dengan Timor-Leste untuk melakukan rekonsiliasi.

Teknik dan strategi diplomasi lain dalam memperjuangkan keinginan Timor-Leste untuk menjadi negara anggota ASEAN adalah “diplomasi

²²Disadur dari jurnal karya Ganewati Wuryandari (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-LIPI), “*East Timor’s Membership in ASEAN: Prospects and Challenges*”, www.aseancenter.org.tw/upload/files/OUTLOOK_003_02.pdf, 2011. [Diakses pada tanggal 1 April 2014].

²³S. L. Roy, *Op. Cit.*, “*Diplomasi*”, hlm. 79.

pragmatis” artinya negara Republik Demokratik Timor-Leste “*loke an*” atau “membuka diri” kepada semua negara dan tidak memandang pada sejarah masa lalu melainkan pemerintah Timor-Leste lebih melihat ke depan bagaimana mendapatkan dukungan dari negara kawasan.

Metode yang digunakan pada diplomasi terbuka yaitu deklarasi langsung dan terus terang. Maksud dan tujuan Timor Leste untuk bergabung dan memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN tercantum dalam UUD Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Pasal 8, ayat 2 dan 4 serta tersirat pada pernyataan langsung para pejabat pemerintahan Timor Leste yang secara terbuka dapat diakses pada masyarakat internasional tersebar melalui media massa. Hal ini mendorong kebangkitan pendapat umum seiring dengan perkembangan sistem komunikasi.

Segala macam manuver Timor Leste dalam melancarkan usahanya untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN seperti pernyataan para tokoh Timor Leste, kegiatan kunjungan, kerjasama, pembukaan kedutaan dan perwakilan diplomatik lainnya serta keikutsertaan Timor Leste dalam acara-acara regional ASEAN maupun internasional dapat dipublikasikan luas oleh segala macam media massa dan menjadi perbincangan publik internasional tanpa intervensi pemerintahan Timor Leste. Isu Timor Leste dan ASEAN ini juga telah menjadi bahan kajian dan kritisisme yang meluas di kalangan akademisi dan para profesional serta berbagai lembaga penelitian dunia melalui *paper*, esei, kolom dan opini pada media cetak maupun elektronik yang dapat menjadi *input* pembuatan kebijakan Timor Leste terhadap ASEAN maupun sikap dan kebijakan ASEAN sendiri terhadap Timor Leste.

1.5.2.2 Diplomasi Ekonomi

Sejak awal Timor Leste menyatakan maksud untuk bergabung dalam entitas ASEAN dengan ekspektasi segera diloloskan menjadi negara anggota

ASEAN, ASEAN memutuskan ketetapan bagi Timor Leste dengan status sebagai observer tanpa ketetapan batas waktu yang jelas untuk dapat dinilai kelayakan Timor Leste memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN. ASEAN menimbang kondisi Timor Leste yang masih baru merdeka dan masih kurang secara kapasitas di segala bidang untuk menjadi negara anggota ASEAN terutama pada permasalahan kapasitas ekonomi.

Sejak awal bergabung dalam ASEAN sebagai observer, Timor Leste mulai melancarkan diplomasi ekonomi yang menjurus pada beberapa pilar kegiatan ekonomi²⁴, yaitu promosi perdagangan; promosi peluang investasi, manajemen bantuan internasional.

1.5.2.3 Diplomasi Politik²⁵

Diplomasi dalam konteks hubungan luar negeri seringkali diidentifikasi dengan aspek atau dimensi politik. Aspek politik dari diplomasi tersebut dikaitkan dengan suatu kebijakan negara dalam menghadapi atau menanggapi negara lain ataupun dalam menyikapi suatu isu internasional lainnya. Dimensi politik tersebut ditambah dengan adanya upaya meraih kekuasaan politik (*struggle for power*) di antara negara-negara merupakan faktor utama dari signifikansi diplomasi politik.

Dalam studi kasus upaya Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN, dapat dicermati bahwa studi kasus ini berkorelasi dengan konsep diplomasi politik. Timor Leste merumuskan kebijakannya dalam merespon situasi internasional. Sejak era berdirinya Timor Leste di masa awal Milenium, situasi internasional telah mengalami globalisasi dan multipolarisme. Maka Timor Leste yang merupakan negara ‘muda’ sejak saat itu berupaya beradaptasi dan berkepentingan untuk membangun citra diri di panggung internasional sebagai negara yang

²⁴Sukawarsini Djelantik, *Op. Cit., Diplomasi Antara Teori dan Praktik*, hlm. 230.

²⁵Disadur dari Rumki Basu, “*International Politics: Concept, Theories, And Issues*”, SAGE Publications India Pvt Ltd., 2012, hlm. 77-78.

kooperatif, menjunjung perdamaian, demokrasi, HAM dan hal-hal lain yang simpatik dan *acceptable* (mampu diterima) di dunia internasional yang notabene berada pada atmosfer globalisasi dan multipolarisme. Upaya dan kepentingan Timor Leste tersebut mengarah pada diplomasi politik yang bertujuan untuk membangun posisi tawar Timor Leste yang positif dalam kontestasi internasional. Hal ini telah menjadi kebijakan Timor Leste yang termaktub dalam Konstitusi RDTL pasal 8 ayat 2.

Kebijakan Timor Leste dalam menyikapi situasi internasional lantas terdapat prioritas yakni menyikapi situasi kawasan ‘terdekat’ yang mengitari Timor Leste yaitu Asia Tenggara. Kebijakan Timor Leste tersebut tercantum dalam Konstitusi RDTL pasal 8 ayat 4 yang pada intinya menyatakan atensi (konsen) Timor Leste terhadap negara-negara sekawasan (Asia Tenggara) yang berorientasi pada integrasi dalam entitas kawasan tersebut yang notabene terhimpun dalam asosiasi regional Asia Tenggara bernama ASEAN.

Elemen kekuatan politik tetap menjadi landasan dari diplomasi, khususnya dalam diplomasi politik. Sebab setiap negara memiliki tendensi untuk eksis lebih kuat secara politik di antara negara-negara lainnya. Agenda politik dari suatu negara merefleksikan berbagai kepentingan seperti perihal militer, politik, dan sebagainya. Terkadang, suatu agenda atau kepentingan negara dikemas dengan baik secara politis oleh diplomat, namun pada tataran praktisnya diimplementasikan oleh lembaga atau badan pemerintahan (negara).

Agenda Timor Leste untuk berintegrasi dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara begitupun ASEAN yang terlebih termaktub dalam Konstitusi RDTL merefleksikan kepentingan nasional Timor Leste untuk membangun posisi tawar di kawasan Asia Tenggara dan ASEAN sebagai elemen kekuatan politik yang berusaha dibangun dan dikembangkan Timor Leste untuk mampu sejajar atau bahkan melebihi negara-negara sekawasan

hingga level dunia. Kepentingan Timor Leste untuk membangun posisi tawar yang tinggi dalam tujuan memperoleh status keanggotaan ASEAN ini berkaitan erat dengan peranan para pemimpin politik serta diplomat Timor Leste dalam mengupayakan pencapaian kepentingan negara tersebut.

Para pemimpin politik dan diplomat Timor Leste melakukan serangkaian upaya yang bertendensi pada diplomasi politik selama mengupayakan posisi tawar Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN. Secara persuasif dan *non-violence*, mereka mengemas dan mensosialisasikan keinginan serta upaya *capacity building* Timor Leste untuk menjadi negara anggota penuh ASEAN melalui pernyataan maupun orasi yang diliput dan dipublikasikan media internasional; melalui partisipasi aktif di sekian forum regional dan internasional; melalui dialog dan negosiasi dengan petinggi maupun tokoh-tokoh penting dari negara-negara anggota ASEAN (untuk meraih dukungan dan bantuan guna melancarkan upaya Timor Leste menjadi negara anggota penuh di ASEAN).

Upaya diplomasi politik oleh para pemimpin politik dan diplomat Timor Leste seperti yang dipaparkan di atas berkorelasi dengan konsep diplomasi politik yang mengatur para aktor global untuk memfokuskan permasalahan melalui dialog dan negosiasi. Hal ini mendorong negara untuk mengadopsi teknik penyelesaian perkara melalui segala cara tanpa menggunakan kekerasan (*non-violence*). Maka diplomasi politik berkontribusi terhadap penciptaan dan pemeliharaan stabilitas perdamaian di dunia. Diplomasi politik mampu menggiring dan meningkatkan kesediaan, keyakinan antarnegara dalam suatu dialog, bukan konflik ataupun perang.

1.6 Argumen Utama

Dengan mengacu pada permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mencoba merumuskan argumen utama sebagai berikut:

Posisi tawar Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN melalui diplomasi dapat diperkirakan positif untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN. Sebab berpedoman pada Piagam ASEAN, pertama, eksistensi Timor Leste dapat menjadi bahan pertimbangan (diperhitungkan) ASEAN terkait penjagaan stabilitas keamanan dan perdamaian regional Asia Tenggara; kedua, Timor Leste konsisten melakukan upaya diplomasi dan berbagai *capacity building* yang menunjukkan progres dari upaya Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN; ketiga, Timor Leste cukup vokal menjunjung demokrasi dan HAM di kawasan Asia Tenggara.

1.7 Metode Penelitian

Metode Penelitian berfungsi sebagai kerangka berpikir dan sejumlah data yang diperlukan bertujuan agar suatu karya ilmiah menjadi sistematis. Sehingga semua pihak yang hendak membaca dan mengkaji karya ilmiah tersebut menjadi jelas dan percaya akan validitas karya ilmiah tersebut. Menurut pendapat Liang Gie, bahwa metode adalah:²⁶

“Cara atau langkah berulang-ulang sehingga menjadi pola yang menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya ini merupakan langkah-langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada ujung akhirnya merupakan langkah untuk memeriksa kebenaran dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat mengenai suatu gejala tersebut.”

Berdasarkan definisi di atas, metode merupakan suatu kerangka dalam penelitian ilmiah yang dimulai dari proses pengumpulan data sampai dengan analisis data sesuai tujuan penelitian yang ingin dicapai serta dilandasi dengan evaluasi tentang akurasi dan validitas data serta fakta yang disajikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data dan metode analisa data.

²⁶Dikutip Dari Buku Karya The Liang Gie, *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Dan Metodologi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1984, Hlm. 81

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian untuk pembuatan karya ilmiah ini, peneliti melakukan penelaahan secara sistematis terhadap informasi tertulis seperti pada buku-buku cetak, surat kabar, majalah, jurnal, artikel, buletin, dan berbagai informasi yang ada di internet. Dengan kata lain, metode pengumpulan data yang digunakan penulis di sini merupakan metode dan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Dengan tetap memperhatikan kaidah penulisan karya ilmiah, penulis mengumpulkan dan memperoleh sumber-sumber data penelitian dari:

1. Perpustakaan Pusat/Induk Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP (Ruang Baca FISIP) Universitas Jember
3. Perpustakaan Pusat/Induk Universitas Gadjah Mada (UGM)
4. Media cetak dan elektronik
5. Bahan pustaka koleksi pribadi

1.7.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode analisis deskriptif-kualitatif dan prediktif (berpedoman pada referensi dan data-data faktual dan kredibel). Metode kualitatif ini akan digunakan untuk melakukan analisis secara lebih mendalam terhadap fenomena-fenomena yang dikaji.²⁷ Analisis data secara umum dapat berarti prosedur memilah dan mengelompokkan data yang sejenis berdasarkan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ilmiah ini, peneliti menganalisis sikap, pandangan, ideologi, tindakan berbagai subyek dan kondisi yang tercermin dalam berbagai bentuk publikasi, baik cetak maupun elektronik sebagai data pendukung penelitian kualitatif. Berdasarkan analisis data itulah kemudian kesimpulan dalam proses menjawab permasalahan dilakukan.

²⁷Disadur Dari Buku Karya Lexy J. Moloeng, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, hlm. 2.

1.8 Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini terdiri dari 5 bab. Pada bab 1 akan diuraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan konseptual, argumen utama, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab 2 akan diuraikan tentang posisi Timor Leste dalam dinamika perkembangan ASEAN dengan beberapa sub bab. Sub bab pertama memaparkan isu seputar perluasan ASEAN, lalu sub bab kedua memaparkan keinginan Timor Leste untuk menjadi anggota penuh ASEAN. Pada sub bab kedua terdapat dua sub-sub bab yang memberikan eksplanasi tentang kondisi domestik Timor Leste dan politik luar negeri Timor Leste terhadap ASEAN.

Pada bab 3 akan diuraikan tentang upaya diplomasi Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN yang ditopang oleh eksplanasi dari dua sub bab. Sub bab pertama yaitu diplomasi terbuka Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN, yang dijabarkan lagi melalui enam sub-sub bab yaitu penjelasan mengenai *ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-39* dan status observer bagi Timor Leste; keikutsertaan Timor Leste dalam *ASEAN Regional Forum (ARF)*; aksesi Timor Leste dalam *treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*; pembukaan kedutaan (perwakilan) Timor Leste di negara-negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN di Timor Leste; pengajuan aplikasi formal status keanggotaan penuh di ASEAN oleh Timor Leste; serta hubungan diplomatik Timor Leste dengan negara-negara anggota ASEAN. Adapun terdapat sub bab kedua yaitu eksplanasi mengenai diplomasi ekonomi Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN. Praktik diplomasi ekonomi Timor Leste di sini ditujukan untuk kepentingan *capacity building* (pembangunan kapasitas) Timor Leste antara lain dalam bentuk perdagangan (ekspor-impor) dengan negara-negara anggota ASEAN; upaya Timor Leste untuk kerjasama investasi asing untuk mengundang aktivitas investasi asing di Timor Leste guna menstimulus transfer ilmu pengetahuan

dan teknologi (iptek) dari negara-negara *partner* kerjasama Timor Leste di Asia Tenggara; serta manajemen bantuan internasional dari negara-negara se-kawasan Timor Leste guna menunjang pembangunan kapasitas Timor Leste secara kokoh dan berkelanjutan.

Pada bab 4 akan memuat pemaparan posisi tawar Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN, berbasis pada konsep Piagam ASEAN. Kerangka pemaparan pada bab 4 ini nantinya akan membahas seputar peran penting Timor Leste dalam pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara; peran penting Timor Leste dalam meningkatkan kerjasama regional dan pembangunan kapasitas (*capacity building*) di kawasan Asia Tenggara; serta peran penting Timor Leste dalam memelihara demokrasi dan HAM di kawasan Asia Tenggara.

Kemudian pada bab 5 akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan hasil analisis dari pembahasan penulisan pada bab-bab sebelumnya.

BAB 2. POSISI TIMOR LESTE DALAM DINAMIKA PERKEMBANGAN ASEAN

2.1 Isu Seputar Perluasan ASEAN

Pada pertengahan tahun 1966, ketika ASEAN masih dalam proses pembentukan secara institusional, Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia pada saat itu, yakni Ismail Abdul Rahman menyatakan bahwa ASEAN dibentuk untuk mewujudkan asosiasi regional (Asia Tenggara) yang terdiri dari Thailand, Burma (Myanmar), Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos, dan Vietnam, serta menyatukan segenap bangsa dan negara di Asia Tenggara dengan beragam etnik, budaya, dan akar religi.

Namun setelah ASEAN resmi terbentuk paska Deklarasi Bangkok 1967, asosiasi ini menjalani agenda yang cenderung lebih bersifat subregional, dibandingkan regional. Hanya terdiri dari lima negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota (penuh) ASEAN yang sekaligus merupakan negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Kelima negara tersebut mengharapkan roda aktivitas ASEAN yang lebih besar dan representatif untuk seluruh bangsa dan negara Asia Tenggara di tengah bipolarisme kekuatan dunia saat itu yang cukup mempengaruhi dinamika kehidupan bangsa-bangsa di Asia Tenggara sebagai obyek kontestasi kekuasaan bipolar antara Timur dan Barat, sehingga mengurungkan ekspektasi ASEAN untuk mengintegrasikan bangsa-bangsa di Asia Tenggara secara solid dan menyeluruh.²⁸

Pada tahun 1984, Brunei Darussalam hadir sebagai *single country* di Asia Tenggara yang cukup *survive* di tengah situasi Perang Dingin, bergabung dan

²⁸Disadur dari jurnal ilmiah karya Vyacheslav Urlyapov Ph.D. (Hist.) - *Senior research fellow at the Center for Southeast Asia, Australia, and Oceania Studies, RAS Institute of Oriental Studies*, "ASEAN Enlargement: Motives, Significance, Consequences", http://interaffairs.ru/i/pdf_asean/13.pdf, 2010, hlm. 109-110. [Diakses pada tanggal 29 November 2013].

diterima menjadi anggota ASEAN. Keanggotaan asosiasi regional Asia Tenggara ini bertambah menjadi enam negara sampai era perang dingin berakhir pada dekade 90an. Paska era bipolarisme kekuasaan dunia tersebut berakhir, negara-negara di Asia Tenggara non ASEAN yang mulai surut dari aktivitas perang dingin Blok Barat maupun Blok Timur, mulai mempertimbangkan kepentingan dan peluang keanggotaan di ASEAN. Asosiasi regional Asia Tenggara tersebut menyikapi situasi ini secara positif berpijak pada pemenuhan tujuan dan ekspektasi ASEAN sejak awal yang ingin “merangkul rata” seluruh bangsa dan negara Asia Tenggara dalam keanggotaan dan segala roda aktivitas ASEAN menjadi kesatuan regional yang penuh (*full regional unity*).

Fenomena ini yang disebut dengan “perluasan ASEAN” (*ASEAN Enlargement*), yaitu terjadi proses akses dan diterimanya negara-negara anggota baru dalam ASEAN. Di antaranya, Vietnam masuk menjadi anggota ASEAN ketujuh pada tahun 1995, Laos dan Myanmar di tahun 1997, serta Kamboja pada tahun 1999 yang membulatkan ASEAN terdiri dari sepuluh negara anggota.²⁹ Pada era Milenium sampai saat ini, Perluasan ASEAN di antaranya berlanjut pada isu adanya upaya akses negara Papua Nugini dan Timor Leste dalam keanggotaan ASEAN. Serangkaian perundingan dalam institusi ASEAN masih berlangsung untuk membahas kelayakan dua negara tersebut menjadi anggota dengan status penuh di ASEAN.

Perluasan ASEAN membuka peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan refleksi terhadap eksistensi dan prestasi mereka sejak ASEAN terbentuk serta menguji “bobot” dan kredibilitas asosiasi regional ini dalam merepresentasi entitas Asia Tenggara. Hal tersebut memerlukan pendalaman lebih lanjut mengingat terdapat perbedaan ideologi, norma, belum lagi disparitas kesejahteraan ekonomi antarnegara ASEAN, yang dikhawatirkan terjadi proses “*dilution*” atau mencairnya soliditas ASEAN. Proses *dilution* ini sangat terasa saat

²⁹*Ibid.*

berlangsungnya pertemuan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN.³⁰ Permasalahan ini mempengaruhi karakter dan kohesi Asosiasi ini, sebagaimana yang dinyatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Jayakumar pada saat peresmian Myanmar dan Laos sebagai anggota ASEAN.³¹

ASEAN memiliki tantangan untuk mampu mengakomodir kohesi tersebut ditambah masalah sejumlah negara anggota baru yang beberapa belum terlepas dari problem politik internal serta tantangan dan kepentingan ASEAN lainnya yang telah berdiri lebih dari tiga dekade. Kendatipun demikian, tampaknya ASEAN tetap menjaga harapan besar mereka untuk memperluas dan menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional dalam arti sebenarnya.

Perluasan ASEAN memiliki *cost* dan *benefit* yang memiliki probabilitas menentukan masa depan ASEAN. Berikut *cost* (kerugian, kelemahan) potensial dengan adanya Perluasan ASEAN antara lain:³²

- Mengikis spirit tradisional ASEAN seperti pembangunan solidaritas, akomodasi, dan konsensus dalam ASEAN;
- Komposisi ASEAN yang lebih besar menyebabkan pembuatan keputusan terhadap segala masalah regional dan area kerjasama menjadi kurang atau bahkan tidak efektif;
- Menghalangi pengembangan *ASEAN Free Trade Area*;
- Perhatian ASEAN dapat terbagi pada beberapa masalah utama, misalnya dua belah pihak di ASEAN saling berkonflik yaitu antara negara yang

³⁰Disadur dari buku karya Dr. Bambang Cipto, MA., *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Kondisi Riil Dan Masa Depan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan II, 2010, hlm. 63-64 (Bab. 4 "*Perluasan ASEAN*").

³¹Menlu Jayakumar mengatakan '*The challenge for ASEAN is how to remain robust and united. ASEAN will be able to build on its strength if all the member countries continue to work closely together and if we remain cohesive*' dalam Michael Richardson, "*Club seeks safety in larger numbers*", *The Australian*, 8 August 1997 dikutip dari jurnal ilmiah karya Dr. Frank Frost (*Foreign Affairs, Defence and Trade Group, Parliament of Australia*), "*ASEAN at 30: Enlargement, Consolidation and the Problems of Cambodia*", http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/_Library/Publications_Archive/CIB/CIB9798/98cib02, 25 August 1997. [Diakses pada tanggal 30 November 2013].

³²*Ibid.*, Carlyle A. Thayer, '*ASEAN's Expanding Membership*', *Submission to Foreign Affairs Subcommittee, Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade, Parliament of Australia*, February 1997, p 19-21.

lebih dulu menjadi anggota ASEAN dan lebih kaya atau makmur dengan negara yang baru menjadi anggota ASEAN dan lebih miskin;

- Menimbulkan berbagai kesulitan dalam relasi ASEAN dengan para mitra utama ASEAN di luar seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa selama pembuatan kebijakan terkait negara anggota tertentu, contohnya masalah Myanmar (krisis politik domestik).

Di sisi lain, Perluasan ASEAN juga memiliki *benefit* (keuntungan, kelebihan, manfaat) potensial antara lain:

- Meningkatkan kapabilitas geo-politik dan pengaruh ASEAN terhadap *major powers* dunia seperti AS, Cina, Jepang, Australia, dan India;
- Perluasan ASEAN membentuk pasar domestik Asia Tenggara yang terdiri dari sekitar lima ratus juta penduduk akan menarik para investor dan meningkatkan kapabilitas ekonomi internasional ASEAN secara keseluruhan;
- Mengurangi ancaman atau bahaya konflik antar negara dengan meningkatkan komunikasi dan sikap saling percaya;
- Mendorong negara-negara anggota baru untuk terus melanjutkan dan meningkatkan kemajuan melalui reformasi ekonomi dan berbagai strategi yang dapat mencapai pertumbuhan dan kesetaraan;
- Meningkatkan Posisi tawar kerjasama subregional dan bilateral serta berkontribusi bagi stabilitas baik di Asia Tenggara dan Asia Timur secara keseluruhan;
- Perluasan ASEAN dapat berkontribusi terhadap peningkatan rasa kepercayaan regional (*sense of regional confidence*) dan identitas serta mendorong citra positif dan semangat ASEAN.

2.2 Keinginan Timor Leste Untuk Menjadi Anggota Penuh ASEAN

Dalam mengkaji dan memahami sub bab ini, akan diklasifikasikan beberapa sub-sub bab sebagai “batu-bata” yang membangun pondasi pemahaman secara bertahap dan komprehensif perihal keinginan Timor Leste untuk menjadi anggota penuh ASEAN. Dimulai dengan sub-sub bab mengenai kondisi domestik negara Timor Leste secara general yang meliputi kondisi fisik (geografi Timor Leste); politik dan pemerintahan nasional; perekonomian; serta kondisi sosial dan budaya masyarakat Timor Leste. Eksplanasi kondisi domestik negara ini ditujukan untuk introduksi, referensi atau acuan awal untuk memahami “anatomi” internal (kondisi nasional/domestik) negara Timor Leste.

Eksplanasi kondisi domestik tersebut mengantarkan, menjembatani pemahaman pada tahap aspek eksternal (inter-relasi lintas batas negara) dari negara baru ini yakni sub-sub bab mengenai politik luar negeri Timor Leste yang merepresentasi gambaran umum mengenai tujuan dan kepentingan nasional; kebijakan luar negeri; serta eksistensi negara ini dalam konstelasi global yang mengerucut pada lingkup Asia Tenggara (ASEAN) sesuai fokus permasalahan dalam penelitian ini yang mengkaji keinginan Timor Leste untuk menjadi anggota penuh ASEAN.

Penjelasan umum politik luar negeri Timor Leste lantas menjadi landasan dan pengantar menuju telaah mengenai realisasi atau upaya *follow-up* (tindak lanjut) dari keinginan Timor Leste untuk menjadi anggota penuh ASEAN yang dimulai dengan upaya perolehan status sebagai “observer” di ASEAN hingga tahap pengajuan formal Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN sebagai tataran lebih serius dari misi Timor Leste untuk berintegrasi menjadi anggota tetap dan berstatus penuh dalam organisasi regional Asia Tenggara tersebut. Pemaparan umum dari isu Timor Leste sebagai observer di ASEAN dan pengajuan formal status keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN menjadi dua sub-sub bab terakhir yang

melengkapi elaborasi dari kajian sub bab keinginan Timor Leste untuk menjadi anggota penuh ASEAN.

2.2.1 Kondisi Domestik Timor Leste

2.2.1.1 Kondisi Fisik (Geografi Timor Leste)



Gambar 2.1 “Peta Timor Leste (*East Timor*)”

Sumber: <http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/etimor.htm>

Timor Leste adalah sebuah negara di Asia Tenggara, terletak di sebelah utara Australia dan di bagian timur pulau Timor. Negara ini merupakan bagian wilayah maritim Asia Tenggara dan kawasan paling timur di Kepulauan Sunda Kecil. Luas wilayah Timor Leste secara keseluruhan adalah 15.007 km² (kilometer persegi) atau (5.400 sq mi). Letak astronomis Timor Leste adalah antara 8° LS-10° LS dan 124° BT-128° BT dan letak geografis Timor Leste yaitu di sebelah utara terdapat Selat Ombai,

Selat Wetar, dan Laut Banda; di sebelah selatan terdapat Laut Timor dan Australia; di sebelah barat terdapat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan bagian dari Indonesia; di sebelah timur terdapat Taman Nasional Nino Konis Santana yang berupa hutan tropis kering yang terdapat beberapa spesies tumbuhan dan hewan unik. Timor Leste memiliki dua pulau, Atauro dan Jaco, serta terdapat satu wilayah kantong Oecussi di bagian utara Timor Barat (Indonesia).³³

Sebagai negara di kawasan Asia Tenggara, iklim tropis yang umumnya panas dan lembab dimiliki oleh negara ini serta terdapat dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Suhu udara dapat terasa dingin hingga 20 derajat Celcius jika dipengaruhi musim dingin di benua Australia yaitu bulan Juli sampai dengan Agustus. Kebanyakan wilayah Timor Leste berupa pegunungan dan gunung tertinggi di Timor Leste adalah Gunung Tatamailau yang dikenal sebagai Gunung Ramelau dengan ketinggian 2.963 meter. Tanah di wilayah negara ini pada umumnya terdiri dari endapan kapur dan tanah liat. Dengan corak iklim dan jenis tanah demikian, Timor Leste memiliki potensi hasil pertanian lahan kering dan tanaman perkebunan terutama kopi.³⁴

Sebagian besar penduduk negara yang juga dijuluki dengan “Timor Lorosa’e” (sekitar 80 persen) hidup dari pertanian. Para penduduk setempat sudah terbiasa berladang dengan menanam jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan padi gogo. Namun jarang ditemukan penduduk yang bertani dalam skala besar, kecuali para misionaris. Hasil utama dari pertanian adalah kopi yang menyumbangkan sekitar 80% dari nilai ekspor Timor Leste sehingga menjadi komoditi ekspor unggulan Timor Leste di pasar Asia Tenggara maupun di seluruh dunia.

³³Disadur dari *website resmi BBC-UK (British Broadcasting Corporations-United Kingdom)*, “*East Timor profile*”, <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-14952882>, 25 Juli 2013. [Diakses pada tanggal 24 Desember 2013].

³⁴*Ibid.*

2.2.1.2 Kondisi Demografi dan Sosial³⁵

Negeri *Timor Lorosa'e* memiliki populasi berjumlah sekitar 1.143.667 jiwa dengan komposisi penduduk mayoritas keturunan ras *Malay-Polynesia* (Melayu-Polinesia), Afrika, dan Papua, sementara minoritasnya merupakan keturunan Cina (sebagian besar telah meninggalkan negeri Timor pada tahun 1970an), Arab, dan Eropa (termasuk Portugis/Portugal). Berdasarkan sensus pada tahun 2010, 96.9% penduduk Timor Leste memeluk agama Katolik; 2.2% Protestan; 0.3% Muslim; dan 0.5% lainnya atau tidak beragama. Agama Katolik yang notabene sebagai agama mayoritas penduduk bangsa Timor telah bercampur dengan tradisi lokal serta menjadikan Timor Leste menjadi salah satu dari hanya dua negara yang didominasi oleh umat Katolik Roma di Asia (bersama Filipina). Jumlah gereja meningkat dari 100 pada tahun 1974 menjadi lebih dari 800 pada tahun 1994. Karena mayoritas penduduk beragama Katolik, maka kini terdapat tiga keuskupan (diosis) yaitu: Diosis Dili, Diosis Baucau dan Diosis Maliana yang baru didirikan pada tanggal 30 Januari 2010 oleh Paus Benediktus XVI.

Timor Leste mempunyai dua bahasa resmi yaitu Portugis (warisan dari bekas koloni Portugis) dan Tetun (termasuk rumpun bahasa Austronesian yang diucapkan di sekitar Asia Tenggara dan sebagian besar kata dalam bahasa Tetun berasal dari bahasa Portugis, tetapi juga terdapat kata-kata serapan dari bahasa Indonesia, contohnya adalah notasi bilangan). Selain itu dalam konstitusi nasional Republik Demokratik Timor Leste disebutkan bahwa Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dijadikan bahasa kerja (bahasa yang lazim digunakan dalam dunia karir dan profesional di negara tersebut). Selain itu terdapat pula belasan bahasa daerah, di

³⁵*Ibid.*

antaranya bahasa Bekais, Bunak, Dawan, Fataluku, Galoli, Habun, Idalaka, Kawaimina, Kemak, Lovaia, Makalero, Makasai, Mambai, Tokodede, dan Wetarese. Mayoritas masyarakat Timor Leste banyak menggunakan bahasa Tetun sebagai bahasa percakapan sehari-hari.

Di sisi lain, Bahasa Indonesia sendiri masih banyak dan kerap dipakai untuk menulis, misalnya pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Banyak mahasiswa dan dosen lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar Kegiatan Belajar-Mengajar (KBM) dan menulis karya ilmiah. Ketika bangsa Timor masih berada di bawah kedaulatan penuh Indonesia tepatnya pada rezim Presiden Soeharto, penggunaan bahasa Portugis dilarang dan bahasa Indonesia diperbolehkan untuk digunakan dalam lingkup pemerintahan, sekolah, dan perusahaan. Di bawah rezim pemimpin berdarah Jawa tersebut yang cukup dikenal bersifat primordial, budaya Jawapun sempat gencar diinfiltrasikan terhadap masyarakat Timor. Namun saat ini, paska memisahkan diri dari negara Indonesia dan berdiri sebagai negara Timor Leste yang berdaulat penuh, Bahasa Tetun dan Portugis diinternalisasikan dalam setiap perikehidupan warga negara Timor Leste serta diperlukan untuk menggantikan budaya Jawa yang cukup lama terpelihara semasa bangsa Timor masih berintegrasi penuh dengan negara Indonesia. Dewasa ini bahasa Portugis di Timor Leste diajarkan dan dipromosikan secara luas dengan bantuan dari negara Brasil dan Portugal.

Masyarakat Timor Leste memiliki budaya yang dipengaruhi oleh banyak budaya asing, termasuk Portugis, Katolik Roma, dan Indonesia. Budaya bangsa *Timor Lorosa'e* juga secara historis juga lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Austronesian, suatu budaya yang berakar dan tersebar di populasi penduduk Asia Tenggara (khususnya populasi keturunan ras Melayu-Polinesia) dan Oseania (*Oceania*). Budaya ini

meliputi seni tulisan, *body art* (tato) dengan corak primitif serta dipengaruhi corak/motif dari Cina, India dan Islam yang menunjukkan status dan peranan sosial seseorang serta secara simbolis menggambarkan sifat dan karakter orang tersebut. Lalu, dalam hal arsitektur, beberapa bangunan gaya Portugis ditemukan pada rumah tradisional Tetun di bagian timur yang dikenal sebagai *uma lulik* (rumah suci) dan *lee teinu* (rumah panggung) di Fataluku.

Pada era globalisasi ini, radio masih menjadi media yang paling populer. Stasiun Radio Televisi (Televisi) Timor Leste diluncurkan pada tahun 2002. Radio publik menjangkau 90% penduduk, sementara TV publik mempunyai jangkauan yang lebih kecil. Untuk teknologi internet, Timor Leste mempunyai 2.300 pengguna internet pada bulan Desember 2011 dari jumlah jutaan penduduk secara keseluruhan. Penggunaan media TV dan internet yang relatif minim di Timor Leste berkorelasi dengan tingkat melek huruf di Timor Leste yang masih belum merata. Angka melek huruf pada tahun 2010 mencapai 58,3%, meningkat dari hanya 37,6% di tahun 2001. Pada tahun 2006, 10% sampai dengan 30% siswa kanak-kanak tidak bersekolah.

2.2.1.3 Politik dan Pemerintahan Nasional

Peristiwa jajak pendapat yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan badan *ad hoc* (badan khusus) PBB yakni *United Nations Mission in East Timor* (UNAMET) telah membuka babak sejarah baru bagi Timor Leste yang beberapa dekade sebelumnya telah dikuasai oleh negara Indonesia sebagai wilayah Provinsi ke-27 Indonesia bernama Timor Timur (*East Timor*). Pada tahun 1999 itulah Timor Leste akhirnya berhak keluar atau lepas dari wilayah kedaulatan Indonesia kemudian mendirikan negara sendiri dengan nama *Republica Democratica de Timor*

Leste (dikenal dengan sebutan negara Timor Leste). Negara eks-provinsi Indonesia ini resmi menyelenggarakan pemerintahannya sejak 20 Mei 2002 paska penyerahan kedaulatan penuh oleh badan *ad hoc* PBB yang menangani pemerintahan transisi Timor Leste tersebut yaitu *UNTAET (United Nation Transitionin East Timor)*.³⁶ Pada tahun 2002 pula, Timor Leste resmi bergabung menjadi negara anggota PBB.

Sejak awal menjalankan pemerintahannya yang berdaulat penuh, negara baru di kawasan Asia Tenggara ini memiliki wilayah pemerintahan pusat atau beribukota di Dili (dulunya merupakan eks-ibukota Provinsi Timor Timur saat masih terintegrasi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI). Bentuk pemerintahan Timor Leste adalah semi presidensial, yakni Republik dengan sistem pemerintahan Parlemerter, di mana terdapat Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri (PM) sebagai Kepala Pemerintahan. Sistem pemerintahan negara ini juga dapat disebut dengan sistem pemerintahan konstitusional atau sistem pemisahan kekuasaan, sehingga terdapat empat lembaga tinggi negara masing-masing Presiden Republik, Parlemen Nasional, Pemerintah dan Lembaga Peradilan. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif mempunyai kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang, sehingga Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah mengepalai dewan menteri atau kabinet.³⁷

Kepala negara Timor Leste yaitu Presiden yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dengan masa bakti selama lima tahun. Meskipun Presiden kedudukannya dikenal secara simbolik namun juga merupakan panglima tertinggi (pemimpin tertinggi) angkatan

³⁶Disadur dari *Paper* Karya Alarico Da Costa Ximenes (Staf Pengajar Jurusan Ilmu Politik , Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Nacional Timor Lorosa'e Seja, Dili, Timor-Leste), *Kepentingan Dan Diplomasi Timor Leste Di ASEAN*, [Http://Www.Tlstudies.Org/Pdfs/TLSA%20Conf%202011/Chp_54.Pdf](http://Www.Tlstudies.Org/Pdfs/TLSA%20Conf%202011/Chp_54.Pdf), 2011. [Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2013].

³⁷Disadur dari laporan berita oleh Sefnat Besie-Sindo TV, *Timor Leste Bakal Adopsi Sistem Pemerintahan Indonesia*, <http://international.okezone.com/read/2013/04/16/411/792429/timor-leste-bakal-adopsi-sistem-pemerintahan-indonesia>, Selasa 16 April 2013 18:01 WIB. [Diakses pada tanggal 9 Januari 2014].

bersenjata (pertahanan dan keamanan negara); memiliki hak veto terhadap Undang-Undang (UU) atau hak legislasi; berperan menjaga kelangsungan institusi pemerintahan; dan (jika diperlukan) menjadi mediator untuk resolusi konflik.³⁸

Sementara, sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengetuai Dewan Menteri atau Kabinet Pemerintahan dalam Parlemen selama lima tahun serta bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan publik dan segala keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Timor Leste serta implementasi laporan anggaran (*budget statements*). Perdana Menteri dipilih melalui pemilihan multipartai dan diangkat/ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas. Dalam kinerjanya, Perdana Menteri dibantu oleh insitusi-institusi di bawahnya yakni Menteri dan Sekretaris Negara untuk urusan Parlemen. Kepala Pemerintahan Timor Leste juga bertanggung jawab terhadap segala urusan yang secara tidak formal terintegrasi dalam Kementerian atau Kesekretariatan Negara sebagaimana pada *the Timor Sea Office* dan *the Government Information Office* yang mencakup jabatan sebagai berikut:

- *National Service for State Security*
- *Inspector-General*
- *Office of the Advisor for Human Rights*
- *Office of the Advisor for Image and Social Communications*
- *Office of the Advisor of Promotion of Equality*
- *Capacity Development Coordination Unit*
- *The Banking and Payments Authority*

Parlemen Timor Leste berbentuk unikameral yang disebut dengan *Parlamento Nacional* di mana anggotanya dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun. Jumlah kursi di Parlemen antara 52 dan 65 tetapi saat ini

³⁸Disadur dari *website* resmi *Government of Timor Leste*, “*Political System*”, <http://timor-leste.gov.tl/?p=33&lang=en>, 2014. [Diakses pada tanggal 10 Januari 2014].

berjumlah 65 kursi.³⁹ *Parlamento Nacional* bertanggung jawab atas pembuatan Undang-Undang (UU) terkait berbagai permasalahan kebijakan domestik dan luar negeri, dan berbagai fungsi lainnya sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Fungsi dan tujuan spesifik dari *Parlamento Nacional* tersebut, sebagai berikut:⁴⁰

- Menyusun aturan legislatif yang relevan dan dalam tempo yang tepat;
- Menetapkan dan melangsungkan sistem multipartai serta aturan-aturan demokratis melalui dialog yang produktif;
- Mengimbangi atau menciptakan keseimbangan dengan kekuasaan Presiden (jabatan kepresidenan), institusi, dan aparat pemerintah nasional lainnya.
- Menciptakan dan memelihara komunikasi yang tepat, efektif, efisien antar elemen atau cabang pemerintah untuk menjamin keberlangsungan Konstitusi dan aturan yang berlaku secara konstitusional, transparansi dalam administrasi negara, dan independensi serta keadilan penegakan hukum. Maka, terkait fungsi yurisdiksi, Parlemen menunjuk Hakim Agung (hakim utama) untuk memimpin pelaksanaan fungsi yurisdiksi dalam institusi Mahkamah Agung (*The Supreme Court of Justice*).

Lembaga dan institusi pemerintahan Timor Leste yang telah berdiri selama ini, telah berupaya membangun perikehidupan bangsa dan negara yang demokratis dan stabil hingga dewasa kini. Selama proses awal pembangunan politik dan pemerintahan domestik, Timor Leste sempat mengalami instabilitas dan turbulensi politik antara elit yang berkuasa (Xanana Gusmao, *founding father* Timor Leste) dengan Partai Politik (Parpol) berpengaruh di timor Leste (Fretilin) diikuti

³⁹Disadur dari artikel *Bimbingan.org*, “Negara Di Asia Tenggara Yang Menganut Sistem Presidensial”, <http://www.bimbingan.org/negara-di-asia-tenggara-yang-menganut-sistem-presidensial.htm>, 2013. [Diakses pada tanggal 13 Desember 2013].

⁴⁰Disadur dari *website EastTimorGovernment.com*, “East Timor Government”, <http://www.easttimorgovernment.com/government.htm>, 2012. [Diakses pada tanggal 10 Januari 2014].

perseteruan para pendukung masing-masing yang diliputi peristiwa percobaan pembunuhan, kudeta, dan anarkisme lainnya yang puncaknya terjadi pada tahun 2006. Instabilitas politik dan keamanan domestik ini lanjut menimbulkan instabilitas ekonomi sampai paska krisis.

Dunia internasional pun bereaksi atas krisis politik domestik Timor Leste tersebut sebagaimana sempat diterjunkan para observer dan tenaga ahli dari beberapa INGO (misalnya *The Asia Foundation* yang berpusat di California, Amerika Serikat), serta pasukan penjaga perdamaian dari PBB, Pasukan Stabilisasi Internasional pimpinan Australia yaitu *International Stabilization Forces (ISF)*, juga dikerahkan pada tahun 2006 di tengah-tengah kekerasan yang memaksa ribuan orang mengungsi.⁴¹ Kesemua pihak tersebut berupaya membantu Timor Leste untuk mengkonduksikan, merekonstruksi, serta menstabilkan tatanan sosial, politik dan pemerintahan domestik Timor Leste ke depan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir pasukan perdamaian PBB dan segala pihak eksternal Timor Leste mulai mengakhiri asistensi dan misi perdamaian serta rekonstruksi kondisi politik dan pemerintahan domestik Timor Leste. Beberapa pejabat setempat yang tengah mempersiapkan keluarnya pasukan perdamaian PBB. Sekitar 1.300 pasukan perdamaian PBB itu direncanakan akan keluar dari wilayah Timor Leste hingga akhir tahun 2012. Pemerintah Timor Leste menyambut baik berakhirnya misi perdamaian PBB tersebut, mereka menganggap hingga saat ini Timor Leste telah dapat menjaga kondisi keamanannya sendiri dan stabilitas politik-pemerintahan tanpa perlu bantuan dari pihak asing.⁴²

⁴¹Disadur dari laporan *The Asia Foundation*, “*Timor-Leste*”, <http://asiafoundation.org/resources/pdfs/TimorLeste.pdf>.

⁴²Fajar Nugraha-Okezzone, “*Hillary Dorong Demokrasi di Timor Leste*”, <http://international.okezone.com/read/2012/09/06/411/686165/hillary-dorong-demokrasi-di-timor-leste>, Kamis, 06 September 2012 17:24 wib. [Diakses pada tanggal 10 Januari 2014].

Timor Leste sampai saat ini memelihara struktur dan kondisi politik domestik Timor Leste yang bersifat *good governance*, demokratis, menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut ditunjukkan dengan dipeliharanya sistem pemisahan kekuasaan, sistem multipartai serta Pemilu, terjaminnya partisipasi rakyat dalam politik dan pemerintahan, terepresentasinya perempuan dalam jabatan pemerintahan secara proporsional (sebesar 30 % anggota Parlemen Nasional yang terpilih adalah perempuan dan beberapa menteri pada posisi penting didapuk oleh perempuan) serta terjaminnya eksistensi dan kebebasan media massa. Untuk mengantisipasi fenomena korupsi khususnya yang mewabah di negara-negara berkembang dan negara dunia ketiga sebagaimana Timor Leste, Parlemen Nasional telah menetapkan Undang-Undang Anti-Korupsi; mendirikan Komisi Anti-Korupsi; memperkuat lembaga *Ombudsman* atau lembaga pengawas pelayanan publik oleh pemerintah (di Timor Leste disebut *Provedor de Justica e Direitos Humanos*) serta memperkuat kekuatan investigative Jaksa Agung dan segenap aparat hukum. Konstitusi Timor Leste cenderung bersifat liberal sekaligus humanis dengan adanya Undang-Undang melarang hukuman mati setelah meratifikasi berbagai Perjanjian Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional (*International Human Rights Treaties*).⁴³

2.2.1.4 Kondisi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Timor Leste merupakan salah satu negara yang secara ekonomi paling dependen terhadap sumberdaya energi yaitu minyak dan gas (migas) yang bersumber di Laut Timor. Menurut *CIA World Factbook*,

⁴³Disadur dari tulisan Presiden Timor Leste (J. Ramos Horta) dalam *website EASTASIAFORUM (Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific)*, “*Why Timor-Leste should join ASEAN now*”, <http://www.eastasiaforum.org/2011/05/16/why-timor-leste-should-join-asean-now/>, May 16th, 2011. [Diakses pada tanggal 29 Januari 2014].

Timor Leste memiliki cadangan minyak terbukti sebanyak 553.800.000 barrel, Ini belum termasuk ladang yang belum diketahui secara pasti jumlahnya dikarenakan belum seluruh perairan celah Timor diteliti. Begitupun cadangan gas Timor Leste yang mencapai 200.000.000.000 meter kubik, belum termasuk ladang gas yang belum tereksplorasi. Secara geografis, sumber migas yang berlimpah tersebut terletak di antara perairan Timor dan Australia, maka Timor Leste dan Australia melaksanakan perjanjian untuk mengelola bersama sumber migas terbesar di Laut Timor tersebut yang dikenal dengan nama *Greater Sunrise*.

Timor Leste juga mengembangkan dan mengelola ladang migas *Bayu-Undan* yang notabene lebih kecil daripada *Greater Sunrise* karena pengelolaan *Greater Sunrise* belum produktif secara maksimal. Pendapatan Timor Leste dari aset migas *Bayu-Undan* cukup menjanjikan dengan menghasilkan pendapatan sebesar 6 juta Dolar AS.⁴⁴ Maka sebagai negara termuda di Asia Tenggara, Timor Leste memiliki Posisi tawar yang tinggi dalam pembangunan perekonomian melalui kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) migas yang dimiliki tersebut.

Pemerintah Timor Leste menjadikan pendapatan migas ini sebagai sumber utama pembangunan ekonomi nasional jangka panjang sebagaimana untuk menunjang diversifikasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang masih menjadi problem pokok domestik. Terkait kebijakan ekonomi nasional jangka panjang, pemerintah Timor Leste merilis rencana pembangunan strategis (*Strategic Development Plan*) pada 13 Juli 2011. *Strategic Development Plan* tersebut memaparkan

⁴⁴John McBeth, "Dark Clouds Over Timor-Aussie Sunrise Tussle", *The Straits Times*, June 15, 2010 dalam laporan Ben Dolven; Rhoda Margesson; Bruce Vaughn (Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov), "Timor-Leste: Political Dynamics, Development, and International Involvement", <http://www.govexec.com/pdfs/022511rb1.pdf>, July 3, 2012. [Diakses pada tanggal 20 Januari 2014].

kerangka pembangunan nasional yang mulai direalisasi dari tahun 2011 sampai dengan 2030, di mana kebijakan migas yang notabene diprioritaskan pemerintah nasional tersebut terhimpun di dalamnya.⁴⁵

Sebagai upaya lebih lanjut untuk menjaga kelangsungan aset migas nasional, pemerintah Timor Leste mendirikan suatu institusi yang diklaim secara internasional, yaitu *Petroleum Fund* yang berfungsi untuk mengelola pendapatan migas nasional secara transparan dan berkelanjutan. *Petroleum Fund* sempat *manage* 90 % pengeluaran pemerintah yang bersumber dari pendapatan migas. Justru hal ini menjadi tantangan terbesar bagi perekonomian Timor Leste. Sejak tahun 2010 hingga berlangsung selama dua tahun, Timor-Leste mengalami peningkatan pengeluaran pemerintah secara substansial yang dialokasikan pada *traditional areas* seperti pembangunan infrastruktur; pedesaan; layanan umum; dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kesemuanya dilakukan dalam skala besar. Sementara hasil pembangunan masif yang dilakukan pemerintah tersebut masih relatif dijangkau dan dinikmati hanya oleh sebagian kecil masyarakat. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan masif tersebut yang notabene ditopang dengan perluasan anggaran (*the expansionary budget*) yang bersumber dari pendapatan migas telah membawa Timor Leste mengalami inflasi yang ditaksir dengan persentase sekitar 18 %.⁴⁶

Di tengah kondisi perekonomian nasional yang mengalami pengeluaran surplus dan inflasi, lantas Timor Leste memperoleh bantuan dana (*Millennium Challenge Compact*) dari pemerintah Amerika Serikat (AS) sebesar 10 juta Dolar AS yang ditandatangani dan disalurkan pada

⁴⁵Australia Government-Department of Foreign Affairs and Trade, "Timor-Leste country brief", <http://www.dfat.gov.au/geo/timor-leste/timor-leste-brief.html>, July 2012. [Diakses pada tanggal 20 Januari 2014].

⁴⁶*Op. Cit.*, laporan Ben Dolven; Rhoda Margesson; Bruce Vaughn (Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov), "Timor-Leste: Political Dynamics, Development, and International Involvement", <http://www.govexec.com/pdfs/022511rb1.pdf>, July 3, 2012. [Diakses pada tanggal 20 Januari 2014].

tahun 2010 untuk mengembangkan kapasitas pemerintahan Timor Leste dalam *me-manage* kontrol keuangan negara. Sejak saat itu, pemerintah Timor Leste mengeluarkan kebijakan evaluatif dengan melakukan manajemen pendapatan nasional yang bersumber dari migas dengan melakukan penarikan pendapatan hanya dalam jumlah terbatas setiap tahunnya. Sebagai implikasinya, “pundi-pundi” keuangan dan pendapatan negara Timor Leste mengalami keseimbangan dengan jumlah sebesar 10 juta Dolar AS pada akhir tahun 2011.⁴⁷

Pengembangan roda perekonomian nasional Timor Leste dilakukan dengan kegiatan ekspor hasil pertanian dan perkebunan seperti kopi sebagai komoditas ekspor utama di mana menyumbangkan sekitar 90% nilai ekspor Timor Leste dan kualitas kopi di “bumi Timor” ini dikenal di seluruh dunia hampir sebaik kopi “Arabica”. Marmer, minyak, dan kayu juga menjadi komoditas primer Timor Leste.

Adapun sektor pariwisata dikembangkan di mana jumlah wisatawan terus meningkat meskipun masih mencapai angka 27.000 wisatawan mancanegara di tahun 2009. Karena adanya perluasan dan pengembangan kegiatan perekonomian tersebut di samping prioritas kegiatan perekonomian melalui eksplorasi sumberdaya migas, perekonomian Timor Leste mengalami pertumbuhan secara kontinyu sebagaimana pada tahun 2010 tumbuh sebesar 8.5 %, tahun 2011 sebesar 10 %, dan tahun 2012 sebesar 10.9%.⁴⁸

Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao menyatakan, negaranya akan menjadi negara yang sejahtera pada tahun 2030 mendatang apabila pendapatan minyak bumi dari wilayah perairan Timor telah masuk ke kas pemerintah (tanpa dimanipulasi atau disalahgunakan). Namun banyak pihak mengkritik pemerintah karena

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Op. Cit.*, Australia Government-Department of Foreign Affairs and Trade, “Timor-Leste country brief”.

menganggap pemerintah Timor Leste tidak adil dalam mendistribusikan pendapatan dari hasil minyak buminya. Anggaran pendapatan negara tersebut lebih banyak digunakan untuk pembangunan di perkotaan sedangkan wilayah pedesaan di Timor Leste hanya mendapatkan sedikit bagian dari alokasi anggaran negara untuk pembangunan.⁴⁹ Jadi, tantangan kunci bagi perekonomian Timor Leste yakni mengokohkan stabilitas politik agar mampu fokus pada pembangunan kapasitas negara dan infrastruktur; menjamin ketersediaan lapangan kerja dan pemerataan masyarakat *employment*; mencegah dan mengatasi penyalahgunaan aliran pendapatan nasional yang bersumber pokok dari migas seperti korupsi serta mencegah segala keputusan yang kurang tepat dalam mengalokasikan pendapatan nasional untuk pembangunan dan investasi.

Saat ini, kerangka hukum dan legal diterapkan oleh pemerintah Timor Leste sebagai kebijakan evaluatif untuk meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan pemerintahan yang efektif. Manajemen sumberdaya migas milik negara sebagai aset utama perekonomian Timor Leste diupayakan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Aturan perundang-undangan yang *rigid* mengenai perdagangan telah ditetapkan oleh Parlemen yakni ihwal hukum perusahaan (*company law*), ijin/registrasi perdagangan (*commercial registry*), dan hukum pajak yang ditetapkan demi kelangsungan aktivitas investasi yang kondusif. Adapun ketetapan hukum lebih jauh diterapkan terkait upaya mempermudah atau menyederhanakan proses registrasi bisnis (*business registration process*); dilakukan pengenalan terhadap kepemilikan lahan/tanah (*introduction of land ownership*); ketentuan mengenai

⁴⁹Wahyu Dwi Anggoro-Okezone (situs resmi berita online), "Ditinggal PBB, Timor Leste masih Rawan Kekerasan", <http://m.okezone.com/read/2012/12/28/411/738516/ditinggal-pbb-timor-leste-masih-rawan-kekerasan>, Jum'at 28 Desember 2012, pukul 20:04 wib. [Diakses pada tanggal 13 Desember 2013].

kepailitan suatu perusahaan (*bankruptcy*); perbankan; asuransi; dan ketentuan investasi asing.

Dikembangkan pula ketentuan sektor privat tambahan yang dirancang untuk menciptakan lingkungan investasi yang kompetitif, terbuka, dan menarik. Tujuan investasi demikian telah diupayakan terealisasi di bawah naungan dan kontrol sentral dari Badan Promosi Ekspor dan Investasi (*Investment and Export Promotion Agency*). Perihal kepemilikan lahan/tanah asing (*foreign land ownership*) tidak diberlakukan dalam Konstitusi Timor Leste. Kesemua upaya evaluatif dan berkelanjutan oleh pemerintah Timor Leste tersebut menjadi prioritas dalam upaya evaluasi dan kontrol roda perekonomian Timor Leste ke depan.⁵⁰

2.2.2 Politik Luar Negeri Timor Leste Terhadap ASEAN

Timor Leste resmi menjadi negara baru di kawasan Asia Tenggara yang berdaulat di abad 21 ini tepatnya pada tanggal 20 Mei 2002. Sejak saat itu, Timor Leste terus berupaya untuk memperoleh kebulatan pengakuan kedaulatan secara *de facto* dan *de jure* dari hampir seluruh negara di dunia mulai dari Indonesia (yang akhirnya bersedia melepaskan “eks-wilayah kedaulatannya” untuk menjadi suatu negara merdeka), Australia (salah satu negara yang mendukung dan mendorong separatisme serta kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia), AS, Portugal, serta melakukan pendekatan dengan PBB hingga akhirnya Timor Leste resmi bergabung menjadi anggota PBB ke-191 pada tanggal 27 September 2002 yang mengantarkan Timor Leste memasuki ranah hubungan internasional atau hubungan luar negeri yang lebih ekspansif dan mempengaruhi politik luar negeri Timor Leste.

⁵⁰*Op.Cit.*, laporan Ben Dolven; Rhoda Margesson; Bruce Vaughn (Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov), hlm. 5.

Struktur politik dan ekonomi serta kepribadian nasional suatu bangsa, kebudayaan, ideologi, sejarah masa lampau dan lokasi geografik suatu negara mempunyai peranan dalam penentuan politik luar negeri.⁵¹ Diktum tersebut berlaku pada politik luar negeri Timor Leste. Struktur politik dan ekonomi, kepribadian nasional (bangsa), kebudayaan, ideologi Timor Leste yang secara general bersifat demokratis dan humanis ditambah Timor Leste merupakan negara yang baru berdiri, sarat akan kebutuhan eksistensial (pengenalan diri) di muka dunia internasional dan adanya kebutuhan untuk membangun negara, kesemuanya mempengaruhi politik luar negeri Timor Leste yang bertendensi diplomatis (berorientasi terbuka dan kooperatif) terhadap dunia internasional.

Politik luar negeri dari negara “baru” ini berorientasi aliran idealis, yaitu menghendaki adanya ketertiban dunia, kepentingan bersama, keadilan dunia berdasarkan hukum, pengertian atas dasar perundingan dan lain-lain.⁵² Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Demokratis Timor Leste (RDTL), pasal 8 tentang “Hubungan Internasional”, ayat 2 dengan jelas menyatakan posisi politik dan kebijakan luar negeri Timor Leste sebagai berikut:⁵³

“The Democratic Republic of East Timor shall establish relations of friendship and cooperation with all other peoples, aiming at the peaceful settlement of conflicts, the general, simultaneous and controlled disarmament, the establishment of a system of collective security and establishment of a new international economic order capable of ensuring peace and justice in the relations among peoples.”

Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa Republik Demokratis Timor Leste akan membangun hubungan persahabatan dan kerja sama dengan semua bangsa lain, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai, perlucutan senjata yang umum, serentak dan teratur, berupaya untuk penciptaan

⁵¹Dikutip dari buku karya Suffri Yusuf, S.H., *HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN POLITIK LUAR NEGERI: Sebuah Analisis Teoretis Dan Uraian Tentang Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 110.

⁵²*Ibid.*, hlm. 115.

⁵³Dikutip dari *WIPO (World Intellectual Property Organization)*, “*Timor-Leste: Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste*”, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=196269, 2002. [Diakses pada tanggal 19 Oktober 2013].

suatu sistem pengamanan bersama serta penciptaan suatu orde ekonomi internasional baru, yang mampu menjamin perdamaian dan keadilan dalam hubungan antarbangsa.

Politik luar negeri Timor Leste yang termaktub pada konsitusi nasional atau UUD Timor Leste tersebut berkorelasi dengan konsep diplomasi politik. Aspek politik dari diplomasi tersebut dikaitkan dengan suatu kebijakan negara dalam menghadapi atau menanggapi negara lain ataupun dalam menyikapi suatu isu internasional lainnya. Dalam konteks tersebut, Timor Leste merumuskan kebijakannya dalam merespon situasi internasional yang telah mengalami globalisasi dan multipolarisme sejak masa awal berdirinya negara Timor Leste.

Dalam diplomasi politik, dimensi politik termanifestasi dengan adanya upaya negara-negara yang bersaing meraih kekuasaan politik (*struggle for power*). Dalam konteks demikian, Timor Leste yang merupakan negara ‘muda’ sejak saat itu berupaya beradaptasi dan berkepentingan untuk membangun citra diri di panggung internasional sebagai negara yang kooperatif, menjunjung perdamaian, demokrasi, HAM dan hal-hal lain yang simpatik dan acceptable (mampu diterima) di dunia internasional yang notabene berada pada atmosfer globalisasi dan multipolarisme. Upaya dan kepentingan Timor Leste tersebut mengarah pada diplomasi politik yang bertujuan untuk membangun kekuatan dan posisi tawar Timor Leste yang positif di tengah atmosfer *struggle for power* dari dunia internasional. Hal ini telah menjadi kebijakan Timor Leste yang termaktub dalam Konstitusi RDTL pasal 8 ayat 2 tersebut.

Sehubungan dengan aspek lokasi geografik dalam politik luar negeri, negara yang didominasi oleh pemeluk agama Katolik Roma terbesar di Asia bersama Filipina ini sejak awal merdeka menetapkan prioritas pendekatan hubungan luar negeri dengan negara-negara dalam satu kawasan terdekat yang

mengitarinya, yakni kawasan Asia Tenggara. Berpijak pada konstitusi Republik Demokratis Timor Leste pasal 8, ayat 4, menyatakan:⁵⁴

“The Democratic Republic of East Timor shall maintain special ties of friendship and co-operation with its neighbouring countries and the countries of the region.”

Dalam konteks tersebut, Timor Leste memiliki wacana dan mempertimbangkan eksistensi entitas negara-negara di Asia Tenggara yang terhimpun dalam suatu organisasi regional Asia Tenggara yaitu ASEAN. Asosiasi regional Asia Tenggara ini dipandang Timor Leste terus menunjukkan hubungan kooperatif yang positif antaranggota secara multidimensional seperti dalam hal pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan perdamaian baik pada lingkup kawasan regional maupun internasional dengan progres signifikan, solid dan dinamis.

Setelah meninjau konsiderasi akan perkembangan positif dari eksistensi ASEAN sebagaimana yang telah dipaparkan, Timor Leste menjadikan ASEAN sebagai masa depan yang menjadi agenda pokok politik luar negeri Timor Leste. Pemerintah Timor Leste berkeinginan untuk bergabung menjadi anggota tetap dengan status penuh di ASEAN yang prospektif bagi pemenuhan kepentingan nasional dan berbagai keuntungan selama proses pembangunan negara muda ini. Keinginan dan maksud pemerintah Timor Leste untuk menjadi anggota dengan status penuh di ASEAN dapat dicermati dari pernyataan resmi Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, yang menyatakan:⁵⁵

“Dengan bergabungnya Timor Leste ke dalam Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), bisa mendorong ekonomi negara ini untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik daripada saat ini. Apalagi, kerja sama ASEAN tidak hanya bidang sosial, budaya, teknik, pendidikan, tetapi juga ekonomi, dan lainnya. Selain itu, ASEAN juga mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui rasa hormat untuk keadilan dan taat aturan hukum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan keputusan pemerintah untuk mengatur semua hubungan dengan negara lain yang pada prinsipnya

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

dipengaruhi oleh kondisi domestik dan internasional. Dua unsur utama dalam politik luar negeri adalah tujuan dan sarana politik luar negeri.⁵⁶ Berlandaskan pada pemahaman tersebut, dapat ditinjau bahwa tujuan politik luar negeri Timor Leste terhadap ASEAN yaitu bergabungnya Timor Leste dalam ASEAN hingga berintegrasi sepenuhnya dengan memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN. Tujuan politik luar negeri Timor Leste terhadap ASEAN tersebut menjadi bagian tujuan politik luar negeri jangka panjang dari pemerintahan Timor Leste sebagaimana termaktub dalam konstitusi RDTL.

Sementara, sarana atau instrumen politik luar negeri sebagai implementasi politik luar negeri Timor Leste terhadap ASEAN yaitu melalui diplomasi. Taktik dan strategi diplomasi yang diterapkan Timor Leste disebut dengan istilah diplomasi “*halo amigo ba ema hotu no la halo inimigo ba ema ida*” (“*to make friends with all of them and make no enemies*” atau kurang lebih maksudnya yaitu berteman dengan semua negara atau pihak manapun dan sebisa mungkin tidak membuat permusuhan serta tidak memiliki musuh).⁵⁷ Adapun diplomasi “Pragmatis” juga menjadi strategi diplomasi Timor Leste yang dimaksudkan bahwa Timor Leste telah melobi negara-negara anggota ASEAN yang memiliki sejarah kurang menyenangkan dengan Timor Leste untuk merekonsiliasi hubungan agar melupakan masa lalu dan menata masa depan yang lebih baik.⁵⁸

Adapun, elemen kekuatan politik tetap menjadi landasan dari diplomasi, khususnya dalam diplomasi politik. Sebab setiap negara memiliki tendensi untuk terlibat dalam *struggle for power*. Agenda politik dari suatu negara merefleksikan berbagai kepentingan yang terkadang dikemas dengan baik secara politis oleh diplomat. Kepentingan Timor Leste untuk membangun posisi tawar yang baik

⁵⁶Dikutip dari buku karya P. Anthonius Sitepu, “*Studi Hubungan Internasional*”, Penerbit Graha Ilmu, Medan, 2011, hlm. 177.

⁵⁷Disadur dari *Paper* karya Alarico Da Costa Ximenes (Staf Pengajar Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Nasional Timor Lorosa’e Seja, Dili, Timor-Leste), *Kepentingan Dan Diplomasi Timor Leste Di ASEAN*, http://www.tlstudies.org/Pdfs/TLSA%20Conf%202011/Chp_54.Pdf, 2011. [Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2013].

⁵⁸*Ibid.*

dalam tujuan memperoleh status keanggotaan ASEAN berkaitan erat dengan peranan para pemimpin politik serta diplomat Timor Leste dalam mengupayakan pencapaian kepentingan negara tersebut.

Di antaranya dapat disimak melalui pernyataan resmi Xanana Gusmao yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya. Figur pemimpin politik sekaligus diplomat Timor Leste ini melakukan suatu diplomasi yang bertendensi pada diplomasi politik selama memperjuangkan posisi tawar Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN. Secara persuasif dan *non-violence*, Gusmao mengemas dan mensosialisasikan keinginan serta upaya Timor Leste untuk menjadi negara anggota penuh ASEAN melalui pernyataan yang diliput dan dipublikasikan media internasional.

Gusmao menyatakan bahwa ASEAN juga mempromosikan perdamaian, keadilan dan stabilitas regional serta mematuhi Piagam PBB. Pernyataan Gusmao tersebut dapat dimaknai sebagai upaya Gusmao mendorong ASEAN agar menerima Timor Leste dalam keanggotaan penuh ASEAN. Sebab sesuai dengan misi ASEAN yang dinyatakan Gusmao tersebut, jika terdapat kebijakan ASEAN untuk menerima keanggotaan penuh Timor Leste, maka ASEAN dapat mewujudkan keadilan di antara negara-negara sekawasan Asia Tenggara untuk bersama eksis dan membangun kawasan, tak terkecuali bagi Timor Leste yang notabene jelas secara geografis merupakan bagian dari kawasan Asia Tenggara. Dan Timor Leste sendiri jika diterima menjadi negara anggota penuh ASEAN akan selalu berupaya memenuhi segala kaidah dalam ASEAN termasuk berkontribusi membantu misi ASEAN dalam menciptakan perdamaian, keadilan, dan stabilitas regional tersebut. Demikian garis besar esensi pernyataan Gusmao yang dikemas dalam diplomasi politik untuk memperjuangkan posisi tawar Timor Leste dalam memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN.

Upaya diplomasi politik oleh para pemimpin politik dan diplomat Timor Leste seperti yang dipaparkan di atas berkorelasi dengan konsep diplomasi politik

yang mengatur para aktor global untuk memfokuskan permasalahan melalui dialog dan negosiasi atau melalui segala cara tanpa menggunakan kekerasan (non-violence). Maka diplomasi politik berkontribusi terhadap penciptaan dan pemeliharaan stabilitas perdamaian di dunia. Diplomasi politik mampu menggiring dan meningkatkan kesediaan, keyakinan antarnegara dalam suatu dialog, bukan konflik ataupun perang.



BAB 3. UPAYA DIPLOMASI TIMOR LESTE UNTUK MEMPEROLEH STATUS KEANGGOTAAN PENUH DI ASEAN

Diplomasi merupakan manajemen sekaligus seni selama menjalankan hubungan dengan berbagai aktor lintas batas negara sekaligus memprioritaskan pencapaian kepentingan nasional yang sejauh atau sebisa mungkin dilaksanakan dengan sarana damai dan persuasif, seperti melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobbying*, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya.⁵⁹ Diplomasi berkaitan erat dengan politik luar negeri suatu negara. Politik luar negeri adalah substansi hubungan luar negeri dan kebijakan luar negeri suatu negara, sedangkan diplomasi adalah metode dan proses di mana hubungan dan kebijakan luar negeri itu dilaksanakan.⁶⁰ Jadi, suatu tindakan diplomasi tidak dapat dilaksanakan tanpa didukung oleh suatu kebijakan luar negeri.

Dalam konteks kasus yang dikaji pada karya ilmiah ini, ASEAN merupakan bagian dari entitas politik luar negeri yang sangat diperhitungkan oleh negara Timor Leste sebagai kepentingan nasional dan tercantum pada konstitusi nasional Republik Demokratis Timor Leste (RDTL) pasal 8 ayat 4 (sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab 2). Sejak awal Timor Leste memutuskan bergabung menjadi anggota ASEAN, Timor Leste merealisasikan tujuan pokok politik luar negerinya tersebut melalui sarana diplomasi. Prinsip jalinan kerjasama dan hubungan luar negeri Timor Leste yang berorientasi pada diplomasi ini secara implisit dipaparkan pada konstitusi nasional Republik Demokratis Timor Leste (RDTL) pasal 8 ayat 2 (sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab 2).

⁵⁹Disadur dalam buku karya Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, cetakan pertama, 2008, hlm. 4.

⁶⁰*Ibid*, disadur dari pendapat J. R. Childs, hlm. 33.

Di sini terdapat tendensi adanya diplomasi politik yang dilakukan Timor Leste yang ditunjukkan dengan kenyataan bahwa Timor Leste merumuskan entitas politik luar negerinya (kepentingan nasionalnya) terkait keanggotaan ASEAN ke dalam suatu kebijakan (dalam konstitusi RDTL sebagaimana yang telah dipaparkan). Sebab dalam konsep diplomasi politik, aspek politik dari diplomasi tersebut dikaitkan dengan suatu kebijakan negara dalam menghadapi atau menanggapi negara lain ataupun dalam menyikapi suatu isu internasional.

Sarana diplomasi yang dipilih untuk membangun posisi tawar Timor Leste yang besar untuk mampu memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN juga terkait dengan kepentingan Timor Leste untuk membangun citra diri di panggung regional maupun internasional sebagai negara yang kooperatif, menjunjung perdamaian, demokrasi, HAM dan hal-hal lain yang simpatik dan *acceptable* (mampu diterima) di tengah atmosfer globalisasi dan multipolarisme. Hal ini merujuk pada diplomasi politik yang memberikan corak atau karakter pada sarana diplomasi Timor Leste tersebut.

Berdasarkan pernyataan Roberto Soares, seorang diplomat unggulan Timor Leste yang notabene menjabat sebagai Sekretaris Negara untuk urusan ASEAN (*Secretary of State for ASEAN Affairs*) bahwa Timor Leste menciptakan dua strategi diplomasi. Strategi diplomasi yang pertama disebut dengan diplomasi "*halo amigo ba ema hotu no la halo inimigu ba ema ida*" atau dalam bahasa Indonesia artinya "*membuat persahabatan dengan semua orang dan tidak memusuhi siapapun*".⁶¹

Adapun strategi diplomasi kedua diutarakan oleh Duarte Nunes, selaku Ketua Komisi A (membidangi urusan hubungan internasional/luar negeri) Parlemen Nasional Timor-Leste, yaitu diplomasi "pragmatis". Artinya bahwa negara Timor Leste "diplomasi pragmatis" artinya negara Republik Demokratik Timor-Leste "*loke*

⁶¹Hasil wawancara Alarico da Costa Ximenes (Staf pengajar pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Nasional Timor Lorosa'e seja, Dili, Timor-Leste) dengan Mr. Roberto Soares, pada tanggal 10 september 2008, dalam paper karya Alarico Da Costa Ximenes, *Kepentingan Dan Diplomasi Timor Leste Di ASEAN*. http://www.tlstudies.org/pdfs/TLSA%20Conf%202011/chp_54.pdf, 2011. [Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2013].

an“ atau “membuka diri” kepada semua negara dan tidak memandang pada sejarah masa lalu yang kurang menyenangkan melainkan Timor Leste lebih memandang ke depan bagaimana bisa mendapatkan dukungan negara-negara kawasan regional baik di bidang politik keamanan dan ekonomi sebagai jaminan untuk pengembangan pembangunan di bumi Timor.⁶² Timor Leste berusaha melakukan pendekatan diplomatis terhadap negara-negara anggota ASEAN yang memiliki sejarah kurang menyenangkan dengan Timor Leste untuk merekonsiliasi hubungan agar melupakan masa lalu dan menata masa depan yang lebih baik.⁶³

3.1 Diplomasi Terbuka Timor Leste Untuk Memperoleh Status Keanggotaan Penuh Di ASEAN.

Diplomasi “*halo amigo ba ema hotu no la halo inimigu ba ema ida*“ dan diplomasi “pragmatis” yang dicetuskan para elit negara Timor Leste sebagai strategi utama Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN merujuk pada metode yang digunakan pada “diplomasi terbuka” (*open diplomacy*) yaitu deklarasi langsung dan terus terang.⁶⁴ Diplomasi terbuka yang juga disebut “diplomasi baru” (*new diplomacy*) ini pertama kali dicetuskan ketika Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson menghadiri dan berpidato dalam Konferensi Versailles untuk mencapai perjanjian mengakhiri Perang Dunia I. Ucapannya yang mengatakan tentang “*open covenant openly arrived at*” (perjanjian terbuka yang dicapai secara terbuka) dianggap sebagai satu era yang disebut diplomasi baru, khususnya untuk membedakannya dengan era sebelumnya (diplomasi lama) yang berkarakteristik tertutup, elitis, dan sering menjerumuskan rakyat kedalam peperangan.⁶⁵

⁶²*Ibid.*, hasil wawancara Alarico da Costa Ximenes (Staf pengajar pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Nasional Timor Lorosa'e seja, Dili, Timor-Leste) dengan Duarte Nunes (Ketua Komisi A Parlemen Nasional Timor-Leste), pada tanggal 15 Juli 2008.

⁶³*Ibid.*, paper karya Alarico Da Costa Ximenes.

⁶⁴*Collected Works*, jilid 31, hlm. 275, dalam buku karya S.L. Roy (Penerjemah: Herwanto, Mirsawati), “Diplomasi”, *Rajawali Press*, Jakarta, 1991, hlm. 80.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 79.

Presiden Woodrow Wilson memformulasikan tujuan diplomasi terbuka dalam poin paling awal dari *Fourteen Points*-nya yang terkenal sebagai berikut.⁶⁶

“Perjanjian damai yang terbuka yang dicapai secara terbuka tak boleh diikuti dengan pengertian (*understanding*) internasional secara tersendiri dalam bentuk apapun, tetapi diplomasi harus berlangsung secara terbuka dan diketahui umum.”

“Bapak diplomasi baru (diplomasi terbuka)” ini juga menyebutkan bahwa gaya diplomasinya sendiri sebagai cara Amerika yang berbeda dengan cara-cara diplomasi kuno (diplomasi lama) dari Yunani, Italia, dan Perancis. Meskipun kemudian muncul perdebatan tentang sifat terbuka dalam diplomasi yang dalam prakteknya susah dicapai, namun ide Woodrow Wilson setidaknya semakin meningkatkan akuntabilitas pejabat pemerintahan dalam membuat perjanjian dengan negara lain yang bisa berdampak besar terhadap rakyat sebuah negara. Peningkatan tanggung jawab pejabat pemerintahan ini adalah dengan melaporkannya kepada badan legislatif atau parlemen.⁶⁷

Dalam asal mula dan perkembangan dari jenis diplomasi yang juga disebut “diplomasi baru” ini, faktor ideologi juga telah memainkan peranan penting.⁶⁸ Timor Leste sebagai negara baru atau *Newly Independent States*-NISs secara general mengikuti ideologi serta tatanan pemerintahan dan kepemimpinan dari negara *superpower* (negara-negara yang dianggap Timor Leste “vokal” dan “bergigi” alias memiliki *power* yang kuat dalam kontestasi hubungan internasional) serta negara-negara yang pernah memiliki pengalaman atau ikatan historis kuat dengan Timor Leste. Amerika Serikat (AS) sebagai negara *superpower* dan Australia yang cukup “vokal” dalam kontestasi hubungan internasional dewasa ini sekaligus keduanya memiliki andil serta ikatan historis kuat dengan Timor Leste sejak masa-masa okupasi negara Indonesia terhadap Timor Leste di era tahun 1970an, lalu pada masa ketegangan disintegrasi Timor Leste dari Indonesia di penghujung tahun 1990an, dan hingga saat ini di masa Timor Leste telah lebih dari satu dasawarsa berdiri sebagai

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷K. Anatoliev, “*Modern Diplomacy*” hlm. 30, *Ibid.*, hlm. 101.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 85.

negara berdaulat penuh. Begitupun negara Portugal (disebut juga Portugis) dan Indonesia yang notabene pernah mengokupasi atau menguasai Timor Leste tentu sangat memiliki jalinan historis yang kuat dengan Timor Leste.

Melanjutkan uraian gagasan di atas, bahwa Timor Leste sebagai negara baru secara general mengikuti ideologi serta tatanan pemerintahan dan kepemimpinan dari negara AS dan Australia yang notabene memiliki *power* kuat dalam kontestasi hubungan internasional saat ini ditambah memiliki jalinan historis kuat dengan Timor Leste. Begitupun Timor Leste secara ideologis juga bercermin pada negara Indonesia dan Portugal yang notabene juga memiliki ikatan historis sangat kuat dengan Timor Leste. Keempat negara panutan Timor Leste tersebut relatif memiliki kesamaan ideologis serta tatanan pemerintahan dan kepemimpinan negaranya yaitu bersifat demokratis baik di dalam maupun luar negeri. Ditambah situasi keterbukaan, (demokrasi) serta multipolarisme relatif terjadi dewasa ini terutama sejak berakhirnya perang dingin yang beralih menjadi momentum globalisasi. Beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi Timor Leste sebagai *Newly Independent States*-NISs secara ideologis berorientasi pada demokrasi baik dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negeri maupun dalam hubungan eksternal lintas batas negara. Lantas negara Timor Leste yang bertipikal demokratis ini mempengaruhi karakter politik luar negerinya yang bertendensi pada diplomasi dengan karakter terbuka (diplomasi terbuka). Dari elaborasi inilah dapat ditunjukkan bahwa asal mula dan perkembangan dari jenis diplomasi terbuka, faktor ideologi juga telah memainkan peranan penting (refleksi dari contoh kasus diplomasi terbuka Timor Leste).

Diplomasi terbuka yang menjadi karakter strategi diplomasi Timor Leste untuk bergabung dan memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN termanifestasi pada UUD Republik Demokratis Timor Leste (RDTL) pasal 8, ayat 2 dan 4. Diplomasi terbuka Timor Leste ini juga tersirat pada lontaran pandangan dan pernyataan langsung para tokoh elit Timor Leste terkait kepentingan dan diplomasi akses Timor Leste di ASEAN dalam beberapa wawancara dan orasi mereka secara

terbuka yang dapat diakses oleh publik internasional melalui sekian media massa. Tendensi diplomasi terbuka Timor Leste tersebut terepresentasi dalam bentuk kegiatan kunjungan kenegaraan, adanya sejumlah hubungan kooperatif atau kerjasama mutual di berbagai bidang, dilakukan pembukaan institusi perwakilan diplomatik seperti kedutaan besar (kedubes) antara Timor Leste dengan negara-negara anggota ASEAN. Adapun diplomasi dapat diselenggarakan dalam pertemuan khusus atau konferensi umum.⁶⁹ Sebagaimana keikutsertaan Timor Leste dalam konferensi dan serangkaian agenda regional ASEAN maupun internasional yang kesemuanya secara transparan dapat diliput dan dipublikasikan luas oleh segala macam media massa dan menjadi perbincangan publik internasional tanpa intervensi pemerintahan Timor Leste.

Lebih jauh, sifat diplomasi Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN yang berorientasi terbuka (diplomasi terbuka) mendorong kebangkitan pendapat umum seiring dengan perkembangan sistem komunikasi. Pendapat umum telah memiliki pengaruh yang makin besar dalam hubungan internasional. Dalam merumuskan politik luar negeri suatu bangsa dan selama negosiasi diplomatik, kekuatan pendapat umum tak dapat diabaikan.⁷⁰ Masyarakat awam pun kini mulai menyadari akan pentingnya pendapat umum itu. Hal demikian menjadi satu keistimewaan dari diplomasi terbuka atau diplomasi baru.⁷¹ Pernyataan seorang diplomat di negara sendiri akan disiarkan secara instan oleh media luar negeri, penjelasan mengenai kebijakan yang diambil juga harus konsisten dan persuasif baik untuk pembaca domestik maupun luar negeri. Hal-hal ini telah menjadi kebutuhan politis.⁷²

Eksplanasi mengenai pernyataan seorang diplomat yang telah menjadi kebutuhan politis sebagaimana dipaparkan pada paragraf di atas berkorelasi dengan

⁶⁹Sukawarsini Djelantik, *Op. Cit.*, *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*, hlm. 4.

⁷⁰*Ibid.*, hlm.82.

⁷¹Lester B. Pearson (negarawan terkenal Kanada), *Diplomacy in the Nuclear Age, Ibid.*, hlm. 89-90.

⁷²*US Advisory Commission on Public Diplomacy*, "Public Diplomacy in a Changed World", Washington D.C, Oktober 1993 dalam Sukawarsini Djelantik, *Op. Cit.*, "Diplomasi: Antara Teori Dan Praktek", hlm. 18.

konsep diplomasi politik terkait dengan peranan para diplomat, pemimpin politik, serta aktor-aktor lain dalam melakukan diplomasi politik. Suatu agenda atau kepentingan negara terkadang dikemas dengan baik secara politis oleh diplomat. Kepentingan Timor Leste untuk membangun posisi tawar yang baik dalam tujuan memperoleh status keanggotaan ASEAN ini berkaitan erat dengan peranan para pemimpin politik serta diplomat Timor Leste dalam mengupayakan pencapaian kepentingan negara tersebut melakukan serangkaian upaya yang bertendensi pada diplomasi politik.

Secara persuasif dan *non-violence*, para pemimpin politik dan diplomat Timor Leste tersebut konsisten mengemas dan mensosialisasikan keinginan serta upaya *capacity building* Timor Leste untuk menjadi negara anggota penuh ASEAN melalui pernyataan maupun orasi yang diliput dan dipublikasikan media internasional; melalui partisipasi aktif di sekian forum regional dan internasional; melalui dialog dan negosiasi dengan petinggi maupun tokoh-tokoh penting dari negara-negara anggota ASEAN (untuk meraih dukungan dan bantuan guna melancarkan upaya Timor Leste menjadi negara anggota penuh di ASEAN).

Upaya diplomasi politik oleh para pemimpin politik dan diplomat Timor Leste seperti yang dipaparkan di atas berkorelasi dengan konsep diplomasi politik yang mengatur para aktor global untuk memfokuskan permasalahan melalui dialog dan negosiasi. Hal ini mendorong negara untuk mengadopsi teknik penyelesaian perkara melalui segala cara tanpa menggunakan kekerasan (*non-violence*). Maka diplomasi politik berkontribusi terhadap penciptaan dan pemeliharaan stabilitas perdamaian di dunia. Diplomasi politik mampu menggiring dan meningkatkan kesediaan, keyakinan antarnegara dalam suatu dialog, bukan konflik ataupun perang.

3.1.1 *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-39 dan Status *Observer* bagi Timor Leste: “Gerbang Awal” Upaya Diplomasi Timor Leste Di ASEAN

Timor Leste adalah salah satu negara baru yang berkeinginan untuk bergabung dengan ASEAN dimulai sejak Timor Leste mendapatkan pengakuan internasional pada tanggal 20 Mei 2002. Sejak saat itu, Timor Leste secara langsung menempatkan posisinya untuk terlibat dan mengambil bagian dalam komunitas ASEAN secara diplomatis. Upaya awal yang dilakukan Timor Leste yakni dengan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan, konferensi atau rapat antarnegara dalam naungan institusional ASEAN sebagai *observer* (pengamat). Pada kisaran Juli 2002, Timor Leste diundang ASEAN untuk menghadiri *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) yang ke-39 di Kuala Lumpur. Pertemuan tahunan antardelegasi (Menteri Luar Negeri-Menlu) dari negara-negara anggota ASEAN yang ke-39 tersebut bertemakan "*Forging A United, Resilient and Integrated ASEAN*" (“Memajukan ASEAN yang terintegrasi, bersatu, dan dinamis”). Tema acara tersebut dipilih untuk merefleksikan keinginan dan keputusan para negara anggota ASEAN untuk bergerak selangkah lebih maju ke depan mencapai tujuan bersama dari komunitas ASEAN.⁷³

Momentum acara AMM ke-39 yang membahas misi perluasan, solidaritas dan konsolidasi integrasi ASEAN yang diupayakan lebih besar, progresif dan dinamis ini dimanfaatkan oleh Timor Leste sebagai sarana atau sebutlah “gerbang awal” untuk “mengintroduksi identitas dan eksistensi diri”, mensosialisasikan sekaligus menegaskan misi politik luar negerinya yang diplomatis untuk mengakses dan berintegrasi dalam entitas asosiasi negara-negara di Asia Tenggara tersebut. Bersamaan dengan agenda ini sebagai tahapan formil awal, Timor Leste menandatangani aplikasi resmi untuk bergabung dalam ASEAN dan sejak saat itu

⁷³Malaysia Ministry of Foreign Affairs, "Press Release For The 39th Asean Ministerial Meeting / Post Ministerial Conferences/13th Asean Regional Forum, Kuala Lumpur, 24-28 July 2006", <https://www.kln.gov.my/archive/content.php?t=3& articleId=28743>, 17 Juli 2006. [Diakses pada tanggal 1 Maret 2014].

negara baru di Asia tenggara ini memperoleh status sebagai observer (pengamat) dalam setiap agenda dan proyek ASEAN.⁷⁴

Sekilas mengenai status observer (pengamat) dalam ASEAN, para pejabat ASEAN senior telah sepakat sejak tahun 1983 untuk memberikan status observer hanya kepada calon anggota ASEAN yang memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk keanggotaan ASEAN. Salah satu kriteria menyatakan hanya negara-negara di Asia Tenggara yang dapat bergabung di ASEAN.⁷⁵ Status observer ini digunakan oleh negara calon anggota penuh ASEAN untuk memasuki, mengenali, dan mensinergikan negara calon dengan “sendi-sendi” dan roda aktivitas institusional maupun kebiasaan dari ASEAN serta dengan setiap negara anggota ASEAN melalui beberapa proyek kerjasama, partisipasi dalam setiap pertemuan dan konferensi, kunjungan kenegaraan.

Pada agenda AMM ke-39 ini, ASEAN cukup menaruh atensi atas kehadiran Timor Leste dan menetapkan Timor Leste sebagai salah satu isu regional dan internasional yang menjadi pertimbangan dan kajian utama ASEAN ke depan terkait upaya perluasan ASEAN. Hal tersebut cukup menjadi stimulus awal bagi *policy-making* di ASEAN untuk melancarkan upaya awal diplomasi Timor Leste berintegrasi lebih jauh ke dalam ASEAN. Secara kontekstual, hal ini berkorelasi dengan esensi pokok diplomasi, yaitu diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintahan negara lain (atau institusi internasional lain) dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling menawarkan konsesi.⁷⁶

Konsensus ASEAN pada saat itu menyatakan setuju atas partisipasi Timor Leste dalam area fungsional dari sekian aktivitas ASEAN. Organisasi regional Asia Tenggara ini juga menyambut baik keputusan dan upaya Timor Leste ke depan untuk

⁷⁴People's Daily Online, “Timor-Leste hopes to join ASEAN”, http://english.peopledaily.com.cn/200607/24/eng20060724_286127.html, 15:35, July 24, 2006. [Diakses pada tanggal 27 Februari 2014].

⁷⁵Rodolfo Severino, “Southeast Asia in search of an ASEAN community: insights from the former ASEAN secretary-general”, *Institute of Southeast Asian Studies*, 2006, dalam *website Wikipedia* (Indonesia), *Perluasan ASEAN*, http://id.wikipedia.org/wiki/Perluasan_ASEAN, 5 April 2013, Pukul 22.58. [Diakses pada tanggal 23 Februari 2014].

⁷⁶*Op. Cit.*, Sukawarsini Djelantik, hlm. 4.

mengaksesi *Treaty of Amity and Cooperation-TAC* (Pakta Persahabatan dan Kerjasama) sebagai tahapan formil lebih lanjut untuk lebih mengabsahkan eksistensi dan partisipasi Timor Leste pada serangkaian acara dan kerjasama dalam kesatuan-institusional ASEAN (multilateral) maupun secara bilateral dengan sesama negara anggota ASEAN atau dengan berbagai partner dialog dan kerjasama ASEAN yang berasal dari negara-negara atau pihak-pihak lain yang non-anggota tetap (tidak berstatuskan keanggotaan penuh) di ASEAN.⁷⁷

3.1.2 Keikutsertaan Timor Leste dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF)

ASEAN Regional Forum (ARF) yang terbentuk sejak tahun 1994 merupakan forum dialog ASEAN yang bersifat formal atau resmi dan multilateral dalam lingkup region Asia Pasifik. Tujuan ARF adalah untuk mengembangkan dialog dan konsultasi; meningkatkan pembangunan kepercayaan (*promote confidence-building*); mengupayakan diplomasi preventif serta dialog dan kerjasama politik-keamanan sebagai pondasi untuk membangun perdamaian dan keamanan kawasan regional Asia Pasifik.⁷⁸ Timor Leste berpartisipasi dalam ARF pada tahun 2005 bersanding dengan seluruh anggota ASEAN dan sejumlah partisipan lainnya seantero Asia Pasifik serta terdapat pula partner dialog dari Kanada, Amerika Serikat dan Uni Eropa.⁷⁹ Pertemuan ARF ke-12 diselenggarakan pada 29 Juli 2005 di Vientiane (ibukota negara Laos), secara resmi menetapkan Timor Leste sebagai anggota ARF yang ke-25. Bersamaan dengan agenda ARF tersebut, Timor Leste menyatakan komitmennya

⁷⁷*ASEAN Human Rights Mechanism*, “*Joint Communique of the 39th ASEAN Ministerial Meeting (AMM), Kuala Lumpur, 25 July 2006, Forging A United, Resilient And Integrated Asean*”, <http://www.aseanhrmech.org/downloads/Joint%20Communique%20of%20the%2039th%20ASEAN%20Ministerial%20Mee.pdf>. [Diakses pada tanggal 1 Maret 2014].

⁷⁸Shawon Shyla (*Research Analyst at the Bangladesh Institute of Peace and Security Studies*), *ASEAN Regional Forum (ARF): What can Bangladesh expect from this security platform?*, [http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/164389/ipublicationdocument_singledocument/ce5778c9-0485-4542-8b2a-fcb4793e74f7/en/Focus-ARF\(1\).pdf](http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/164389/ipublicationdocument_singledocument/ce5778c9-0485-4542-8b2a-fcb4793e74f7/en/Focus-ARF(1).pdf), 2013. [Diakses pada tanggal 10 September 2013].

⁷⁹Disadur dari tulisan Ibnu Mashud Alkatiri (NIM 151 080 219)-Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” (UPN Veteran) Yogyakarta. *Hambatan Timor Leste Mendapatkan Status Keanggotaan Penuh ASEAN* (skripsi). <http://repository.upnyk.ac.id/4343/1/RESUME.PDF>, 2012. [Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013].

untuk ikutserta dan bekerjasama dengan segenap anggota ARF dalam mencegah dan melawan sejumlah permasalahan kemanan dan perdamaian yang mengancam regional Asia Pasifik seperti terorisme, distribusi dan proliferasi persenjataan nuklir-kimia-biologis dan kejahatan transnasional skala luas lainnya.⁸⁰

Dari sekian pengalaman keikutsertaan aktif Timor Leste dalam pertemuan ARF, akhirnya pada tahun 2011 Timor Leste memperoleh kehormatan dan hak istimewa (*privilege*) untuk menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan ARF yang ke-5, tepatnya diadakan pada tanggal 27-28 Januari 2011, berlokasi di Kementerian Luar Negeri Timor Leste, Pantai-Kelapa, Dili (ibukota negara Timor Leste). Lebih dari lima puluh para ahli dan tokoh terkemuka dari seluruh partisipan ARF hadir. Dengan diselenggarakannya pertemuan ARF ke-5 di negara demokrasi paling muda di Asia Tenggara ini, para delegasi dari negara-negara anggota ASEAN dapat secara langsung mengamati situasi teraktual dari negara ini pada saat itu.

Momentum Timor Leste yang bersedia menjadi tuan rumah ARF ke-5 ini mendemonstrasikan komitmen teguh Timor Leste untuk secara aktif berkontribusi terhadap kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan menunjukkan keinginan serta upaya serius untuk menjadi anggota ASEAN.⁸¹ Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta menyatakan bahwa dengan hadirnya para delegasi dari seluruh negara anggota ASEAN di Timor Leste untuk perhelatan acara pertemuan ARF ke-5 ini diharapkan dapat membantu mendorong negara-negara anggota tetap (berstatus keanggotaan penuh) ASEAN untuk lebih kooperatif dan meningkatkan dukungannya terhadap

⁸⁰Center for Nonproliferation Studies (CNS), "Asean Regional Forum (ARF)", <http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/arf.pdf>, 4 Oktober 2012. [Diakses pada tanggal 2 Maret 2014].

⁸¹Sependapat dengan pernyataan Dr. Marciano da Silva (Direktur Jenderal-Dirjen Untuk Kerjasama Dan Integrasi Regional serta ARF Senior Officials' Meeting Leader dari Timor -Leste) dalam *blog Ministério dos Negócios Estrangeiros-Timor Leste* (Kementerian Luar Negeri-Kemenlu Timor Leste), "The First Asean Regional Forum (ARF) Meeting In Timor-Leste", <http://mnerdtimorleste.blogspot.com/2011/02/first-asean-regional-forum-arf-meeting.html>, at 4:40 pm, Sunday, 13 February 2011. [Diakses pada tanggal 2 Maret 2014].

upaya Timor Leste untuk mampu memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN kelak.⁸²

3.1.3 Akses Timor Leste dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC)⁸³

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Pakta Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara) atau yang disingkat dengan ‘TAC’ ini merupakan instrumen perdamaian, keamanan dan kerjasama dalam hubungan antarnegara khususnya dalam kawasan regional Asia Tenggara. TAC merupakan mekanisme tetap dalam ASEAN yang harus ditandatangani dan dilaksanakan oleh berbagai negara atau berbagai pihak (lembaga) di seluruh dunia yang ingin mengakses, berintegrasi, dan berkepentingan untuk melakukan serangkaian kerjasama teknis-non teknis dengan ASEAN.⁸⁴

Sebagai tahapan lebih lanjut atas upaya diplomasi Timor Leste untuk lebih “mendekatkan diri” atau berintegrasi lebih sinergis dan mutual dengan ASEAN, Timor Leste memutuskan untuk menandatangani TAC pada tanggal 13 Januari 2007 Di Cebu, Filipina. Republik Demokratis Timor Leste telah mempertimbangkan Perjanjian tersebut, dan dengan mengaksesinya, Timor Leste siap berkomitmen untuk mentaati dan mengimplementasi semua ketentuan yang terkandung dalam TAC. Secara garis besar, sesuai dengan ketentuan TAC, Timor Leste bersumpah untuk meniadakan penggunaan kekuatan (*use of force*) dan memegang prinsip non-

⁸²Disadur dari situs berita *People's Daily Online*, “*ARF expected to help push Timor Leste full membership in ASEAN*”, <http://english.people.com.cn/90001/90777/90856/7273603.html>, 18:49, January 26, 2011. [Diakses pada tanggal 2 Maret 2014].

⁸³Disadur dari pernyataan resmi Jose Luis Guterres (*Minister of Foreign Affairs and Cooperation Democratic Republic of Timor Leste*), “*Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*”, dalam *website* resmi *ASEAN Secretariat*, <http://www.asean.org/news/item/instrument-of-accession-to-the-treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia>, 2012. [Diakses pada tanggal 2 Maret 2014].

⁸⁴Disadur dari *website* resmi UK Government-*Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs*, “*Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia [Treaty Series No. 43 (2012)]*”, <http://www.official-documents.gov.uk/document/cm84/8472/8472.pdf>, November 2012. [Diakses pada tanggal 3 Maret 2014].

intervensi atau non-campur tangan (*non-interference*) terhadap urusan internal dari seluruh negara anggota ASEAN.⁸⁵

Dengan mengaksesi TAC sebagaimana berbagai partner dialog ASEAN dan negara-negara non-anggota ASEAN lainnya yang mengaksesi TAC, Timor Leste hingga di masa mendatang berupaya menciptakan lingkungan kondusif yang diinginkan bersama untuk kelancaran pembangunan dalam regional Asia Tenggara yang tidak hanya akan menguntungkan ASEAN, melainkan juga para partner dialog dan berbagai pihak skala luas yang berafiliasi dengan ASEAN. Di samping itu, Timor Leste juga telah berupaya meyakinkan negara-negara anggota ASEAN untuk mengamandemen TAC yang semula mengakui keanggotaan ASEAN dengan 10 negara, agar di masa mendatang segera menjadi 11 negara dengan tujuan dan ekspektasi besar diakuisisinya Timor leste dalam keanggotaan dengan status penuh di ASEAN.

3.1.4 Pembukaan Kedutaan (Perwakilan) Timor Leste Di Negara-Negara Anggota ASEAN Dan Sekretariat ASEAN Di Timor Leste

Salah satu persyaratan untuk dapat diterima sebagai negara anggota ASEAN, negara pelamar keanggotaan tersebut harus mendirikan dan menjaga kedutaan di semua negara anggota blok regional Asia Tenggara tersebut⁸⁶, hal ini jelas berlaku pada konteks kasus Timor Leste. Negara paling muda di Asia Tenggara yang telah memperoleh status *observer* di ASEAN dan mengaksesi *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia* (TAC) secara otomatis memiliki dan menjalani hubungan diplomatis dengan 10 negara anggota ASEAN yang ada saat ini. Pada tahun 2006, Timor Leste tercatat memiliki kantor kedutaan di dua negara anggota ASEAN, yakni Indonesia dan Malaysia. Untuk Indonesia, selain terdapat kantor

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Sebagaimana yang diutarakan oleh Joao Camara (Direktur Urusan Regional dan Multilateral, Kementerian Luar Negeri Timor Leste), dalam artikel oleh R.Ravichandran, “*Timor Leste Hopes Asean Will Relax Conditions On Membership*”, <http://www.etan.org/et2006/july/29/25tlhope.htm>, Kuala Lumpur, July 25, 2013. [Diakses pada tanggal 3 Maret 2014].

perwakilan diplomatik (Kedutaan Besar-Kedubes), Timor Leste juga memiliki kantor atau instansi perwakilan konsuler (Konsulat Jenderal-Konjen) di Denpasar (Bali) dan di Kupang (Nusa Tenggara Timur-NTT). Kedutaan Timor Leste di Malaysia merangkap perwakilan resmi Timor Leste untuk Myanmar dan Vietnam. Pada kisaran tahun tersebut, untuk segera membuka instansi (kantor) kedutaan Timor Leste di negara-negara ASEAN lainnya menjadi tuntutan yang cukup sulit bagi negara yang dihuni oleh kurang dari satu juta orang ini akibat masih berada dalam atmosfer krisis politik domestik yang belum pulih hingga tahun 2006 tersebut.⁸⁷

Sampai pada tahun 2014, Timor Leste masih memiliki kantor atau instansi kedutaan besar (kedubes) di enam negara anggota ASEAN saja, seperti Indonesia dan Malaysia (berdiri sejak tahun 2006), Singapura (sejak tahun 2010), serta Filipina, Vietnam, dan Thailand (sejak tahun 2012). Kedutaan Timor Leste di Thailand merangkap urusan perwakilan Timor Leste untuk Kamboja dan Laos.⁸⁸ Pemerintah Timor Leste melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)-nya mengusahakan akan mendirikan empat instansi kedutaan baru pada tahun 2014 untuk segera memenuhi persyaratan keanggotaan ASEAN.⁸⁹ Roberto Soares (diplomata ternama Timor Leste) menambahkan bahwa Timor Leste berkomitmen akan memiliki instansi kedutaan yang merata di seluruh negara anggota ASEAN pada tahun 2017.⁹⁰

Di samping membuka instansi (kantor) perwakilan atau kedutaan besar, Timor Leste juga telah melakukan upaya diplomatis lainnya dengan membuka Sekretariat nasional ASEAN di ibu kota negara itu yaitu di Dili (Memorial Hall) pada awal bulan Februari 2009.⁹¹ Timor Leste melalui Pemerintahan ke-5 di tahun 2012 (5th

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Mohd Nasir Yusoff, "Timor Leste Preparing For Asean Membership", <http://etan.org/et2009/02february/08/02tlprep.htm>, February 02, 2009 23:03 PM. [Diakses pada tanggal 2 Maret 2014].

⁸⁹ Mario Filomeno da Costa Pinheiro (Senior program officer for The Asia Foundation in Timor-Leste), "Timor-Leste's Road to ASEAN", <http://asiafoundation.org/in-asia/2014/02/12/timor-lestes-road-to-asean/>, February 12, 2014. [Diakses pada tanggal 3 Maret 2014].

⁹⁰ ASEAN Secretariat, "Timor Leste remains steadfast to ASEAN aspiration", <http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/timor-lestes-remains-steadfast-to-asean-aspiration>, Friday, 07 December 2012. [Diakses pada tanggal 3 Maret 2014].

⁹¹ Julio Gil da Silva Guterres, B.A., (Director of Center for Investigative Journalists of Timor Lest- CJITL), "ASEAN Tanpa Timor Leste = Negara Tanpa KEDAULATAN",

constitutional government) di bawah rezim Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmao, telah menunjuk Dr. Roberto Soares, sebagai Sekretaris Negara Urusan ASEAN (*Secretary State for ASEAN Affairs*) dengan misi untuk mempersiapkan Timor Leste mengibarkan bendera-nya di samping 10 negara lainnya di sekretariat ASEAN yang pada tahun tersebut di bawah tuan rumah Kamboja.⁹²

Sekretariat ASEAN berlokasi di depan pantai utama Dili terdapat pusat pelatihan Teknologi Informasi (*Information Technology-IT training centre*) untuk pelatihan *skill* para pejabat, diplomat dan para praktisi hubungan luar negeri Timor Leste khususnya untuk urusan ASEAN. Pusat IT sebagai fasilitas utama Sekretariat ASEAN ini dibangun dengan bantuan finansial dari Korea Selatan sebagai salah satu negara partner dialog ASEAN (*Asean Dialogue Partners*). Timor Leste juga menghimbau *Asean Dialogue Partners* lainnya untuk membantu Sekretariat ASEAN lebih jauh dalam hal memberikan pelatihan bagi pejabat-pejabat diplomatik Timor Leste.

3.1.5 Pengajuan Aplikasi Formal Status Keanggotaan Penuh Di ASEAN Oleh Timor Leste

Setelah lebih dari satu windu berstatuskan observer di ASEAN sejak tahun 2002, Timor Leste mulai menunjukkan upayanya pada tataran lebih serius dan formal untuk menjadi negara anggota ASEAN ke-11. Timor Leste mengajukan permohonan berupa aplikasi formal status keanggotaan penuh di ASEAN pada tanggal 4 Maret 2011. Hal ini mengindikasikan adanya keinginan Timor Leste untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dan komitmen untuk bersinergi dan bekerjasama lebih jauh dengan ASEAN. Permohonan keanggotaan penuh ASEAN tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Timor Leste Zacaria Albano da Costa kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa di Sekretariat ASEAN-Jakarta (Indonesia)

<http://thepresidentpostindonesia.com/2012/12/03/asean-tanpa-timor-leste-negara-tanpa-kedaulatan/>, Dec 3, 2012. [Diakses pada tanggal 15 Oktober 2013].

⁹²*Ibid.*

karena pada saat itu ASEAN di bawah *Indonesian Chairman (Indonesia menjadi Tuan Rumah ASEAN 2011)*.⁹³

Upaya Timor Leste mengirimkan aplikasi formal untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN pada tahun 2011 tersebut berada di bawah keputusan Pemerintahan Konstitusional Keempat (*The Fourth Constitutional Government*) Timor Leste. Berlanjut pada tahun berikutnya paska dilaksanakan Pemilu Nasional Timor Leste tahun 2012, Pemerintahan Konstitusional Kelima (*The Fifth Constitutional Government*) Timor Leste yang resmi menjabat mulai 8 Agustus 2012 tetap mempertahankan keputusan dan komitmen Timor Leste untuk bergabung secara penuh di ASEAN melalui aplikasi formal keanggotaan ASEAN yang telah dikirim. *The Fifth Constitutional Government* Timor Leste yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Xanana Gusmao menegaskan bahwa keinginan dan upaya Timor Leste untuk menjadi negara anggota ASEAN (dengan status keanggotaan penuh) pada tataran lebih serius (yang ditunjukkan dengan penyerahan aplikasi formal keanggotaan penuh ASEAN), telah diatur dalam *Timor-Leste Strategic Development Plan 2011-2030* (Rencana Pembangunan Strategis Timor Leste tahun dalam jangka waktu 2011-2030).⁹⁴

Paska pengajuan formal Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN, negara-negara anggota ASEAN masih mempelajari, merundingkan dan terus membicarakan permohonan tersebut pada pertemuan-pertemuan antarnegara anggota ASEAN. Perundingan antarnegara anggota ASEAN ini sangat penting karena berdasarkan Piagam ASEAN pasal 6, ayat 3, penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus di antara negara anggota oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN.⁹⁵ Aplikasi

⁹³Julio Gil da Silva Guterres, B.A, *Op. Cit.*, "ASEAN Tanpa Timor Leste = Negara Tanpa KEDAULATAN".

⁹⁴*Timor-Leste Strategic Development Plan 2011-2030*, Dili, , http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2012/02/Strategic-Development-Plan_EN.pdf , July 2011, dalam *Democratic Republic of Timor-Leste 2013 Development Partners' Meeting BACKGROUND PAPER IMPLEMENTING THE STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN DILI, TIMOR-LESTE 18-20 June 2013*, <http://www.laohamutuk.org/econ/13TLDPM/BG15Jun2013en.pdf>.

⁹⁵Sjamsumar Dam & Riswandi, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan Dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995 dalam skripsi karya Ibnu Mashud Alkatiri (NIM 151 080 219)-Jurusan Ilmu Hubungan

formal keanggotaan ASEAN yang diajukan Timor Leste sejak 2011 masih terus dikaji, dievaluasi, dan dipertimbangkan dengan seksama oleh tim kerja *ad hoc* ASEAN yang membidangi urusan terkait yaitu *ASEAN Coordinating Council Working Group* (ACCWG). Perihal pengkajian aplikasi formal tersebut, ACCWG tidak menetapkan batas waktu tertentu ihwal sampai kapan keputusan diterima atau ditolaknya Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN itu ditetapkan.

3.1.6 Hubungan Diplomatik Timor Leste Dengan Negara-Negara Anggota ASEAN

3.1.6.1 Hubungan Timor Leste-Indonesia

Pada tataran praktis, salah satu upaya diplomasi Timor Leste untuk menjadi negara anggota ASEAN ke-11 termanifestasi dalam melakukan pendekatan atau membangun relasi bilateral dengan setiap negara anggota ASEAN yang diupayakan secara terbuka dan kooperatif (diplomasi terbuka). Negara anggota ASEAN yang paling intens menjadi partner diplomatik Timor Leste paska Timor Leste berdiri sebagai negara berdaulat adalah Indonesia. Negara yang pernah menjadikan Timor Leste sebagai wilayah Provinsinya yang ke-27 merupakan partner utama dan strategis Timor Leste untuk meraup dukungan agar mempermudah Timor Leste diterima menjadi negara anggota ASEAN. Di sini ‘diplomasi pragmatis’ Timor Leste bekerja ditunjukkan dengan upaya diplomasi Timor Leste mengesampingkan dan merekonsiliasi “luka lama” hubungan Timor Leste-Indonesia seperti masa-masa peristiwa okupasi negara Indonesia terhadap Timor Leste di tahun ‘70an sampai dengan momen disintegrasi Timor Leste dari wilayah kedaulatan negara Indonesia yang diiringi dengan tragedi-tragedi ‘berbau’ pelanggaran HAM dan dituduhkan pada

aparatus militer Indonesia pada masa-masa menjelang berakhirnya Timor Leste sebagai wilayah Provinsi Indonesia ke-27 tersebut.

Seiring berjalannya waktu setelah situasi perlahan mulai kondusif, Timor Leste mulai menjalin kemitraan hangat dengan Indonesia. Hubungan kerjasama kedua negara mulai dibangun terutama dalam bidang perdagangan sehubungan dengan proses pembangunan awal Timor Leste sebagai negara baru. Timor Leste sangat membuka pintu seluas-luasnya bagi kegiatan ekspor-impor dan investasi dari Indonesia secara mutual bagi kedua negara. Pada 21 Juni 2013, Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 21 Juni 2013 membicarakan posisi tawar berkelanjutan dari relasi dagang kedua negara di mana volume perdagangan Indonesia-Timor Leste meningkat dalam beberapa tahun terakhir serta kedua negara sepakat melakukan pertukaran informasi yang sekiranya mampu meningkatkan kapabilitas perekonomian khususnya bagi Timor Leste sebagai negara yang baru berdiri di kawasan Asia Tenggara.⁹⁶

Dalam pertemuan bilateral yang diselenggarakan di Istana Merdeka-Jakarta tersebut, kedua negara juga menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang penanganan visa dan paspor diplomatik. Begitupun kedua negara membahas persoalan mutual mengenai perikanan; pertanian; pendidikan; kehutanan; transportasi. Untuk persoalan kemanan (keamanan perbatasan), kedua negara sepakat untuk melakukan penegakan hukum ketat di wilayah perbatasan tepatnya di wilayah Belu, khususnya untuk menangkalkan kasus imigran ilegal dan penyelundupan yang rawan terjadi.⁹⁷

Upaya diplomasi Timor Leste yang sekaligus sebagai upaya rekonsiliasi hubungan Timor Leste-Indonesia ini, secara signifikan mampu menggugah

⁹⁶Disadur dari *Jakarta Post - June 20, 2013*, "Timor Leste, Indonesia to cooperate on border security", dalam *website Asia Pacific Solidarity Network (East Timor News Digest 6 – June 1-30, 2013)*, <http://www.asia-pacific-solidarity.net/southeastasia/easttimor/netnews/2013/end06v12.htm>, 2013. [Diakses pada tanggal 19 Oktober 2013].

⁹⁷*Ibid.*

dukungan Indonesia atas permohonan status keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Upaya pendekatan bilateral Timor Leste terhadap Indonesia membuahkan hasil berupa sikap Indonesia yang bersedia menjadi ‘suporter kunci’ atas kebijakan luar negeri utama Timor Leste untuk menjadi negara anggota ke-11 di ASEAN. Paska Timor Leste mengajukan aplikasi formal keanggotaan ASEAN pada tahun 2011, Presiden Indonesia SBY, menyatakan bahwa secara geopolitik dan geoekonomi, Timor Leste layak memperoleh keanggotaan penuh ASEAN.⁹⁸ Presiden SBY dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Marty Natalegawa menambahkan bahwa Indonesia akan terus berupaya keras membantu Timor Leste merealisasikan visi menjadi anggota ASEAN. Indonesia menyambut baik penunjukan Dr. Roberto Soares sebagai ‘Menteri Junior’ Timor Leste untuk Urusan ASEAN dalam Kabinet Perdana Menteri Xanana Gusmao yang resmi terbentuk pada tahun 2012, yang menunjukkan keseriusan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN.⁹⁹

Upaya diplomasi Timor Leste yang terbuka, persuasif, berusaha menggerakkan opini publik ditunjukkan ketika Timor Leste menghadiri *the 5th Bali Democracy Forum* pada tanggal 8 November 2012 yang diselenggarakan oleh negara Indonesia tepatnya di Provinsi Bali. Di muka forum tersebut, pemimpin negara Timor Leste menegaskan hal sebagai berikut:¹⁰⁰

“Timor-Leste is on the verge of joining the Association of Southeast Asian Nations, which entails both challenges and opportunities. Once we are accepted as a fully-fledged member of ASEAN, we will become a closer part of this global economic transition and be able to engage more actively in the strategic agenda of regional development. Timor-Leste is committed to seizing the opportunities of the Asian Century which will see increased economic demand in the region. We will do this by developing our industries, our fisheries and our agriculture, by expanding our markets and by developing our tourism sector.”

⁹⁸Michael Leach (associate professor of politics and public policy at Australia’s Swinburne University researching Timor-Leste politics), “Global Insider: ASEAN Membership a Priority for Timor-Leste as Regional Relationships Grow”, <http://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines>, 16 September 2013. [Diakses pada tanggal 2 Maret 2014].

⁹⁹*Op. Cit.*, Julio Gil da Silva Guterres, B.A., “ASEAN Tanpa Timor Leste = Negara Tanpa KEDAULATAN”

¹⁰⁰*Ibid.*

Pernyataan PM Xanana Gusmao di atas yaitu menyatakan bahwa Timor Leste berada di ambang bergabung menjadi anggota ASEAN, dengan tantangan dan peluang yang mengiringi. Timor Leste berusaha meyakinkan publik bahwa sekali Timor Leste diterima sebagai anggota dengan status keanggotaan penuh di ASEAN, negara ini akan menjadi bagian yang lebih dekat dengan transisi ekonomi global dan mampu berpartisipasi lebih aktif dalam agenda pembangunan regional strategis. Timor Leste berkomitmen untuk mencapai peluang dalam momentum *the Asian Century* ('Abad Asia') dan siap dengan tuntutan peningkatan perekonomian di regional Asia Tenggara. Timor Leste akan mewujudkannya dengan melakukan pembangunan industri, perikanan, pertanian, melakukan ekspansi pasar dan sektor pariwisata.

3.1.6.2 Hubungan Timor Leste-Thailand

Berikutnya, negara anggota ASEAN kedua yang menjadi mitra hangat Timor Leste sejak merdeka adalah Thailand. Kedua negara selalu berupaya untuk menguatkan sikap saling percaya secara mutual (*mutual trust*); saling memahami (*understanding*); persahabatan; dan kerjasama. Hal tersebut disampaikan oleh kedua negara dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Thailand yang diliput secara terbuka oleh berbagai media ketika Mr. Abhisit Vejjajiva, Perdana Menteri Thailand menjamu Dr. José Ramos-Horta, Presiden Timor Leste yang mengunjungi Thailand selama 11-13 Januari 2009.¹⁰¹ Timor Leste dan Thailand saling mengungkapkan kepuasan atas hubungan diplomatik yang dibangun selama tujuh tahun dan semakin berkembang terlebih Timor Leste telah membuka kantor perwakilan (kedutaan) di Bangkok, ibukota Thailand.

¹⁰¹Disadur dari *website resmi Royal Thai Government (Government Spokesman Bureau-Foreign Relations Division)*, "Statement by Mr. Abhisit Vejjajiva Prime Minister of the Kingdom of Thailand at the Press Conference on the occasion of the official visit to Thailand of President of the Democratic Republic of Timor-Leste", <http://www.thaigov.go.th/en/speech-a-press-release/item/57351-statement-by-mr-abhisit-vejjajiva-prime-minister-of-the-kingdom-of-thailand-at-the-press-conference-on-the-occasion-of-the-official-visit-to-thailand-of-president-of-the-democratic-republic-of-timor-leste.html>, 2012. [Diakses pada tanggal 7 Maret 2014].

Thailand terus mendukung Timor Leste dalam berbagai upaya yang mungkin dilakukan untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan. Untuk mendukung hal tersebut, Thailand sepakat untuk memperdalam kooperasi (kerjasama) multibidang dengan Timor Leste. Kedua negara kerap membahas berbagai kerjasama bilateral, khususnya kerjasama teknis, agrikultur (pertanian), dan energi. Thailand berkomitmen untuk memberikan bantuan bagi Timor Leste dalam bidang-bidang yang Thailand kuasai. Pada pertemuan bilateral kedua negara tahun 2009 tersebut, Kemenlu Thailand menandatangani ekstensi dari MoU tentang Kerjasama Teknis dan Ekonomi. Thailand mengirim delegasi menuju Dili (ibukota negara Timor Leste) untuk mendiskusikan detail-detail dan meninjau ulang area-area kerjasama yang disepakati. Sementara, untuk menindaklanjuti kerjasama energi, Timor Leste dan Thailand menandatangani MoU “*Joint Cooperation in Energy Development between PTT Public Company Limited of Thailand and the Secretary of State for Natural Resources of Timor-Leste*” (Kerjasama Gabungan di bidang pengembangan energi antara *PTT Public Company Limited*-Thailand dan Sekretariat Negara Bidang Sumber Daya Alam-Timor Leste).¹⁰²

Pada masa Thailand mendapuk sebagai Ketua ASEAN di tahun 2012 (*the Chair of ASEAN 2012*) Presiden Thailand menyatakan dukungan bagi misi Timor Leste untuk segera menjadi anggota ASEAN. Untuk mendukung keaktifan Timor Leste dalam agenda pertemuan ASEAN di tahun 2012, Thailand mengundang Timor Leste untuk menghadiri *42nd ASEAN Ministerial Meeting (AMM)*, *the 2nd Asia-Pacific Water Summit*, *16th ASEAN Regional Forum* di Thailand sepanjang tahun 2012 tersebut. Timor Leste mengapresiasi bantuan Thailand yang berkelanjutan dalam memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang ASEAN melalui pertukaran dan program pelatihan yang tepat untuk Timor-Leste seperti yang telah dilakukan setiap tahun selama tiga tahun terakhir sampai tahun 2012 tersebut.¹⁰³

¹⁰²*Ibid.*

¹⁰³*Ibid.*, disampaikan oleh Presiden Timor Leste Dr. José Ramos-Horta.

Setahun setelah Timor Leste menyerahkan aplikasi formalnya untuk memohon status keanggotaan penuh ASEAN, Timor Leste tetap berupaya ‘mendekatkan diri’ dan mengkonsolidasi dukungan dari Thailand. Sebagaimana pada bulan Februari 2012, Menlu Timor Leste Zacarius Albano da Costa menemui PM Thailand Yingluck Shinawatra untuk meminta nasihat sekaligus mengkonsolidasi dukungan perihal keanggotaan ASEAN serta meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Pada agenda tersebut, Timor Leste mengundang perwakilan dari Thailand untuk menghadiri peringatan Kemerdekaan Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2012. Undangan tersebut dibalas pula oleh undangan Thailand kepada Timor Leste untuk menghadiri *the World Economic Forum on East Asia* di Bangkok selama 31 Mei-1 Juni 2012.¹⁰⁴

Pada momen kunjungan kenegaraan di tahun 2012 tersebut, secara resiprokal, Timor Leste mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kemitraan hangat yang dibangun bersama Thailand sejak masa awal timor Leste merdeka serta atas dukungan Thailand tiada henti terhadap upaya Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Sementara, Thailand mengucapkan terima kasih atas bantuan Timor Leste kepada Thailand selama dilanda krisis bencana banjir pada tahun 2011. Kedua negara lantas berlanjut mendiskusikan bantuan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Thailand kepada Timor Leste. Diskusi tersebut dilakukan oleh Menlu masing-masing negara, yakni Albano da Costa (Menlu Timor Leste) dan Surapong Tovichakchaikul (Menlu Thailand).¹⁰⁵

Thailand yang merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang mengirimkan bantuan tenaga militer dan polisi untuk *United Nations mission* (pasukan misi perdamaian PBB) selama terjadi krisis politik domestik di Timor-Leste ini, merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Timor Leste dan membangun hubungan diplomatik dengan Timor Leste sejak tahun 2002. Timor

¹⁰⁴Disadur dari laporan Yamei Wang dalam situs berita online “Xinhua” (*english.news.cn*), “Timor Leste seeks Thailand’s support to join ASEAN”, http://news.xinhuanet.com/english/world/2012-02/08/c_131398893.htm, 2012-02-08 17:04:04. [Diakses pada tanggal 5 Maret 2014].

¹⁰⁵*Ibid.*

Leste dan Thailand yang telah menjalani hubungan dekat dan kooperatif tidak terlepas dari peranan diplomasi pembangunan Thailand (*Thailand's development diplomacy*) yang diimplementasikan melalui kerjasama teknis di bawah naungan *Thailand International Development Cooperation Agency* (TICA) atau Badan Kerjasama Pembangunan Internasional milik negara Thailand.¹⁰⁶

3.1.6.3 Hubungan Timor Leste-Filipina

Negara Asia Tenggara ketiga yang menjadi mitra diplomatik Timor Leste yaitu Filipina. Pada masa-masa awal kemerdekaan Timor Leste, ketika beberapa negara masih butuh beberapa waktu untuk mengakui kedaulatan negara Timor Leste, Filipina sudah terlebih dahulu memulai hubungan diplomatik dengan Timor Leste. Sudah sejak dini, Filipina dan Timor Leste membuka perwakilan (kedutaan) antar kedua negara, yaitu Filipina membuka perwakilan di Dili (ibukota Timor Leste), Timor Leste membuka perwakilan di Manila (ibukota Filipina). Sejak saat itu sekian hubungan koooperatif diselenggarakan kedua negara.

Pada tahun 2008, dalam tataran kerjasama yang lebih matang, Timor Leste dan Filipina menandatangani tiga perjanjian untuk mendorong kerjasama dalam bidang kelautan dan perikanan, pendidikan, dan pelatihan layanan luar negeri (*foreign service training*). Eks-Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo dan eks-Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta menyaksikan penandatanganan pakta tersebut selama pertemuan bilateral mereka. Pemerintah Filipina mengupayakan akan meningkatkan transaksi dan perdagangan dengan negara Timor Leste dan juga mengusahakan diselenggarakannya pertukaran budaya dan pendidikan.¹⁰⁷

Pada tahun 2010, Ketika Filipina memiliki Presiden yang baru terpilih yaitu Presiden Benigno Aquino III, Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta memiliki ekspektasi agar terjadi peningkatan hubungan diplomatik dan hubungan dagang serta

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷Disadur dari artikel berita oleh Sahil Nagpal (*TopNews-India*) ,“*Philippines, East Timor sign three agreements to boost relations*”, <http://www.topnews.in/philippines-east-timor-sign-three-agreements-boost-relations-258515>, Tue, 08/12/2008-15:03. [Diakses pada tanggal 6 Maret 2014].

investasi antara Filipina dengan Timor Leste yang lebih besar di bawah rezim Benigno III tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Menlu Timor Leste Jose Luis Guterres bersama partner diplomatiknya yaitu Albert del Rosario untuk mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Benigno Aquino III selama kunjungan diplomatik Timor Leste di Manila.¹⁰⁸

Timor Leste menyatakan bahwa telah banyak mengimpor banyak barang dari Indonesia, Australia, dan Cina namun sangat sedikit impor dari Filipina. Ketika pemerintah Timor-Leste mengunjungi Presiden Aquino serta jajaran pejabat lainnya di Istana Malacanang (Filipina) pada awal Juni 2010, Presiden Ramos Horta berujar secara persuasif bahwa negara Timor Leste merupakan pasar yang sangat terbuka dan telah terdapat beberapa perusahaan konstruksi milik Filipina yang beroperasi. Presiden Horta juga mempromosikan bahwa Timor Leste telah mendorong pendapatan negara mencapai 200 juta Dolar AS yang berasal dari sumberdaya migas sebagai komoditi ekspor utama Timor Leste dan sampai dengan tahun 2010, perekonomian Timor Leste telah tumbuh sebesar 10 persen. Horta mengeluarkan pernyataan diplomatiknya lagi bahwa negeri Timor telah sangat aman dan stabil pada saat itu dengan bantuan dari PBB di mana Filipina berkontribusi di dalamnya. Di lain kesempatan yang terpisah, Presiden Ramos Horta selalu terbuka dan mengundang Presiden serta pejabat-pejabat atau berbagai pihak terkait untuk mengunjungi Timor Leste dan melakukan segala aktivitas diplomatik.

Pada awal Juni 2013 silam, Presiden Benigno Aquino III kembali menyambut kunjungan diplomatik Timor Leste yang digawangi oleh PM Kay Rala Xanana Gusmao di Istana Malacanang, Filipina selama empat hari. Kunjungan diplomatik ini merupakan bagian dari program negara Timor Leste untuk mengunjungi seluruh negara anggota ASEAN pada tahun 2013 guna memperkuat ikatan bilateral dan regional dengan negara-negara tetangga. Presiden Aquino III dan PM Gusmao

¹⁰⁸Disadur dari artikel berita oleh Amita Legaspi (GMANews.TV), “*Stronger trade, diplomatic relations seen between East Timor, Philippines*”, <http://www.gmanetwork.com/news/story/194974/news/nation/stronger-trade-diplomatic-relations-seen-between-east-timor-philippines>, July 1, 2010 7:25pm. [Diakses pada tanggal 6 Maret 2014].

mengafirmasi relasi kuat kedua negara dan memfokuskan upaya solidaritas dan kerjasama yang lebih besar di Asia Tenggara. Pada saat yang bersamaan, kedua negara melaksanakan penandatanganan beberapa perjanjian di bidang pendidikan, pertahanan, pembangunan infrastruktur, dan perdagangan.¹⁰⁹

Di sela-sela pertemuan bilateral tersebut, Presiden Aquino III tak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan dana Timor Leste sebesar 750000 Dolar AS yang disalurkan untuk membantu para korban badai *Typhoon "Pablo"* yang menyerang Filipina bagian selatan di tahun 2012. Orang nomor satu di Filipina tersebut juga menegaskan sikapnya untuk terus mendukung Timor Leste agar segera memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN serta menegaskan kesetiaan Filipina untuk selalu menguatkan kerjasama dengan Timor Leste dalam memajukan dialog regional demi stabilitas dan pembangunan berkelanjutan regional, sebagai berikut:¹¹⁰

"On this note, allow me to express the Philippine's support for Timor-Leste's bid to join the Asean (Association of Southeast Asian Nations) community. We look forward to working more closely with you in the future in advancing regional dialogue, which we know will redound not only to the growth of our peoples and our countries, but will also contribute to the stability and continued development of our region".

Pernyataan dukungan Filipina atas keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN yang senada sempat dinyatakan Filipina pula dalam *22nd ASEAN Summit* di Brunei Darussalam pada akhir April 2013 silam. Presiden Aquino III dan para pemimpin negara anggota ASEAN lainnya menyatakan dukungan terhadap Timor Leste untuk segera bergabung menjadi negara anggota ASEAN ke-11.¹¹¹

Pada pertemuan bilateral tersebut, para Menlu kedua negara lanjut menandatangani MoU dan Konsultasi Kebijakan, yang ditujukan untuk menciptakan mekanisme bilateral antara kelembagaan kedua negara berlandaskan kepentingan

¹⁰⁹Disadur dari situs berita online "*Sun Star*" (Filipina), "*Philippines, Timor-Leste affirm strong relations; 3 pacts inked*", <http://www.sunstar.com.ph/breaking-news/2013/06/06/philippines-timor-leste-affirm-strong-relations-3-pacts-inked-286092>, *Thursday, June 6, 2013*. [Diakses pada tanggal 6 Maret 2014].

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹ *Op. Cit.*, *Philippine Daily Inquirer*, "*Timor-Leste leader thanks Philippines for backing Asean bid*", *June 7, 2013*, dalam *Asia Pacific Solidarity Network (East Timor News Digest 6 – June 1-30, 2013)*.

dialog dan pertukaran pandangan secara bilateral, regional, dan internasional atas kepentingan bersama yang mutual. MoU ini akan menentukan kerjasama antara Filipina dan Timor Leste dalam *capacity building* berbagai khususnya dalam bidang pengembangan infrastruktur dan pendidikan.¹¹²

Adapun, sebagai upaya diplomasi terbuka Timor Leste terhadap publik luas, selama melakukan kunjungan di Filipina, PM Gusmao melaksanakan agenda untuk memberikan kuliah tamu di *University of the Philippines* yang bertajuk “*Peace and Reconciliation: Timor-Leste experience*” (“Perdamaian dan Rekonsiliasi: pengalaman Timor Leste”). PM Gusmao tentunya dapat menjumpai kalangan akademisi atau *civitas academica* di kampus tersebut terlebih beliau dapat bertemu dengan mahasiswa/i berkewarganegaraan Timor Leste.¹¹³

3.1.6.4 Hubungan Timor Leste-Kamboja

Berlanjut pada negara anggota ASEAN keempat yang bermitra hangat dengan Timor Leste adalah Kamboja. Negara “Indochina” ini menerima kunjungan diplomatik dari Timor Leste di mana Timor Leste baru setahun menjalani masa ‘independen’-nya. Dr. Ramos Horta, seorang Menteri Luar Negeri dan Kerjasama dari Negara Timor Leste pada era awal Timor Leste merdeka, bertandang ke Istana Kerajaan Kamboja pada tanggal 3-7 Maret 2003. Kunjungan delegasi pemerintahan Timor Leste tersebut disambut dengan penuh kehangatan dan penghormatan oleh Raja Kamboja (Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk), PM Kamboja (Samdech Hun Sen), serta Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional dari negara Kamboja (H.E. Mr. Hor Namhong).¹¹⁴

¹¹²*Ibid.*

¹¹³*Government of Timor Leste (Minister of State and of the Presidency of the Council of Ministers and Official Spokesperson for the Government of Timor-Leste)*, “*Singapore and the Philippines express support for Timor-Leste’s bid for ASEAN membership after Official visits*”, <http://timor-leste.gov.tl/?p=8411&lang=en>, Dili, June 19, 2013. [Diakses pada tanggal 5 Maret 2014].

¹¹⁴*Kingdom of Cambodia (Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation)*, “*Visit to Cambodia by Timor-Leste Foreign Minister*”, <http://www.mfaic.gov.kh/Products/1903-visit-to-cambodia-by-timor-leste-foreign-minister.aspx>, 2014. [Diakses pada tanggal 7 Maret 2014].

Selama pertemuan bilateral tersebut, Menlu Kamboja Namhong melakukan *sharing* atau pertukaran informasi dan pandangan dengan Ramos Horta mengenai situasi negeri Kamboja, khususnya ihwal pemberantasan kemiskinan dan proses reformasi yang dilakukan pemerintah Kamboja di mana sekiranya dapat menjadi referensi Timor Leste dalam menjalankan pemerintahannya yang baru ‘seumur jagung’. Berkenaan dengan Timor Leste yang berstatuskan observer dalam ASEAN dan adanya upaya permohonan Timor Leste atas keanggotaan *ASEAN Regional Forum* (ARF), Menlu Namhong memberitahukan bahwa Kamboja tidak akan menentang Timor Leste jika memang terdapat konsensus di antara negara anggota ASEAN mengingat Timor Leste sendiri telah jelas secara geografis dan geopolitik terletak di Asia Tenggara.¹¹⁵

Pada momen pertemuan kedua negara tersebut, Dr. Jose Ramos-Horta bersikap diplomatis dengan mengutarakan apresiasinya kepada Kamboja yang dinilai sukses menyelenggarakan atau sebagai tuan rumah perhelatan *ASEAN Summit* yang tidak lama telah digulir pada saat itu. Horta juga menyatakan dukungannya atas kandidasi Kamboja dalam *International Criminal Court* (ICC) serta tak luput ucapan terima kasih diutarakan Horta atas ‘sokongan’ Kamboja terhadap status observer Timor Leste di ASEAN.¹¹⁶

Tujuh tahun kemudian, setahun sebelum Timor Leste mengirimkan aplikasi formalnya sebagai permohonan status keanggotaan penuh ASEAN, Pemerintah Timor Leste bertandang ke Phnom Penh (ibukota negara Kamboja) untuk mendiskusikan akses potensial Timor Leste dalam ASEAN. Pemerintah Timor Leste kala itu direpresentasikan lagi oleh Ramos Horta yang pada tahun 2010 tersebut menjabat sebagai Presiden Timor Leste ke-2 menemui PM Kamboja Hun Sen dan Menlu Kamboja Nor Namhong yang notabene tetap merespon positif upaya Timor

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶*Ibid.*

Leste untuk masuk menjadi anggota ASEAN.¹¹⁷ Presiden Ramos Horta meyakinkan PM Hun Sen mengenai situasi Timor Leste teraktual saat itu, di mana terdapat pertumbuhan ekonomi yang telah mencapai sepuluh persen sejak tahun 2007 dan Timor Leste tidak memiliki hutang luar negeri, melainkan terdapat surplus anggaran yang didepositkan (disimpan) di bank.¹¹⁸

Dukungan Kamboja ini menjadi penting bagi Timor Leste yang pada saat itu akan memantapkan aplikasinya untuk keanggotaan ASEAN karena Kamboja akan mendapat giliran *ASEAN chairmanship* (keketuaan dalam ASEAN) pada tahun 2012. Menteri Informasi sekaligus Juru Bicara (Jubir) pemerintahan Kamboja, Khieu Kanharith, menyatakan bahwa Kamboja tidak akan mengambil sikap sampai pemerintah Indonesia yang notabene pernah menguasai penuh Timor Leste mempublikasikan posisinya terkait misi dan upaya Timor Leste menjadi anggota penuh ASEAN. Pada saat itu, Ramos Horta pun menanggapi dan menegaskan bahwa Indonesia telah menjadi supporter paling aktif atas misi Timor Leste dalam keanggotaan ASEAN dan sejauh ini mengirimkan perwakilan untuk memberikan masukan (*advise*) kepada pemerintahan Timor Leste terkait proses menuju keanggotaan ASEAN. Presiden Horta pun secara persuasif dan berusaha menggerakkan opini publik agar pro-Timor Leste segera menjadi anggota ASEAN, dengan menambahkan penegasan sebagai berikut:¹¹⁹

“If Indonesia supports East Timor becoming a member of Asean then why should any other Asean country be against it?”

Kurang lebih, maksud penegasan Horta di atas yaitu bahwa jika Indonesia saja mendukung Timor Leste menjadi anggota ASEAN, lalu mengapa negara-negara anggota ASEAN lainnya menentanginya. Selain itu, Horta juga menambahkan bahwa

¹¹⁷Disadur dari *The Cambodia Daily*, “*East Timor Gets Cambodian Support for Asean Bid*”, 23 April 2010 dalam situs resmi *International Peace Foundation*, http://peacefoundation.net.7host.com/article_detail.asp?id=615, 2010. [Diakses pada tanggal 7 Maret 2014].

¹¹⁸Disadur dari artikel berita oleh Sokmom Nimulsitus dalam situs berita online *Agence Kampuchea Press* (AKP), “*Cambodia Fully Supports Timor-Leste to Become ASEAN Member*”, <http://www.akp.gov.kh/?p=4190>, 2010. [Diakses pada tanggal 7 Maret 2014].

¹¹⁹*Op. Cit.*, *The Cambodia Daily*, “*East Timor Gets Cambodian Support for Asean Bid*”.

PM Hun Sen dan Menlu Namhong menyetujui bahwa Timor Leste sebenarnya memenuhi syarat untuk keanggotaan ASEAN karena letaknya di Asia Tenggara dan telah berupaya menciptakan stabilitas politik dan ekonomi selama lima tahun terakhir (sampai pada tahun 2010 ketika kunjungan bilateral ini berlangsung).

Ramos Horta lanjut meyakinkan bahwa Timor Leste mengalami pertumbuhan ekonominya cukup signifikan yang ditopang oleh pendapatan dari sektor migas yang bersumber di Laut Timor. Sehubungan dengan hal itu, Presiden Ramos Horta melakukan *sharing* dan memberikan *advise* kepada pemerintah Kamboja yang mulai mengawasi atau serius mengelola pengeboran ladang minyak lepas pantai Kamboja. Horta menjelaskan bahwa suatu hal yang krusial (penting) bagi Kamboja untuk belajar dari pengalaman Timor Leste, sebab Kamboja akan segera menjadi bangsa produsen migas dan membutuhkan regulasi serta aturan hukum yang ketat sebagaimana Timor Leste yang juga berupaya demikian mengikuti jejak negara-negara produsen migas besar seperti Venezuela, Meksiko, dan Nigeria.¹²⁰

Tiga minggu paska Timor Leste mengirimkan aplikasi formal keanggotaan ASEAN pada 4 Maret 2011, negara ini melakukan kunjungan kenegaraan kembali ke Kamboja pada tanggal 30 Maret 2011. Saat itu Kamboja tidak henti mengutarakan dukungannya kepada Timor Leste ditunjukkan dengan pernyataan politik dari PM Kamboja Hun Sen, bahwa keikutsertaan Timor Leste adalah untuk merefleksi kesamaan hak sebagai negara anggota di kawasan Asia Tenggara dan tidak seharusnya serta tidak akan menjadi beban bagi ASEAN. Pernyataan PM Hun Sen yang paling ‘menyentuh’ tersebut yakni sebagai berikut:¹²¹

“Cambodia’s support is regardless Timor-Leste is a small or big, poor or rich country, but to reflect the equal rights of the countries in the region. Timor-Leste will take its rightful place as the 11th member”.

Selain itu, PM Kamboja juga menyampaikan rasa sangat berterima kasih atas dukungan Timor Leste terhadap kandidasi Kamboja sebagai anggota non-permanen

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹*Op. Cit, Julio Gil da Silva Guterres, B.A., “ASEAN Without Timor Leste: State Without Sovereignty”.*

dalam *United Nations Security Council* (UNSC). Kedua negara lantas membahas kerjasama khususnya dalam transaksi dagang dan agrikultur yang akan diperkuat dan diperluas.¹²²

Dalam kurun waktu terakhir ini, yakni pada tanggal 5 September 2013, pemerintah Timor Leste kembali melakukan kunjungan diplomatik selama empat hari ke Kamboja, setelah kepulangannya dari berkunjung ke negara Laos. Kunjungan Timor Leste yang didelegasikan oleh PM Timor Leste Xanana Gusmao beserta Menteri Pariwisata dan Sekretaris Negara untuk Urusan ASEAN memulai kunjungan awalnya ke ibukota Kerajaan Kamboja, Phnom Penh, dengan sambutan penuh seremonial di *Peace Palace*. Ratusan anak-anak sekolah Kamboja berbaris di sepanjang jalan dari bandara hingga menuju istana sembari bersorak dan mengibaskan bendera Kamboja dan Timor Leste yang mengiringi konvoi kehadiran rombongan PM Timor Leste.¹²³

Selanjutnya, PM Xanana Gusmao dan PM Hun Sen duduk bersama memulai diskusi kerjasama bilateral. Diskusi kedua Perdana Menteri (PM) tersebut mengeksplor ranah kerjasama yang lebih jauh antara Kamboja dan Timor Leste. Sebagai tanggapan atas ketertarikan Kamboja untuk belajar dari pengalaman Timor Leste soal manajemen sumberdaya migas yang pernah disampaikan pada saat Timor Leste berkunjung di Kamboja pada tahun 2010 silam, PM Gusmao berjanji untuk mengutus Menteri Sumberdaya Migas dan Mineral Timor Leste (*Minister for Petroleum and Mineral Resources*) untuk mengunjungi Kamboja dan menyelenggarakan diskusi dengan para ahli dan institusi-institusi Kamboja lainnya yang terkait dengan manajemen dan kebijakan migas negara Kamboja.¹²⁴

¹²²Disadur dari artikel berita oleh Sokmom Nimulsitus dalam situs berita *online Agence Kampuchea Press* (AKP), “*Timor-Leste Thanks Cambodia for Its Support*”, <http://www.akp.gov.kh/?p=4245>, Phnom Penh, March 30, 2011. [Diakses pada tanggal 7 Maret 2014].

¹²³Disadur dari *website resmi Government of Timor Leste*, “*Cambodia and Timor-Leste agree to explore further areas of cooperation*”, <http://timor-leste.gov.tl/?p=8795&lang=en>, *Mon. 09 of September of 2013, 18:39h*. [Diakses pada tanggal 7 Maret 2014].

¹²⁴*Ibid.*

Di sela-sela diskusi yang berlangsung saat itu, PM Gusmao menyatakan apresiasinya atas progres perekonomian Kamboja yang notabene merupakan salah satu perekonomian negara ASEAN yang tumbuh paling cepat di Asia pada tempo tersebut. Terdapat banyak pembelajaran yang dapat Timor Leste petik dari proses pembangunan Kamboja, khususnya pada area agrikultur dan pariwisata. Paska diskusi bergulir, kedua negara melakukan penandatanganan MoU di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis lainnya. Dan untuk menindaklanjuti MoU kerjasama tersebut, PM Gusmao mengundang pemerintah Kamboja untuk membahasnya lebih lanjut sembari giliran melakukan kunjungan diplomatik ke Timor Leste.¹²⁵

Perjalanan diplomatik rombongan PM Gusmao pun berlanjut untuk urusan *trivial* ('remeh-temeh') menuju Provinsi Siem Reap dengan pesawat khusus persembahan dari pemerintah Kamboja untuk mengunjungi *Toul Sleng Genocide Museum*, suatu museum ternama di Kamboja yang menyimpan berbagai dokumentasi peristiwa historis dan terkenal berupa genosida terhadap rakyat Kamboja oleh rezim Pol Pot pada masa Perang Dingin. Di sana PM Gusmao bertemu dengan beberapa orang yang selamat atas kekejaman genosida Pol Pot dan mendengarkan kisah serta kesaksian mereka selama menjadi tahanan Pol Pot. Rombongan PM Gusmao juga bertandang ke Candi *Angkor Wat*, di sana mereka bertemu dengan jajaran seniman lokal dan menyaksikan kemajuan perekonomian negeri tersebut yang luar biasa dari sektor seni-budaya dan pariwisata di antaranya.¹²⁶

3.1.6.5 Hubungan Timor Leste-Vietnam

Berlanjut pada negara ASEAN kelima yang menjadi target upaya diplomasi Timor Leste untuk berintegrasi sepenuhnya di ASEAN, yaitu Vietnam. Salah satu negara "Indochina" ini merupakan salah satu negara yang mengakui kedaulatan penuh Timor Leste sejak awal merdeka di tahun 2002 dan memulai hubungan

¹²⁵*Ibid.*

¹²⁶*Ibid.*

diplomatik pada saat itu juga. Timor Leste dengan Vietnam berupaya untuk membangun dan kian meningkatkan kunjungan diplomatik secara timbal-balik (*reciprocal visits*) dalam segala tingkatan dan *people to people diplomacy* (diplomasi lintas bangsa/lintas masyarakat) untuk menciptakan sikap dan situasi saling percaya dan memahami (*mutual understanding and trust*) secara mutual serta lebih baik. Misi diplomatik kedua negara tersebut sebagaimana tersirat pada agenda pertemuan bilateral kedua negara pada kisaran April 2010 di Hanoi, ibukota Vietnam.¹²⁷ Timor leste telah melakukan kunjungan diplomatik ke Vietnam sebelumnya pada tahun 2003 dan 2005, namun *output* kunjungan pada tahun-tahun tersebut masih normatif atau belum merujuk pada kerjasama yang spesifik dan signifikan.

Vietnam menekankan bahwa kunjungan Timor Leste ini maupun kunjungan-kunjungan diplomatik kedua negara yang telah dan yang akan dilalui, mampu membuka fase baru dari pembangunan hubungan persahabatan dan kerjasama kedua negara. Pemerintah Timor Leste yang direpresentasi Presiden Ramos Horta menemui Presiden Vietnam, Nguyen Minh Triet, saling menceritakan dan berdiskusi perihal situasi sosio-ekonomi kedua negara. Presiden Jose Ramos Horta sangat mengapresiasi keberhasilan rakyat Vietnam dalam perjuangan melakukan liberasi (pembebasan) nasional dan unifikasi (penyatuan) pada masa silam serta atas pencapaian mereka dalam proses pembangunan dan konstruksi kondisi nasional sampai saat ini. Secara resiprokal, Presiden Triet mengapresiasi pencapaian pemerintahan dan rakyat Timor Leste secara sinergis dalam membangun negeri dan kemajuan ekspansi hubungan internasional.¹²⁸

Menyangkut pembahasan kerjasama lebih lanjut, kedua Presiden tersebut mencapai konsensus untuk menandatangani dan mengambil tindakan bersama merealisasikan “*Framework Agreement on Technological and Economic Co-operation*”(suatu kerangka perjanjian kerjasama ekonomi dan teknologi) untuk saling

¹²⁷Disadur dari situs berita online ‘*etan.org*’, “*Viet Nam, Timor-Leste leaders agree to increase reciprocal visits*”, <http://www.etan.org/et2010/04april/29/27viet.htm>, April, 27 2010 10:04:54. [Diakses pada tanggal 7 Maret 2014].

¹²⁸*Ibid.*

memperoleh keuntungan dari potensi dan kapabilitas masing-masing negara. Presiden Horta juga menyetujui saran Vietnam untuk mengimpor beras dan barang-barang konsumsi lainnya yang berasal dari Vietnam; memperkuat aktivitas investasi dan perdagangan; menciptakan situasi yang mendukung bagi investor Vietnam dalam sektor migas dan infrastruktur. Horta menyambut baik dan mengapresiasi kesiapan serta kemauan Vietnam yang telah membagi pengalaman dan informasi mengenai pertanian, pembangunan desa (*rural development*), penanggulangan bencana kelaparan dan pengurangan kemiskinan. Kedua pemimpin tertinggi negara tersebut juga menyetujui untuk memperluas kerjasama dalam sektor lain seperti sektor pemrosesan budidaya perairan (*aquaculture*) dan makanan sari laut (*seafood*). Pihak Timor Leste menyatakan ketertarikannya terhadap proyek pengilangan minyak di Vietnam.¹²⁹

Dalam momen yang sama, Presiden Horta dan Presiden Minh Triet juga saling bertukar pandangan mengenai isu regional dan internasional dan menyetujui satu sama lain untuk saling mendukung dalam segala organisasi dan forum internasional serta PBB. Horta mendorong Vietnam agar terus berbagai pengalaman dan informasi serta terus mendukung upaya Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN. Presiden Triet menyambut baik tujuan Timor Leste tersebut, terlebih pada tahun 2010 tersebut Vietnam mendapuk Keketuaan dalam ASEAN (*2010 ASEAN Chairmanship*), Vietnam akan terus membantu membangun ikatan solid Timor Leste dalam ASEAN.¹³⁰

Seiring dengan kondisi politik dan keamanan domestik Timor Leste yang secara gradual mulai stabil, negara ini kembali melakukan kunjungan diplomatik ke negara Vietnam pada tanggal 4 september 2013 di mana pemerintah Timor Leste yang diwakili PM Xanana Gusmao bertemu secara bilateral dengan Presiden Vietnam, Truong Tan Sang di Hanoi, ibukota Vietnam. PM Xanana Gusmao mendorong agar Presiden Tan Sang segera menandatangani perjanjian dengan Timor

¹²⁹*Ibid.*

¹³⁰*Ibid.*

Leste mengenai perlindungan investasi dan pertanian serta mendorong untuk meninjau ulang segala perjanjian yang telah ada sehingga kedua negara dapat memperluas kerjasama di berbagai bidang yang sekiranya potensial. Kedua negara juga saling membagi pengalaman legislasi (*policy-making*) dan saling bekerjasama secara efektif pada forum parlementer regional maupun global.¹³¹

Terkait urusan Hubungan Internasional, Presiden Tan Sang mengucapkan terima kasih atas dukungan Timor Leste atas upaya Vietnam untuk menjadi anggota *UN Human Rights Council* (Dewan HAM PBB) selama masa jabatan tahun 2014-2016 dan ucapan terima kasih atas dukungan Timor Leste terhadap pendirian, sikap Vietnam dan ASEAN terhadap isu Laut Timur. Kedua negara mencapai konsensus untuk menjaga keamanan, keamanan maritim, perdamaian dan dan stabilitas di Laut Timur. Vietnam mengapresiasi eksistensi Timor Leste yang notabene sebagai negara muda dengan populasi hanya sekitar 1,2 juta jiwa namun negara ini siap membuka pintu bagi para investor asing, termasuk dari Vietnam.¹³²

3.1.6.6 Hubungan Timor Leste-Malaysia

Malaysia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN merupakan negara yang sangat mengapresiasi kemajuan Timor Leste dewasa ini. Timor Leste dinilai Malaysia telah sukses memelihara perdamaian dan stabilitas nasional dengan memberdayakan kapabilitas institusi hukum dan keamanan serta efektivitas manajemen bantuan dari PBB dan partner internasional lainnya. Malaysia juga melihat adanya kemajuan yang dialami Timor Leste dalam menerapkan demokratisasi dan *good governance*. Dengan adanya kesuksesan penerapan kedua hal tersebut oleh pemerintah Timor Leste, pemerintah Malaysia mengirim observer Pemilu Timor Leste tahun 2012 untuk melakukan *monitoring* proses Pemilu dengan adanya undangan formal dan khusus dari pemerintahan Timor Leste.

¹³¹Disadur dari situs berita online "Vietnam Breaking News", "Vietnam treasures ties with Timor-Leste", <http://www.vietnambreakingnews.com/2013/09/vietnam-treasures-ties-with-timor-leste/#>, September 4, 2013. [Diakses pada tanggal 7 Maret 2014].

¹³²*Ibid.*

Atas keakraban hubungan diplomatik yang dibangun Timor Leste dengan Malaysia, lantas Malaysia konsen dan bersedia membantu Timor Leste dalam menegakkan hukum, menjaga keamanan dan mendukung pembangunan paska berakhirnya bantuan dari *United Nations Integrated Mission In Timor Leste* (UNMIT) di mana Malaysia merupakan salah satu negara yang tergabung di dalam misi pasukan perdamaian PBB tersebut. Malaysia merealisasikan bantuan tersebut melalui *Malaysia Technical Cooperation Program* (MTCP), *Malaysian Defense Cooperation Program* (MDCP), serta pelatihan diplomatik oleh *Institute of Diplomacy and Foreign Relations* (IDFR) di Timor Leste. Karena menyimak kemajuan pembangunan Malaysia yang sangat pesat untuk ukuran regional Asia Tenggara disertai adanya atensi Malaysia terhadap proses pembangunan di Timor Leste, maka negara termuda di Asia Tenggara ini sendiri telah menjadikan Malaysia sebagai model/contoh dalam melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur seperti bandara, jalan raya, dan tempat sekolah.¹³³ Maka, Timor Leste turut mengundang Malaysia untuk mengeksplor peluang *joint venture* (kerjasama) sebagaimana dalam sektor pariwisata dan migas.¹³⁴

Berkenaan dengan isu keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN, Malaysia sangat mendukung aplikasi formal Timor Leste untuk menjadi anggota penuh ASEAN yang ditunjukkan ketika menghadiri pertemuan *ASEAN Coordinating Council* (institusi yang mengkaji kelayakan Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN) yang diselenggarakan pada tanggal 17 November 2011 di Bali, Indonesia. Pada saat itu, Malaysia berpendapat bahwa aplikasi formal Timor Leste seharusnya dipertimbangkan dengan baik dan saksama, sebab adanya

¹³³*Ibid.*

¹³⁴Disadur dari website berita *The Sun Daily*, "Timor Leste hopes to be associated with M'sian Parliamentary Friend", <http://archive.is/fc69d#selection-511.0-525.40>, 2 October 2013 - 03:45pm. [Diakses pada tanggal 7 Maret 2014].

kesesuaian dengan Piagam ASEAN Pasal 6 Ayat 2 di mana posisi geografis Timor Leste sesuai dengan kriteria geografis pada Piagam ASEAN.¹³⁵

3.1.6.7 Hubungan Timor Leste-Brunei Darussalam

Timor Leste dengan Brunei telah menjalin ikatan diplomatik selama satu dasawarsa lebih semenjak Timor Leste berdiri secara independen, namun area kerjasama kedua negara belum terlalu dieksplorasi. Menteri Luar Negeri (Menlu) Timor Leste, Zacarias Albano da Costa, yang sempat melakukan kunjungan diplomatik selama empat hari di Brunei Darussalam pada kisaran Maret 2012 menyatakan bahwa mulai saat itu sudah waktunya bagi kedua negara bergerak progresif menuju area-area kerjasama potensial yang akan memberikan keuntungan satu sama lain ("*to be on equal footing*").¹³⁶

Timor Leste berupaya mengeksplor peluang kerjasama terutama pada sektor migas mengingat Brunei Darussalam merupakan negara kecil namun sangat berlimpah Sumber Daya Alam (SDA) migas ditambah rekam jejak Brunei yang sukses dalam manajemen dan mendiversifikasi sejumlah kegiatan investasi dari kekayaan SDA migasnya tersebut. Untuk memulai kerjasama pada sektor tersebut, kedua negara sejak awal melangkah pada kerjasama energi. Timor Leste juga mengupayakan peluang kerjasama lainnya termasuk pada bidang pendidikan, sosial-budaya, dan olahraga, yang mana kesemua itu dapat memperkuat hubungan antarmasyarakat dan bangsa (*people-to-people relations*). Untuk merealisasikan sekian wacana kerjasama tersebut, kedua negara masih mematangkan kerangka kerjasama di antara lembaga pemerintahan terkait dari kedua negara.

¹³⁵“ARTICLE 6 ADMISSION OF NEW MEMBERS, 2. Admission shall be based on the following criteria:(a) location in the recognised geographical region of Southeast Asia; (b) recognition by all ASEAN Member States; (c) agreement to be bound and to abide by the Charter; and (d) ability and willingness to carry out the obligations of Membership” dalam “ASEAN Charter”, <http://www1.umn.edu/humanrts/research/Philippines/ASEAN%20Charter.pdf>, 2007. [Diakses pada tanggal 8 Maret 2014].

¹³⁶Sally Piri (*The Brunei Times*), “Brunei, Timor-Leste to up cooperation”, <http://www.bt.com.bn/news-national/2012/03/13/brunei-timor-leste-cooperation>, *Tuesday, March 13, 2012*. [Diakses pada tanggal 8 Maret 2014].

Selama kunjungan diplomatik Timor Leste di Kesultanan Brunei pada Maret 2012 tersebut berlangsung, Menlu Albano Da Costa bertemu dengan perwakilan dari Lembaga Investasi Brunei (*Brunei Investment Agency*) dan Kamar Dagang Brunei (*Brunei's Chambers of Commerce*) untuk saling bertukar pandangan dan mengidentifikasi berbagai area potensial untuk melakukan kerjasama di masa mendatang. Pada saat bersamaan, Timor Leste menyampaikan apresiasi atas dukungan Brunei terhadap upaya aksesi Timor Leste dalam keanggotaan ASEAN.

Terkait dengan kepentingan keanggotaan Timor Leste di ASEAN, pada awal Maret 2013, pemerintah Timor Leste yang diwakili oleh Menteri Senior sekaligus Menlu Timor Leste, Dr Jose Luis Guterres, berkunjung kembali ke Brunei dan bertemu dengan Menteri Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Brunei, Yang Mulia Pangeran Mohamed Bolkiah, di Balai Penghadapan, Bukit Kayangan, Brunei. Dalam pertemuan diplomatik tersebut, kedua negara mendiskusikan segala masalah bilateral, regional, dan internasional. Diskusi tersebut termasuk menyinggung bahasan mengenai hubungan Timor Leste-ASEAN, di mana pada saat bersamaan, Brunei Darussalam mendapat Keketuaan ASEAN 2013 (*ASEAN chairmanship 2013*). Timor Leste mendorong Brunei agar selama mendapat *ASEAN chairmanship 2013* dapat terus mendukung dan mampu membantu percepatan Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN dengan cara-cara tetap dalam koridor diplomasi.¹³⁷

3.1.6.8 Hubungan Timor Leste-Myanmar

Myanmar membuka hubungan diplomatiknya dengan Timor Leste pada tingkat perwakilan (*ambassadorial level*) sejak tahun 2006 sebagai bagian dari upaya peningkatan hubungan luar negeri Myanmar. Lantas Timor Leste memanfaatkan momentum upaya peningkatan hubungan bilateral ini dengan mengajukan dan

¹³⁷Disadur dari website berita *The Brunei Times*, "RH receives Timor-Leste minister", <http://www.bt.com.bn/2013/03/15/hrh-receives-timor-leste-minister>, Bandar Seri Begawan, Friday, March 15, 2013. [Diakses pada tanggal 8 Maret 2014].

mengimplementasikan suatu perjanjian tentang penetapan hubungan diplomatik (*agreement on the establishment of diplomatic ties*) yang ditandatangani oleh Menlu Timor Leste Jose Luis Guterres dan Menlu Myanmar U Nyan Win, yang berlangsung di New York, Amerika Serikat (AS), pada tanggal 26 September 2006.¹³⁸

Selama perjalanan hubungan luar negeri Timor Leste dengan Myanmar terjalin, terdapat suatu sentimen kedua negara semenjak Timor Leste mengecam situasi sosial-politik domestik Myanmar yang represif di bawah kontrol kekuasaan junta militer. Sikap Timor Leste yang demikian terhadap Myanmar dilatarbelakangi oleh tendensi politik dalam dan luar negeri Timor Leste yang demokratis serta diplomatis, sehingga mendorong Timor Leste selalu menyuarakan demokrasi, berupaya membela serta menjunjung keadilan dan kesetaraan, transparansi, keterbukaan, dan hal-hal yang menjunjung tinggi HAM di Asia Tenggara di antaranya. Timor Leste yang pra-independen pernah mengalami sejumlah peristiwa pelanggaran HAM, ingin menutup histori kelam tersebut dengan membuka lembaran baru menjalani kehidupan politik internal serta eksternal yang demokratis, hal demikian yang ingin disuarakan Timor Leste terhadap negara-negara yang di dunia sebagai bagian dari diplomasi Timor Leste.

Berkenaan dengan sikap kritis Timor Leste terhadap Myanmar tersebut, seorang figur terkemuka Timor Leste yang juga peraih Nobel Perdamaian tahun 1996 atas perjuangannya membela HAM bagi rakyat Timor Leste di hadapan HAM dan dunia internasional, yaitu Ramos Horta, telah menjadi kritikus vokal terhadap kontrol koersif dan represif dari pemerintahan junta militer Myanmar dari tahun ke tahun. Ramos Horta menegaskan posisi Timor Leste yang berada di tengah kepentingannya memperjuangkan keanggotaan ASEAN ditambah dengan menyikapi situasi domestik Myanmar yang menggugah sentimen HAM, dipaparkannya sebagai berikut:¹³⁹

¹³⁸Disadur dari *website* berita *People's Daily Online*, "Myanmar forges diplomatic ties with Timor-Leste", http://english.people.com.cn/200609/30/eng20060930_307873.html, *September 30, 2006*. [Diakses pada tanggal 9 Maret 2014].

¹³⁹*Op. Cit*, *The Cambodia Daily*, "East Timor Gets Cambodian Support for Asean Bid".

“Membership in ASEAN does not mean having to turn a blind eye to the problems in Myanmar, but being forceful on this issue doesn’t mean ending diplomatic relations. East Timor has diplomatic relations with Myanmar, and I have personally opposed economic sanctions on Myanmar while being very supportive on Aung San Suu Kyi and her getting freedom, a position that is no different from the ASEAN official position”.

Maksud pernyataan Ramos Horta di atas yaitu menegaskan (secara diplomatis) bahwa posisi Timor Leste dalam memperjuangkan kepentingan terkait keanggotaan ASEAN tidak berarti harus menutup mata terhadap masalah di Myanmar, pendirian kuat dan sikap kritis Timor Leste terhadap masalah tersebut tidak berarti mengakhiri hubungan diplomatik antara Timor Leste dengan Myanmar. Tokoh Timor Leste yang berkemampuan komunikasi persuasif dan orasi yang handal tersebut secara pribadi telah menentang sanksi ekonomi terhadap Myanmar serta sangat mendukung Aung San Suu Kyi dan pembebasannya. Horta menegaskan bahwa posisi Timor Leste ini tidak berbeda dari posisi resmi ASEAN.

Semenjak Timor Leste menyatakan posisi kritisnya terhadap krisis sosial-politik domestik di Myanmar melalui pernyataan dari Ramos Horta, telah beredar laporan yang menyatakan bahwa pernyataan Ramos Horta telah menyinggung Jenderal Militer Myanmar (pemimpin junta militer di Myanmar) sehingga Myanmar berupaya untuk menghalangi Timor Leste masuk ASEAN. Namun laporan tersebut dibantah keras oleh Menlu Timor Leste Zacarias da Costa dan mengklarifikasi bahwa hubungan Timor Leste-Myanmar berada dalam *“close relationship”* dan Myanmar suportif terhadap Timor Leste untuk masuk menjadi anggota penuh ASEAN. Pernyataan Menlu Da Costa ini disampaikan ketika bersama dengan Menlu Myanmar, Nyan Win, menghadiri pertemuan para Menlu negara-negara ASEAN ke-43 (*43rd ASEAN Foreign Ministers Meeting*) di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 17 hingga 23 Juli 2010.¹⁴⁰

¹⁴⁰Disadur dari artikel berita oleh Karlon N. Rama-PECOJON News (*The Peace & Conflict Journalism Network-Vietnam*), *“Beleaguered Myanmar finds support in East Timor”*, <http://news.pecojon.org/beleaguered-myanmar-finds-support-in-east-timor/>, 22 Juli 2010. [Diakses pada tanggal 9 Maret 2014].

Terlepas dari kontroversi politik luar negeri Timor Leste dengan negara junta militer ini, Timor Leste tetap mengupayakan hubungan kooperatif secara profesional terhadap berbagai perjanjian kerjasama multidimensi dengan Myanmar. Bahkan Timor Leste tetap konsisten melangsungkan diplomasinya seperti ketika Myanmar dilanda bencana badai *Cyclone Nargis* pada tahun 2011, Timor Leste langsung bergerak memberi bantuan kemanusiaan dengan mendonasikan dana sebesar 500,000 Dolar AS untuk para korban badai tersebut di Myanmar.¹⁴¹

3.1.6.9 Hubungan Timor Leste-Laos

Timor Leste dan Laos merupakan negara di Asia Tenggara yang sama-sama relatif berusia muda di Asia Tenggara dan dunia internasional. Timor Leste telah menjalin hubungan diplomatik secara normatif dengan salah satu negara “Indochina” ini sejak tahun awal berdirinya negara Timor Leste yaitu tahun 2002. Selama lebih dari satu dasawarsa menjalin ikatan diplomatis, Timor Leste baru melakukan kunjungan dan pembicaraan bilateral secara langsung pertama kali pada tahun 2013. PM Xanana Gusmao berkunjung ke Laos sebagai delegasi dari pemerintah Timor Leste pada tanggal 9 sampai dengan 11 september 2013.¹⁴²

PM Gusmao bertemu dengan PM Laos Thongsing Thammavong, dan keduanya saling menyatakan dukungan dan bantuan secara mutual melalui kerangka kerjasama bilateral dan multilateral. Timor Leste-Laos mengafirmasi dilakukannya kunjungan diplomatik timbal balik kedua negara secara regular dalam berbagai level guna melakukan *sharing* info dan pembelajaran teknis-non teknis untuk memajukan pembangunan masing-masing negara. Sebagaimana kunjungan diplomatik dan bilateral pada umumnya, kedua Perdana Menteri tersebut saling bertukar ringkasan informasi teraktual mengenai kondisi multiaspek dan perkembangan pembangunan dari negara masing-masing. Berikutnya, Kedua Perdana Menteri membahas ranah

¹⁴¹*Ibid.*

¹⁴²Disadur dari *website* berita *Vientiane Times*, “Laos, Timor-Leste hold talks on bilateral ties”, <http://www.asiatraveltoday.com/2013/09/11/laos-timor-leste-hold-talks-on-bilateral-ties/>, September 11, 2013. [Diakses pada tanggal 9 Maret 2014].

hubungan kooperatif dan akhirnya menandatangani perjanjian dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan teknologi untuk melandasi kerjasama kondusif di masa mendatang. Tak luput di tengah pertemuan bilateral tersebut, PM Laos Thongsing Thammavong menyatakan dukungannya terhadap upaya Timor Leste untuk masuk ASEAN dan mengapresiasi komitmen Timor Leste terhadap solidaritas dan kerjasama regional.¹⁴³

3.1.6.10 Hubungan Timor Leste-Singapura

Singapura merupakan partner diplomatik Timor Leste di mana keduanya telah menjalin relasi diplomatik sejak Mei 2002. Setelah delapan tahun hubungan bilateral Timor Leste-Singapura berjalan, pemerintah Timor Leste membuka instansi atau kantor perwakilan (kedutaan) di Singapura pada tanggal 1 September 2010. Timor Leste menunjuk Roberto Soares sebagai Duta Besar (Dubes) Timor Leste untuk Singapura guna mengemban serta mengimplementasikan kepentingan bangsa Timor dan ikatan ekonomi dengan Singapura dalam tataran lebih formal. Timor Leste dalam acara seremonial dari pembukaan Kedutaan Timor Leste di Singapura tersebut terlibat dalam perbincangan dengan menyampaikan pandangannya ihwal perdagangan, isu-isu humanitarian, dan hubungan internasional.¹⁴⁴

Sejak terjalinnya hubungan diplomatik Timor Leste-Singapura sampai level Kedutaan (*Embassy level*), kedua negara mulai meningkatkan sejumlah kerjasama bilateral, di antaranya yaitu kerjasama Layanan Udara (*Air Service*). Pada tanggal 3 Juni 2013, bersamaan dengan agenda kunjungan diplomatik Timor Leste ke Singapura, PM Xanana Gusmao dan PM Lee Hsien Loong yang masing-masing merepresentasi pertemuan kedua negara, menyaksikan penandatanganan *Air Services Agreement* (ASA). Melalui ASA ini, kedua negara berupaya saling memajukan sektor

¹⁴³*Ibid.*

¹⁴⁴Disadur dari *website Gaia Discovery*, "Timor Leste Strengthens South East Asian Relations with New Embassy in Singapore", <http://www.gaiadiscovery.com/latest-people/timor-leste-strengthens-south-east-asian-relations-with-new-embassy-in-singapore.html>, *Wednesday, January 5, 2011 at 04:29PM*. [Diakses pada tanggal 10 Maret 2014].

layanan udara yang meliputi perdagangan bilateral, investasi, dan arus masyarakat (*people flows*) dalam sektor tersebut. Di samping ASA, PM Gusmao menyambut baik meningkatnya minat di antara sekian perusahaan Singapura untuk mengeksplor peluang bisnis di Timor Leste khususnya pada sektor migas. Kedua negara berpotensi saling komplemen dan mutual untuk bekerjasama dalam sektor ini, di mana Timor Leste memiliki SDA migas yang cukup melimpah sementara Singapura menguasai teknologi, manajemen, hal teknis, dan berpengalaman dalam sektor eksplorasi migas.¹⁴⁵

Di samping melakukan pertemuan bilateral dalam lingkup “*G to G*” (*Government to Government*), Timor Leste juga melancarkan diplomasi terbuka secara langsung di muka kalangan *non-governmental* atau publik. Terkait hal tersebut, Pada tanggal 4 Juni 2013, Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, telah melakukan kunjungan dan mengisi kuliah umum di institusi pendidikan Singapura yaitu pertama di *S Rajaratnam School of International Studies*, yang bertajuk “*Timor-Leste’s Role and Future in the Asia-Pacific*” (“Peran Timor Leste dan Masa Depan Asia Pasifik”), serta yang kedua di *Lee Kwan Yew School of Public Policy*, yang bertajuk “*Peace building and State building: From fragility to resilience*” (“Pembangunan Negara dan Perdamaian: dari kerapuhan menuju ketahanan”).¹⁴⁶

Selama melakukan pendekatan dengan para mahasiswa/i dan akademisi di kedua kampus terkenal di Singapura tersebut, PM Gusmao mewakili Timor Leste mempresentasikan singkat tentang negara Timor Leste, memaparkan secara persuasif mengenai perkembangan negara Timor Leste. Gusmao memaparkan bahwa sejak tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Timor Leste mampu mencapai di atas sepuluh persen setiap tahun; adanya upaya percepatan pembangunan infrastruktur vital

¹⁴⁵Disadur dari *website* berita *Singapore Business Review*, “*Singapore inked air services pact with Timor-Leste*”, <http://sbr.com.sg/aviation/news/singapore-inked-air-services-pact-timor-leste-0>, 04 Juni 2013 [Diakses pada tanggal 10 Maret 2014].

¹⁴⁶*Op. Cit.*, “*Timor-Leste keen to join ASEAN*”, *Channel News Asia - June 4, 2013* dalam *Asia Pacific Solidarity Network (East Timor News Digest 6 – June 1-30, 2013)*.

nasional; pemberantasan kemiskinan yang ekstrim; dan pengembangan SDM terus dilakukan. Gusmao meyakinkan audiens bahwa kesemua upaya tersebut dilakukan Timor Leste agar mampu berkontribusi secara total terhadap ASEAN sebagai komitmen Timor Leste untuk menjadi anggota penuh ASEAN.¹⁴⁷

Tabel 3.1 Rekapitulasi Hubungan Diplomatik Timor Leste Dengan Negara-Negara Anggota ASEAN

Hubungan Diplomatik Timor Leste	Misi Yang Telah Dilakukan	Kontrak Kerjasama Yang Telah Disepakati
1. Timor Leste-Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi dan Rekonstruksi hubungan Timor Leste-Indonesia; 2. Membicarakan prospek berkelanjutan dari relasi dagang kedua negara di mana volume perdagangan Indonesia-Timor Leste meningkat; 3. Membahas persoalan mutual mengenai perikanan, pertanian, pendidikan, kehutanan, transportasi, keamanan (keamanan perbatasan); 4. Timor Leste menghadiri <i>the 5th Bali Democracy Forum</i>, 8 November 2012, sekaligus meyakinkan secara persuasif bahwa negara ini akan menjadi bagian yang lebih dekat dengan transisi ekonomi global dan mampu berpartisipasi lebih aktif dalam agenda pembangunan regional strategis, jika segera diterima dalam keanggotaan ASEAN. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. MoU tentang penangan visa dan paspor diplomatik; 2. Menyetujui upaya penegakan hukum ketat di wilayah perbatasan tepatnya di wilayah Belu, khususnya untuk menangkal kasus imigran ilegal dan penyelundupan yang rawan terjadi; 3. Menyetujui upaya pertukaran informasi yang sekiranya mampu meningkatkan kapabilitas perekonomian khususnya bagi Timor Leste sebagai negara yang baru berdiri di kawasan Asia Tenggara.
2. Timor Leste-Thailand	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thailand mengirimkan bantuan tenaga militer dan polisi untuk pasukan misi perdamaian PBB selama terjadi krisis politik domestik di Timor-Leste 2002-2006; 2. Saling menguatkan <i>mutual trust; understanding; persahabatan</i>; dan kerjasama (disampaikan dalam konferensi pers di Kemenlu Thailand ketika Mr. Abhisit Vejjajiva-PM Thailand menjamu Dr. José Ramos Horta-Presiden Timor Leste, 11-13 Januari 2009); 3. Bantuan kemanusiaan Timor Leste untuk bencana banjir Thailand tahun 2011; 4. Membahas berbagai kerjasama bilateral, khususnya kerjasama teknis agrikultur dan energi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. MoU tentang kerjasama teknis dan ekonomi; 2. MoU kerjasama energi: "<i>Joint Cooperation in Energy Development between PTT Public Company Limited of Thailand and the Secretary of State for Natural Resources of Timor-Leste</i>".

¹⁴⁷Disadur dari *website Singapore Institute of International Affairs (SIIA)*, "Timor-Leste PM visits Singapore, says his country is working hard to join ASEAN", <http://www.siiionline.org/page/insightsDetails/id/3021/ArticleCategoryId/7/>, 5 Juni 2013. [Diakses pada tanggal 10 Maret 2014].

	<p>5. Pada bulan Februari 2012, Menlu Timor Leste-Zacarius Albano da Costa menemui PM Thailand-Yingluck Shinawatra untuk meminta nasihat sekaligus mengkonsolidasi dukungan perihal keanggotaan ASEAN serta meningkatkan hubungan bilateral kedua negara;</p> <p>6. Timor Leste menghadiri undangan Thailand dalam <i>42nd ASEAN Ministerial Meeting (AMM), the 2nd Asia-Pacific Water Summit, 16th ASEAN Regional Forum, the World Economic Forum on East Asia</i> di Thailand sepanjang tahun 2012, dalam rangka meyakinkan kesiapan Timor Leste dalam keanggotaan penuh ASEAN.</p>	
3. Timor Leste-Filipina	<p>1. Pemerintah Filipina berupaya meningkatkan transaksi perdagangan dengan Timor Leste serta pertukaran budaya dan pendidikan;</p> <p>2. Pada tahun 2010, Presiden Timor Leste-Jose Ramos Horta mengutarakan ekspektasi agar terjadi peningkatan hubungan diplomatik dan dagang serta investasi antara Filipina-Timor Leste yang lebih besar di bawah rezim Benigno III;</p> <p>3. Bantuan dana Timor Leste sebesar 750000 Dolar AS disalurkan untuk membantu para korban badai <i>Typhoon "Pablo"</i> yang menyerang Filipina bagian selatan, tahun 2012;</p> <p>4. PM Timor Leste-X. Gusmao memberikan kuliah tamu di <i>University of the Philippines</i> yang bertajuk "<i>Peace and Reconciliation: Timor-Leste experience</i>".</p>	Menyepakati perjanjian untuk mendorong kerjasama dalam bidang kelautan dan perikanan, pendidikan, pelatihan layanan luar negeri (<i>foreign service training</i>); pertahanan, pembangunan infrastruktur, dan perdagangan.
4. Timor Leste-Kamboja	<p>1. Pada Maret 2003, Menlu Kamboja- H.E. Mr. Hor Namhong melakukan <i>sharing</i> atau pertukaran informasi dan pandangan dengan Presiden Timor Leste-Ramos Horta mengenai situasi negeri Kamboja, khususnya ihwal pemberantasan kemiskinan dan proses reformasi yang dilakukan pemerintah Kamboja sebagai referensi Timor Leste dalam menjalankan pemerintahannya yang baru 'seumur jagung';</p> <p>2. Pada tahun 2010, Presiden Ramos Horta meyakinkan PM Kamboja-Hun Sen mengenai situasi Timor Leste teraktual saat itu, di mana terdapat pertumbuhan ekonomi yang telah mencapai 10% sejak tahun 2007 dan Timor Leste tidak memiliki hutang luar negeri, melainkan terdapat surplus anggaran yang didepositkan (disimpan) di bank. Presiden Horta juga melakukan <i>sharing</i> dan memberikan <i>advise</i> kepada pemerintah Kamboja yang mulai mengawasi atau serius mengelola pengeboran ladang minyak lepas pantai Kamboja dengan belajar dari pengalaman Timor Leste mengelola sektor migas.</p>	MoU di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis lainnya.
5. Timor Leste-Vietnam	<p>1. Pada bulan April 2010 di Hanoi-Vietnam, kedua negara menyepakati pembangunan dan peningkatan <i>reciprocal visits</i> dalam segala tingkatan dan <i>people to people diplomacy</i> untuk menciptakan sikap dan situasi <i>mutual understanding and trust</i> secara mutual serta lebih baik;</p> <p>2. Membagi pengalaman dan informasi mengenai pertanian, <i>rural development</i>, penanggulangan bencana kelaparan dan pengurangan kemiskinan;</p>	<p>1. Menyepakati "<i>Framework Agreement on Technological and Economic Co-operation</i>";</p> <p>2. Memperluas kerjasama dalam sektor <i>aquaculture</i> dan <i>seafood</i>.</p>

	<p>3. Pada tahun 2013, PM Timor Leste-X. Gusmao mendorong Presiden Vietnam-Tan Sang segera menandatangani perjanjian perlindungan investasi dan pertanian serta mendorong untuk meninjau ulang segala perjanjian yang telah ada sehingga kedua negara dapat memperluas kerjasama di berbagai bidang yang sekiranya potensial;</p> <p>4. Saling membagi pengalaman legislasi (<i>policy-making</i>) dan saling bekerjasama secara efektif pada forum parlementer regional maupun global;</p> <p>5. Timor Leste mendukung Vietnam untuk menjadi anggota <i>UN Human Rights Council</i> (Dewan HAM PBB) selama masa jabatan tahun 2014-2016;</p> <p>6. Timor Leste mendukung sikap dan pendirian Vietnam dan ASEAN terhadap isu Laut Timur. Kedua negara mencapai konsensus untuk menjaga keamanan, keamanan maritim, perdamaian dan dan stabilitas di Laut Timur.</p>	
6. Timor Leste-Malaysia	<p>1. Untuk menunjukkan progres stabilitas politik dan keamanan domestik, pemerintah Timor Leste memberikan undangan formal dan khusus kepada pemerintah Malaysia untuk mengirim observer pada Pemilu Timor Leste tahun 2012 guna melakukan <i>monitoring</i> proses Pemilu;</p> <p>2. Malaysia memberikan bantuan pembangunan Timor Leste melalui <i>Malaysia Technical Cooperation Program</i> (MTCP), <i>Malaysian Defense Cooperation Program</i> (MDCP), serta pelatihan diplomatik oleh <i>Institute of Diplomacy and Foreign Relations</i> (IDFR).</p>	Menyepakati eksplorasi peluang <i>joint venture</i> dalam sektor pariwisata dan migas.
7. Timor Leste-Brunei Darussalam	<p>1. Pada tahun 2012, Menlu Timor Leste-Albano Da Costa bertemu dengan perwakilan dari <i>Brunei Investment Agency</i> dan <i>Brunei's Chambers of Commerce</i> untuk saling bertukar pandangan dan mengidentifikasi berbagai area potensial untuk melakukan kerjasama di masa mendatang;</p> <p>2. Pada tahun 2013, Menlu Timor Leste-Dr Jose Luis Guterres, berkunjung ke Brunei dan bertemu dengan Menteri Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Brunei-Yang Mulia Pangeran Mohamed Bolkia untuk mendiskusikan segala masalah bilateral, regional, dan internasional, termasuk menyinggung bahasan mengenai hubungan Timor Leste-ASEAN. Pada saat itu, Brunei Darussalam mendapuk <i>ASEAN chairmanship 2013</i> sehingga Timor Leste mendorong Brunei agar terus mendukung dan mampu membantu percepatan Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN.</p>	Area kerjasama kedua negara belum terlalu dieksplorasi.
8. Timor Leste-Myanmar	<p>1. Timor Leste mengkritisi krisis demokrasi dan HAM di Myanmar dengan tetap mempertahankan hubungan diplomatik antara Timor Leste dengan Myanmar secara damai;</p> <p>2. Timor Leste melangsungkan diplomasinya melalui pemberian bantuan kemanusiaan dengan mendonasikan dana sebesar 500,000 Dolar AS ketika Myanmar dilanda bencana badai <i>Cyclone Nargis</i> pada tahun 2011.</p>	Kedua negara menyepakati <i>Agreement on the establishment of diplomatic ties, 2006</i> .
9. Timor Leste-Laos	Sejak tahun 2013, kedua negara saling menyatakan dukungan dan pemberian bantuan secara mutual melalui kerangka	Sejak tahun 2013, kedua negara menandatangani perjanjian

	kerjasama bilateral dan multilateral, mengafirmasi dilakukannya kunjungan diplomatik timbal balik secara regular dalam berbagai level guna melakukan <i>sharing</i> info dan pembelajaran teknis-non teknis untuk memajukan pembangunan masing-masing negara.	dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan teknologi untuk melandasi kerjasama kondusif di masa mendatang.
10. Timor Leste-Singapura	<ol style="list-style-type: none"> Bertepatan dengan pembukaan Kedubes Timor Leste di Singapura pada tahun 2010, Timor Leste menyampaikan pandangannya ihwal perdagangan, isu-isu humanitarian, dan hubungan internasional; Pada tanggal 4 Juni 2013, Perdana Menteri Timor Leste-X. Gusmao telah melakukan kunjungan diplomatik dan mengisi kuliah umum di <i>S Rajaratnam School of International Studies</i>, yang bertajuk "<i>Timor-Leste's Role and Future in the Asia-Pacific</i>", serta yang kedua di <i>Lee Kwan Yew School of Public Policy</i>, yang bertajuk "<i>Peace building and State building: From fragility to resilience</i>". 	<ol style="list-style-type: none"> <i>Air Services Agreement (ASA)</i>, 2013; Kedua negara sepakat mengeksplor peluang bisnis di Timor Leste khususnya pada sektor migas.

3.2 Diplomasi Ekonomi Timor Leste Untuk Memperoleh Status Keanggotaan Penuh ASEAN

Diplomasi ekonomi dan perdagangan telah menjadi hal esensial dari histori awal diplomasi. Sebagaimana yang tercantum dalam arsip *Amarna* yang terbuat dari tanah liat dan berasal dari Mesir Tengah pada periode tahun 1460-1220 SM serta pada abad-abad setelahnya, kegiatan perdagangan yang ekstensif di berbagai wilayah termasuk pada peradaban Mesir dan Asia Barat, dapat dilihat bahwa perdagangan menjadi motivasi utama terjalinnya kontak dan perjanjian internasional.¹⁴⁸ Sampai pada tempo dewasa ini, aktivitas membangun kerjasama ekonomi dan perdagangan menjadi fokus dari sebagian besar kegiatan diplomasi. Kegiatan ekonomi menjadi aktivitas penting dan tidak hanya dibebankan kepada Menteri Perdagangan atau ahli dari departemen lainnya. Wawasan dan *soft-skill* dalam diplomasi ekonomi dan perdagangan minimal menjadi kualifikasi penting bagi diplomat yang ingin mengejar karir diplomatik, yang setara dengan kapabilitas berpolitik. Di setiap Perwakilan Luar Negeri sebagaimana Kedutaan Besar (Kedubes), setiap pejabat diplomatik, tidak peduli apapun tugas utamanya, harus memunculkan cara pandang ekonomi,

¹⁴⁸*Op. Cit.*, Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*, hlm.227.

sementara pada saat yang bersamaan dia juga mempertimbangkan dimensi-dimensi politik.¹⁴⁹

Saat ini, kegiatan diplomasi memberikan penekanan yang sama pada kegiatan ekonomi dan politik. Adapun dapat dikatakan bahwa kegiatan ekonomi mengambil alih diplomasi konvensional yang membahas isu-isu politik dan militer. Diplomasi ekonomi dapat menjadi sarana mempromosikan negara sebagai suatu usaha untuk membangun citra negara yang dapat menstimulus kegiatan investasi, perdagangan lintas batas negara, serta pengembangan riset dan pertukaran teknologi-informasi. Negara-negara kaya dan berkembang saat ini sama-sama mempertimbangkan mobilisasi investasi seperti *Foreign Direct Investment*-FDI serta kegiatan ekspor-impor sebagai esensi dari peningkatan kepentingan di negara lain.

Diplomasi ekonomi akan menumbuhkan kesejahteraan tidak hanya bagi negara pengirim tetapi juga negara penerima. Kontak-kontak dagang yang telah disepakati, jika diaplikasikan dapat menumbuhkan dan mengembangkan aktivitas ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang terlibat. Model-model diplomasi ekonomi yang dikembangkan oleh masing-masing negara disesuaikan dengan karakteristik negara yang bersangkutan, di samping disesuaikan dengan kebutuhan spesifik satu negara.¹⁵⁰

Sehubungan dengan penelitian dalam karya ilmiah ini, diplomasi ekonomi yang telah dipaparkan di atas merupakan salah satu sub landasan konseptual dari landasan konseptual “diplomasi” yang relevan dalam menganalisis upaya diplomasi Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN, di samping sub landasan konseptual diplomasi terbuka yang telah dibahas pada sub bab III ini sebelumnya. Sejak awal Timor Leste menyatakan maksud untuk bergabung dalam entitas ASEAN, ASEAN memberikan status observer bagi Timor Leste tanpa ketetapan batas waktu yang jelas untuk menentukan kapan Timor Leste berhak memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN. Maka negara paling muda di Asia

¹⁴⁹*Ibid.*, hlm. 229.

¹⁵⁰*Ibid.*, hlm. 238.

Tenggara tersebut sejak berstatuskan sebagai observer, mulai melakukan pembangunan kapasitas di segala bidang untuk mewujudkan tujuan politik luar negerinya menjadi negara anggota ASEAN ke-11. Esensi *capacity building* yang dilakukan oleh Timor Leste tersebut yaitu agar Timor Leste mampu mencapai integrasi ekonomi di ASEAN sehingga tidak mengalami atau mampu meminimalisir “ketertinggalan ekonomi” dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Pembangunan kapasitas Timor Leste yang dimaksud, merupakan manifestasi dari diplomasi ekonomi yang menjurus pada beberapa pilar kegiatan ekonomi, sebagai berikut:¹⁵¹

1. Promosi perdagangan, dengan fokus utama tapi tidak eksklusif pada penanganan kegiatan untuk peningkatan ekspor;
2. Promosi peluang investasi, terutama memfokuskan pada investasi ke dalam negeri;
3. Menarik masuknya teknologi yang memadai.

Pembangunan kapasitas Timor Leste yang pertama yakni melalui promosi perdagangan khususnya perdagangan meliputi kegiatan ekspor-impor di kawasan Asia Tenggara. Komoditi ekspor Timor Leste antara lain kopi, ikan, vanila, cabe, kacang, dan lain-lain, namun yang paling menonjol adalah komoditi kopi. Timor Leste merupakan negara penghasil kopi, yang secara kuantitas jumlahnya terbatas namun secara kualitas adalah terbaik di antara negara-negara anggota ASEAN. Kopi Timor Leste sebagai hasil kekayaan alam Timor Leste pertama kali dibudidayakan dan diperkenalkan oleh Portugis (eks-koloni Timor Leste) untuk menjadi salah satu jenis kopi yang paling dicari di antara berbagai jenis kopi dunia dari waktu ke waktu. Ketika Timor Leste masih berada di bawah okupasi Indonesia, produksi kopi Timor Leste dikesampingkan atau tidak terlalu diberdayakan sehingga menurun tajam. Namun paska Timor Leste merdeka dari okupasi Indonesia, kopi menjadi produk

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 230.

ekspor Timor Leste yang paling signifikan dan diutamakan.¹⁵² Kopi Timor Leste yang berjenis *Arabica*, *Robusta*, dan *Liberica* ini menjadi komoditi ekspor unggulan, di mana 80% dari keseluruhan ekspor Timor Leste berasal dari komoditi kopi.¹⁵³

Pada masa awal Timor Leste eksis sebagai negara termuda di Asia Tenggara, tepatnya pada kisaran tahun 2003-2004, Timor Leste sudah berhasil masuk daftar 30 negara pengeksport kopi dunia dan berada di urutan lima belas setelah Brasil, Vietnam, Kolombia, Indonesia, Jerman, Guatemala, Peru, Honduras, Uganda, Pantai Gading, India, Ethiopia, Meksiko, Kosta Rika. Tahun 2003, ekspor kopi Timor Leste mencapai 0,25% dan tahun 2004 mencapai 0,46. Ekspor kopi Vietnam berada di urutan kedua setelah Brasil dengan persentase nilai ekspor kopi sebesar 14,32% pada tahun 2003 dan pada tahun 2004 mencapai 5,41%. Sedangkan Indonesia berada di urutan keempat, dengan persentase nilai ekspor kopi sebesar 6,14% pada tahun 2003 dan pada tahun 2004 mencapai 1,89% tahun 2004.

Pada saat itu, di antara negara-negara pengeksport kopi dari Asia Tenggara, jumlah ekspor kopi Timor Leste masih di bawah Vietnam dan Indonesia, namun mampu mengungguli negara Laos yang notabene merupakan negara anggota ASEAN (berada di urutan ke-28 dari 30 negara).¹⁵⁴ Dari 14 negara tujuan ekspor kopi Timor Leste, pada kisaran tahun 2004-2008, Indonesia berada di urutan kedua sebagai negara pengimpor kopi Timor Leste, serta berada di urutan ketiga pada tahun 2005 setelah Amerika Serikat (AS) dan Jerman. Menurunnya kuantitas ekspor kopi Timor Leste di Indonesia dari tahun 2004-2005 tersebut disebabkan oleh krisis politik domestik antarelit yang puncaknya terjadi pada tahun 2006, sehingga menyebabkan perekonomian Timor Leste sempat mengalami kemacetan total.¹⁵⁵

¹⁵²Disadur dari artikel oleh *Fair Coffee & Co* (suatu perusahaan bisnis kopi berbasis *social enterprise* yang berpusat di Australia), "*Timor Leste*", <http://www.faircoffeeshop.com/timor-leste>, 2012.

¹⁵³Disadur dari data resmi dari *International Coffee Organization (ICO)*, "*TIMOR-LESTE (Data for crop/calendar year commencing 2009) : Coffee Sector*", <http://www.ico.org/countries/timorleste.pdf>, 2009. [Diakses pada tanggal 13 Maret 2014].

¹⁵⁴*Op. Cit.*, <http://dne.mopf.gov.tp/> dalam paper Alarico da Costa Ximenes, *Kepentingan Dan Diplomasi Timor Leste Di ASEAN*.

¹⁵⁵*Ibid.*

Ekspor Timor Leste ke Indonesia, Filipina, dan Malaysia dari tahun 2002-2007 terus meningkat. Timor Leste merupakan negara penghasil kopi dan kopra serta memasarkannya pada target utama yaitu negara Indonesia (dengan nilai sebesar 5,44 Dollar AS), Filipina (3,34 Dolar AS), Malaysia (2,95 Dolar AS).¹⁵⁶ Penjualan tersebut berbeda satu negara dengan negara lain tergantung kebutuhan negara anggota ASEAN tersebut. Penjualan kopi Timor Leste terbanyak yakni di Indonesia karena letak Indonesia berdekatan dengan Timor Leste sehingga perdagangan berjalan lebih efisien dan berkelanjutan. Sedangkan penjualan kopi terendah yaitu di Malaysia karena Malaysia merupakan negara yang mampu memenuhi suplai cukup memadai sehingga keperluan kopi di negara tersebut cukup dipenuhi dengan kopi dalam negeri dan tidak terlalu urgen untuk dilakukan impor kopi. Sementara, Filipina merupakan pasar kopi yang cukup menjanjikan bagi Timor Leste karena adanya ikatan berbasis religiusitas di mana kedua negara memiliki mayoritas penduduk beragama Katolik sehingga perdagangan dapat mempererat kontak *people to people* antar kedua negara.

Berkenaan dengan hubungan dagang Timor Leste dengan negara-negara anggota ASEAN, Indonesia merupakan partner diplomatik paling dekat dengan Timor Leste sekaligus paling intens melakukan relasi dagang dengan “bekas negara”-nya tersebut. Di samping Timor Leste melakukan ekspor regular ke Indonesia dengan komoditi utama berupa kopi, Timor Leste menawarkan kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk mengekspor hewan ternak berupa sapi dan kambing untuk memenuhi kebutuhan daging yang tinggi selama perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Timor Leste memiliki stok hewan kambing sekitar tiga juta ekor yang dapat diekspor ke Indonesia. Namun, wacana kerjasama dalam mensuplai hewan ternak ini masih didiskusikan lagi lebih lanjut oleh kedua negara sembari mendiskusikan perihal kemungkinan untuk menanggulangi penyakit menular di antara hewan ternak,

¹⁵⁶*Ibid.*, Kementerian Keuangan Timor Leste, 2007.

khususnya penyakit menular yang mewabah di perbatasan wilayah antara Indonesia dengan Timor Leste.¹⁵⁷

Di samping melancarkan kegiatan ekspor, Timor Leste memiliki kepentingan untuk mensuplai komoditi dan barang konsumsi dalam negeri yang kurang dapat dipenuhi sendiri secara maksimal yakni dengan melakukan kegiatan impor. Timor Leste mengimpor beberapa barang-barang kebutuhan pokok, peralatan, dan *merchandise* lainnya seperti produk petroleum; makanan dan minuman; barang-barang modal (*capital good*), material bangunan (*construction materials*), kendaraan dan suku cadang, dan lain-lain yang diimpor dari Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia.¹⁵⁸

Pilar kegiatan ekonomi kedua dalam diplomasi ekonomi yang dilakukan Timor Leste untuk menjadi negara anggota ASEAN yaitu promosi peluang investasi, terutama memfokuskan pada investasi ke dalam negeri. Timor Leste tidak hanya mengandalkan ekspor-impor untuk berintegrasi secara ekonomi dalam ASEAN, melainkan juga memberi peluang investasi negara-negara anggota ASEAN, di mana sejak tahun 2006 terdapat beberapa investor dan jenis kegiatan investasi di Timor Leste sebagaimana yang tertulis pada tabel berikut ini:¹⁵⁹

Tabel 3.2 Daftar Investasi Luar Negeri di Timor Leste

Nama Usaha/Perusahaan	Jenis	Area Investasi	Investor
Timor Global	FDI	Coffee Planatation	Singapura-TL
Parway Fisheries	Joint Venture	Fishing, Industrial	China & Thai
Thai Pavillion	FDI	Hotel Services	Thailand
Arbiru Beach Resorth	Timorese & FDI	Hotel Services	Timorese
Timor Telecom SA	Joint Venture	Telecommunication Services	Portugal & TL
Buka Timor Hamutuk	Joint Venture	Import&Distribution services	Timorese & Australia
Hotel Dili	FDI	Hotel Services	Timorese & Australia
Timor Global Pty. Ltd Agro Businnes	Joint Venture	Agro Businnes	Singapura
Timor Global Project (Hotel & Resort)	Joint Venture	Hotel Services	Singapura

¹⁵⁷*Op. Cit.*, Sebagaimana yang disampaikan oleh Valentino Varela, Menteri Muda Urusan Peternakan Republik Demokratik Timor Leste-RDTL (*RDTL Husbandry Affairs Junior Minister*) dalam “*Timor Leste plans to supply goats to Indonesia*”, *Jakarta Post* - June 5, 2013 dalam *website Asia Pacific Solidarity Network (East Timor News Digest 6 – June 1-30, 2013)*.

¹⁵⁸Disadur dari *website Embassy of the Democratic Republic of Timor-Leste*, “*About Timor Leste*”, 2014, <http://www.timorlesteembassy.org/index.php?page=investment-procedures>. [Diakses pada tanggal 14 Maret 2014].

¹⁵⁹*Op. Cit.*, Alarico da Costa Ximenes, *Kepentingan Dan Diplomasi Timor Leste Di ASEAN*.

Timor Gas L.td	FDI	Import & Distribution Gas	Timorese & Australia
Elsa Café	FDI	Agriculture Caffee	Timorese & Australia
Graha Media	FDI	Whole Sale & Retail Shop	Indonesia
Ellipse Energy Inter. Pte.Ltd	FDI	Refinary, Power Station & Import of Fuel	Singapura
L&L development Pty.Ltd	FDI	Real State	Australia & Malaysia
Tuah Hun Uni Pessoal L.da	FDI	Micro Credit & Fishery	Malaysia
Belak Fuels L.td	Joint Venture	Import & Distribution of Fuels	Timorese & Australia
Carya Timor Leste Pty. Ltd.	FDI	Civil Constructions Services	Indonesia
Holiwono Store	FDI	Hotel & Apartment Services	Indonesia
United Heavy Equipments Pty. Ltd	FDI	Agriculture & Planations Cane Sugar	Indonesia
GT Leste Biotech	FDI	Civil Constructions	Malaysia

Sumber data: Trade Invest Timor Leste, 2007

Paska tahun 2006 hingga saat ini, ketika situasi krisis politik dan keamanan dikarenakan pertentangan antarelit domestik telah surut, aktivitas investasi cukup berkembang di Timor Leste terutama oleh negara-negara ASEAN dengan manajemen yang cukup baik, sehingga mampu menstimulus peningkatan pendapatan ekonomi Timor Leste dan peningkatan serta pemerataan lapangan kerja domestik. Timor Leste sendiri merupakan negara potensial bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mengekstensifkan modal mereka secara efisien dan memberi profit lebih karena sama-sama negara yang berada di wilayah regional Asia Tenggara. Hal demikian berbanding lurus dengan kebutuhan Timor Leste untuk mengembangkan aset perekonomian potensial nasional seperti kopi, migas, perikanan, pertanian dan perkebunan maupun sektor lainnya yang masih “belum terjamah” atau belum maksimal dikembangkan sebagai pengisi pundi-pundi pendapatan negara seperti sektor pariwisata dan perhotelan.

Untuk mengembangkan aset perekonomian potensial nasional seperti kopi, Timor Leste mengundang negara Singapura untuk berinvestasi yakni *Foreign Direct Investment* (FDI) di sektor perkebunan dan pengolahan kopi (*coffee plantation*) dengan nama perusahaan *Timor Global*. Kedua, pada sektor migas Timor Leste pun

dikembangkan melalui pembukaan FDI dengan perusahaan di bidang energi dari Singapura yaitu *Ellipse Energy Inter. Pte.Ltd* yang menggarap sektor penyulingan; pembangkit tenaga listrik; serta impor bahan bakar. Indonesia juga turut berinvestasi di Timor Leste pada sektor migas melalui Badan Usaha Miliki Negara-BUMN, yakni perusahaan *Pertamina*. Berikutnya, sektor perikanan negeri Timor sebagian dikelola bersama dengan Thailand dan Cina (*joint venture*) melalui perusahaan *Parway Fisheries* serta dengan Malaysia yang melakukan FDI di bawah naungan perusahaan *Tuah Hun Uni Pessoal L. da*. Kemudian, Timor Leste yang notabene sebagai negara agraris tentu juga mengembangkan sektor perkebunan dan pertaniannya dengan Indonesia (*United Heavy Equipment Pty. Ltd*) dan Singapura (*Timor Global Pty. Ltd Agro Business*). Untuk sektor pariwisata dan perhotelan yang relatif masih “belum terjamah” atau belum maksimal dikembangkan, Timor Leste menyambut baik aktivitas FDI perusahaan Thailand yakni *Thai Pavillion*; lalu *joint venture* dengan perusahaan Singapura *Timor Global Project (Hotel & Resort)*; serta dengan perusahaan asal Indonesia *Holiwono Store* yang melakukan FDI bidang layanan apartemen dan hotel di Timor Leste.

Lebih jauh, Timor Leste juga membuka keran investasi untuk membantu pembangunan infrastruktur Timor Leste guna mempersiapkan jika Timor Leste jika sewaktu-waktu mendapat amanat untuk mendapak sebagai tuan rumah perhelatan setiap agenda ASEAN. Kegiatan investasi yang dimaksud tersebut antara lain di bidang pembangunan ataupun pemberdayaan maskapai penerbangan, salah satunya dilakukan oleh Indonesia melalui perusahaan maskapai penerbangan regional *Merpati Nusantara Airlines*. Indonesia juga berinvestasi dalam pembangunan perumahan masyarakat sipil (*civil construction*) seperti melalui perusahaan konstruksi *PT Wijaya Karya (WIKA)*; dan firma konstruksi *PT Pembangunan Perumahan (PTPP)*; dan *Carya Timor Leste Pty. Ltd*.¹⁶⁰ Adapun investasi berbentuk FDI di Timor Leste

¹⁶⁰*Op. Cit.*, “Timor Leste president to meet SBY to talk about bilateral trade”, *Jakarta Post* - June 21, 2013 dalam website *Asia Pacific Solidarity Network (East Timor News Digest 6 – June 1-30, 2013)*.

dalam bidang *civil construction* dilancarkan oleh Malaysia melalui perusahaan *GT Leste Biotech* dan *L&L development Pty. Ltd.*

Adapun Filipina yang telah menandatangani perjanjian dengan Timor Leste untuk meningkatkan relasi bilateral, negara ini juga melirik peluang investasi dan berencana melangsungkan investasi pembangunan infrastruktur di Timor Leste seperti pembangunan jalan raya, jembatan, pelabuhan baru, bandara, perumahan, rumah sakit. Lantas, Ramos Horta secara persuasif sempat menegaskan bahwa apabila perusahaan-perusahaan Filipina tidak bergerak cepat dan agresif untuk berinvestasi di Timor Leste, maka peluang investasi tersebut akan diraih negara lain seperti Singapura, Malaysia, Indonesia dan Cina yang akan lebih jauh memperoleh peluang berinvestasi di Timor Leste karena menaruh minat sejak lama untuk berinvestasi di Timor Leste dan segera mereka realisasikan. Begitulah cara Horta yang dikenal sebagai “diplomat ulung” Timor Leste tersebut mengutarakan hal berorientasi pada diplomasi ekonomi terkait dengan kepentingan dan upaya Timor Leste menjadi anggota penuh ASEAN.¹⁶¹

Dalam mengimplementasikan diplomasi ekonomi melalui pilar kegiatan ekonomi lainnya, yaitu Timor Leste juga berupaya menarik masuknya teknologi yang memadai, disertai dengan pertukaran dan pengembangan teknologi informasi serta SDM yang berkualitas sebagai kerangka pembangunan kapasitas di segala bidang untuk membekali Timor Leste selama berkiprah di ASEAN hingga mencapai tujuan untuk menjadi anggota dengan status keanggotaan penuh di ASEAN. Sehubungan dengan hal tersebut, Timor Leste berupaya manajemen kapasitas nasional untuk bersinergi dan lebih produktif dengan sejumlah *output* dari hubungan kooperatif yang telah dibangun dengan negara-negara anggota ASEAN, di antaranya yaitu melalui bantuan teknis-non teknis yang ditawarkan negara-negara anggota ASEAN. Sejumlah bantuan dan akses teknologi-informasi dari negara-negara anggota ASEAN di Timor

¹⁶¹Disadur dari artikel berita oleh Sahil Nagpal, “*Philippines, East Timor sign three agreements to boost relations*”, <http://www.topnews.in/philippines-east-timor-sign-three-agreements-boost-relations-258515>, Tue, 08/12/2008 - 15:03. [Diakses pada tanggal 14 Maret 2014].

Leste tersebut sebagai manifestasi dari dukungan negara-negara anggota blok regional tersebut terhadap keanggotaan Timor Leste di ASEAN.

Di antara bantuan yang diterima Timor Leste sebagai stimulus pembangunan kapasitas negara tersebut yakni pengembangan sektor agrikultur atau pertanian yang notabene merupakan aset perekonomian pokok Timor Leste. Di antara sekian negara anggota ASEAN, sektor ini merupakan salah satu keahlian unggulan negara Thailand yang ditawarkan sebagai bantuan bagi Timor Leste. Thailand memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pejabat-pejabat Timor Leste yang konsen pada masalah atau bidang pertanian; mengirim para ahli untuk membantu mengembangkan produksi beras lokal Timor Leste. Thailand juga menambahkan asistensi penelitian dan pelatihan teknis untuk pengembangan sektor perikanan dan peternakan sebagai aset potensial Timor Leste yang perlu digarap dan dikembangkan.¹⁶²

Timor Leste juga memperhatikan potensi kerjasama dengan Thailand di bidang energi. Timor Leste dan Thailand menandatangani MoU “*Joint Cooperation in Energy Development between PTT Public Company Limited of Thailand and the Secretary of State for Natural Resources of Timor-Leste*” (Kerjasama Gabungan di bidang pengembangan energi antara *PTT Public Company Limited*-Thailand dan Sekretariat Negara Bidang Sumber Daya Alam-Timor Leste). Untuk memulai kerjasama energi di bawah MoU tersebut, Thailand menawarkan bantuan finansial untuk kunjungan studi bagi pejabat-pejabat Timor Leste yang mempelajari teknologi dan keahlian manajemen dari perusahaan di bidang energi milik Thailand yaitu *PTT Public Company Limited*, yang akan bermanfaat bagi pengembangan Perusahaan Minyak Nasional (*National Petroleum Company*) milik Timor Leste.¹⁶³

Berikutnya, Timor Leste melancarkan *capacity bulding* dengan asistensi dari negara Filipina di beberapa bidang yang potensial. Pertama, perjanjian bilateral di bidang kelautan dan perikanan melahirkan aktivitas konsultasi dan manajemen sumberdaya perikanan berkelanjutan yang dibangun secara mutual oleh kedua negara.

¹⁶²*Ibid.*

¹⁶³*Ibid.*

kedua, dalam bidang pendidikan, kedua negara menyetujui untuk meningkatkan pertukaran dan perluasan jaringan pendidikan termasuk kunjungan studi secara timbal balik, serta pemberian hibah untuk penelitian dan beasiswa. *The Philippine Normal University* dan Kementerian Pendidikan Nasional Timor Leste juga menandatangani Menandatangani MoU dalam mengembangkan suatu program pembangunan kapasitas bagi para guru (tenaga pendidik) dan pejabat pendidikan Timor Leste lainnya. Kemudian yang ketiga, pemberian *foreign service training* dari pemerintah Filipina yang memberikan kesempatan Timor Leste untuk mengirimkan para diplomat-diplomat junior Timor Leste ke Filipina guna memperoleh pelatihan layanan luar negeri mengingat negara Timor Leste yang relatif baru berdiri dan belum berpengalaman dalam menjalankan *foreign service*.¹⁶⁴

Terkait pemberian *foreign service training* yang tersebut, lembaga Layanan Luar Negeri Filipina (*Philippines' Foreign Service Institute*) memberikan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan para diplomat dari Kementerian Luar Negeri Timor Leste. Program *foreign service training* ini berkorelasi kebutuhan pemerintahan Timor Leste untuk melakukan *goverenmental capacity building* melalui pendirian Sekretariat Nasional ASEAN pada tahun 2009 sebagai bentuk persiapan keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Sekretariat Nasional ASEAN ini memberikan bantuan pelatihan Teknologi Informasi kepada para pejabat pemerintahan Timor Leste untuk meningkatkan kualitas SDM-nya di bidang Teknologi Informasi.¹⁶⁵

Filipina juga berupaya memberikan asistensi dalam bidang pekerjaan umum terhadap Timor Leste di mana *The Philippine Department of Public Works and Highways* (DPWH) dan Kementerian Pekerjaan Umum Timor Leste menandatangani MOU yang menjamin dan memperkenankan DPWH membantu Timor Leste membangun kapabilitas dan melakukan mentoring kepada personil Pekerjaan Umum

¹⁶⁴*Op. Cit.*, situs berita online “Sun Star” (Filipina), “*Philippines, Timor-Leste affirm strong relations; 3 pacts inked*”.

¹⁶⁵*Op. Cit.*, *Philippine Daily Inquirer*, “*Timor-Leste leader thanks Philippines for backing Asean bid*”, June 7, 2013, dalam *Asia Pacific Solidarity Network (East Timor News Digest 6 – June 1-30, 2013)*.

(PU) Timor Leste pada area perencanaan; kontrol kualitas; dan pemeliharaan infrastruktur.¹⁶⁶

Selanjutnya, terkait hubungan kooperatif yang dibangun Timor Leste dengan Malaysia lantas mendorong Malaysia menawarkan sejumlah bantuan pembangunan dan pertahanan di Timor Leste melalui *Malaysia Technical Cooperation Program* (MTCP) dan *Malaysian Defense Cooperation Program* (MDCP). Pada bulan November 2011, MTCP memberi pelatihan pada sendi-sendi pembangunan Timor Leste secara luas dan multidimensional. Antara lain MTCP memberi pelatihan pada 350 pejabat pemerintahan Timor Leste mengenai Administrasi Publik, Diplomasi dan Manajemen krisis; memberi pelatihan bagi personil Akademi Kepolisian; memberi *training* Manajemen Lapangan Udara; *Micro-finance*; manajemen dan administrasi penjara; perawatan masyarakat (*Community Nursing*); manajemen dan konstruksi jalan raya; serta sektor Agrikultur.¹⁶⁷

Asistensi pada bidang pertahanan dan keamanan juga diupayakan Timor Leste dengan beberapa asistensi dari Malaysia untuk menjaga dan memperkuat stabilitas domestik sehingga mampu menjamin keberlangsungan pembangunan Timor Leste di segala bidang secara kondusif. Sejak tahun 2002, 43 personil Angkatan Bersenjata dari Timor Leste menghadiri program diklat dari MDCP yang meliputi materi pembelajaran kapal selam (*Ship Diver's course*); pelatihan bahasa asing; hukum konflik bersenjata; serta mengenai *Joint Warfare* dan observer militer PBB. Pada tahun 2003, Malaysia mengkontribusikan dana sebesar 2.56 juta Dolar AS sebagai bantuan untuk mengembangkan sektor kekuatan pertahanan Timor Leste. Adapun personil Kepolisian Negara Malaysia, yaitu *The Royal Malaysian Police* (RMP) yang membantu misi *UN peacekeeping* untuk menanggulangi krisis sosial-politik domestik di Timor Leste sejak tahun 2006, mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 13 November 2012 dengan mendonasikan 29 kendaraan militer multi-fungsi (*multi-*

¹⁶⁶*Ibid.*

¹⁶⁷*Op. Cit.*, *Malaysia Permanent Mission to the United Nations*, "STATEMENT BY H.E. AMBASSADOR HUSSEIN HANIFF, PERMANENT REPRESENTATIVE OF MALAYSIA TO THE UNITED NATIONS AT THE SECURITY COUNCIL DEBATE ON THE SITUATION IN TIMOR-LESTE, NEW YORK, 22 FEBRUARY 2012".

purpose vehicles) senilai 3.5 juta Ringgit Malaysia (RM) kepada pemerintah Timor Leste.¹⁶⁸

Tabel 3.3 Rekapitulasi Upaya Diplomasi Ekonomi Timor Leste Untuk Memperoleh Status Keanggotaan Penuh Di ASEAN

Perdagangan		Investasi		Manajemen Bantuan dari Negara-Negara ASEAN	
Ekspor	Impor	Sektor Investasi	Investor	Bidang Bantuan dan Negara Pendorong	Rincian Bantuan
<p>a. Kopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebagai komoditi ekspor utama, menyumbang nilai ekspor sebesar 80 % dari total nilai ekspor Timor Leste keseluruhan Jenis <i>Arabica</i>, <i>Robusta</i>, <i>Liberica</i> Target utama ekspor kopi Timor Leste: Indonesia, Filipina, Malaysia (terus meningkat terutama pada tahun 2002-2007) <p>b. Komoditi ekspor lainnya: produk migas, marmar, kayu, kopra, hewan ternak, dll.</p>	<p>a. Komoditi impor utama: produk makanan dan minuman olahan, <i>capital good</i>, <i>construction materials</i>, petroleum, kendaraan dan suku cadang, dll.</p> <p>b. Negara <i>major import partner</i> di ASEAN: Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia.</p>	<p>1. <i>Coffee Plantation</i></p> <p>2. Migas (penyulingan, impor bahan bakar, pembangkit tenaga listrik)</p> <p>3. Perikanan</p> <p>4. Perkebunan dan pertanian</p> <p>5. Pariwisata dan Perhotelan</p> <p>6. Infrastruktur:</p> <p>a. Maskapai penerbangan</p> <p>b. <i>Civil Construction</i></p>	<p><i>Timor Global</i> (Singapura)</p> <p>-<i>Ellipse Energy Inter. Pte.Ltd</i> (Singapura); -<i>Pertamina</i> (Indonesia)</p> <p>-<i>Parway Fisheries</i> (Thailand dan Cina) -<i>Tuah Hun Uni Pessoa L. da.</i> (Malaysia). -<i>United Heavy Equipment Pty. Ltd</i> (Indonesia) <i>Timor Global Pty. Ltd Agro Business</i> (Singapura). -<i>Thai Pavillion</i> (Thailand) - <i>Timor Global Project Hotel & Resort</i> (Singapura) -<i>Holiwono Store</i> (Indonesia).</p> <p><i>Merpati Nusantara Airlines</i> (Indonesia) -<i>PT Wijaya Karya/WIKA</i> (Indonesia) -<i>PT Pembangunan Perumahan/PTPP</i> (Indonesia) -<i>Carya Timor Leste Pty.</i></p>	<p>1. Agrikultur (Thailand)</p> <p>2. Energi (Thailand-oleh <i>PTT Public Company Limited</i>)</p> <p>3. Perikanan dan Peternakan (Thailand, Filipina).</p> <p>4. Pendidikan (Filipina, Indonesia)</p> <p>5. Pemberdayaa pemerintahan</p> <p>a. Filipina</p> <p>b. Malaysia</p>	<p>-Diklat para pejabat pertanian Timor Leste; -Pengiriman para ahli untuk pengembangan beras lokal Timor Leste.</p> <p>Bantuan finansial serta diklat iptek dan keahlian manajemen migas.</p> <p>Konsultasi, Asistensi riset dan pelatihan teknis peternakan dan perikanan potensial Timor Leste.</p> <p>-Pertukaran pelajar, kunjungan studi timbal-balik (studi banding), pemberian hibah penelitian dan beasiswa; -Pembangunan kapasitas guru dan departemen pendidikan nasional Timor Leste (oleh <i>The Philippine Normal University</i>).</p> <p><i>Foreign Service Training</i> untuk para diplomat-diplomat junior Timor Leste. Diklat administrasi publik, diplomasi, manajemen krisis.</p>

¹⁶⁸ *Ibid.*

